

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA  
TINGKAT SMP NEGERI DI KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**



**RENA MARSELLA**

**NIM. 190563201138**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
2023**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA  
TINGKAT SMP NEGERI DI KABUPATEN KARIMUN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**RENA MARSELLA**

**NIM. 190563201138**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNG PINANG  
2023**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

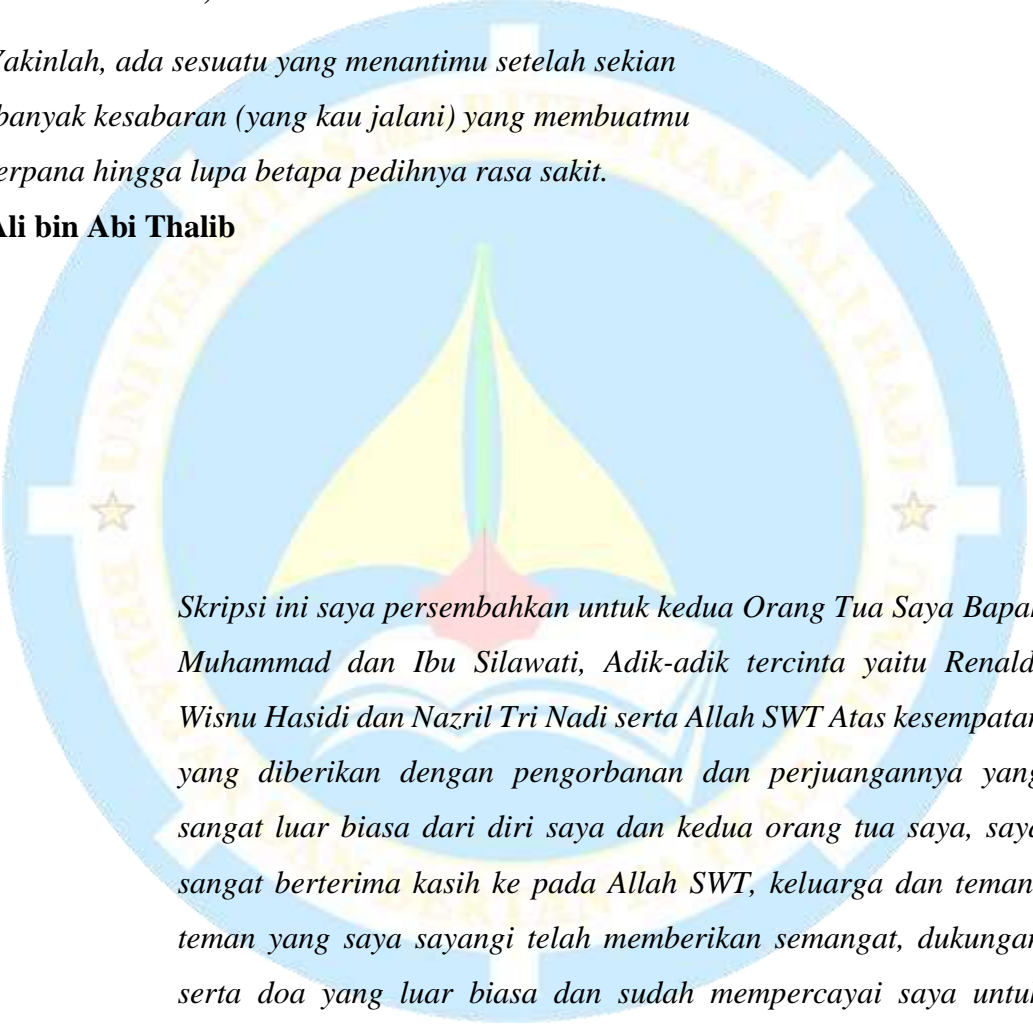
### MOTTO

*Setelah segala hal yang terjadi yang membuat adanya goresan luka. Bangkit dan percayalah keyakinan diri serta kerja keras akan selalu mampu menyembuhkan dengan membuahkan hasil yang jauh lebih baik.*

**Rena Marshella, 2023**

*Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani) yang membuatmu terpana hingga lupa betapa pedihnya rasa sakit.*

**Ali bin Abi Thalib**



*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua Saya Bapak Muhammad dan Ibu Silawati, Adik-adik tercinta yaitu Renaldi Wisnu Hasidi dan Nazril Tri Nadi serta Allah SWT Atas kesempatan yang diberikan dengan pengorbanan dan perjuangannya yang sangat luar biasa dari diri saya dan kedua orang tua saya, saya sangat berterima kasih ke pada Allah SWT, keluarga dan teman-teman yang saya sayangi telah memberikan semangat, dukungan serta doa yang luar biasa dan sudah mempercayai saya untuk memperoleh gelar ini*

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda taan di bawah ini:

Nama : Rena Marshella  
Nomor Induk Mahasiswa : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi  
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada  
Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.


Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



  
**RENA MARSELLA**  
NIM. 190563201138

## PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Rena Marshella  
Nomor Induk Mahasiswa : 190563201138  
Program Studi/Departemen/  
Konsentrasi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi  
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada  
Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal: 22 Juni 2023  
Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Rumzy Samin, S.Sos., M.Si.  
NIDN. 1009037101

Menyetujui, tanggal: 14 Juni 2023  
Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si.  
NIDN. 0001108304

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.  
NIP/NIDN.0016032702

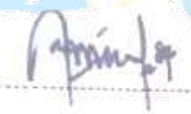




## PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rena Marshella  
Nomor Induk Mahasiswa : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 14 juli 2023 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

### Dewan Penguji,

1. **Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si** Ketua (.....)  
NIP/NIDN. 0016038702
2. **Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si** Anggota 1 (.....)  
NIP/NIDN. 1009037101
3. **Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si** Anggota 2 (.....)  
NIP/NIDN. 0001108304
4. **Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si** Anggota 3 (.....)  
NIP/NIDN. 1005087301
5. **Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si** Anggota 4 (.....)  
NIP/NIDN. 198008182015041002

Disahkan Oleh:

Dekan,



**Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH**  
NIP. 198109232015041002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agung Syakti, S.Pi, DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Dr. Oksep Adhayanto, S., M.HH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing utama saya yang telah memberikan ilmu serta sudah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si. Selaku dosen pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu dosen, yang telah membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan juga staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga ikut berkontribusi;
7. Hendri, S.Pd, MMPd selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
8. Terima kasih untuk Mayang Sary, Dian Pratiwi, dan Hanna yang telah menemani saya dari SMA sampai saat ini, yang selalu mendengar curhatan saya, menguatkan saya, mensupport saya, mendoakan saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Terima kasih Harisyah Sariadi yang telah menemani proses perkuliahan saya dari awal hingga saat ini, menjadi support terbaik saya, menjadi sosok penyabar yang selalu menguatkan, menjadi tempat yang hangat, selalu mengingatkan saya tanpa menghakimi, menjadi tempat untuk saya pulang ketika semua tak sesuai rencana dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini;
10. Terima Kepada (Kost Biru) yaitu, Nurma Lingga Wati, Mayang Sary, Dewi Asria Ningsih, Fattia Audina, Bela Sapira yang telah berjuang bersama, menjadi penguat, selalu berusaha untuk membantu dan menyelesaikan perkuliahan ini bersama, kalian adalah support sistem di masa perkuliahan yang sangat saya doakan, saya rasa perkuliahan akan membosankan jika tidak bertemu kalian.
11. Terima kasih untuk diri sendiri yang dari awal sampai saat ini memiliki rasa semangat yang selalu menggebu, yang selalu berusaha tersenyum ketika semua



tidak sesuai rencana, yang telah berjuang dan berkorban dalam segala hal untuk sampai dititik ini dan mampu membuktikan kepada orang tua tercinta bahwa penulis bisa mendapat gelar.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan didalam penelitian ini. Oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa akan datang. *Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tanjungpinang, Juli 2023



**Rena Marshella**  
**NIM. 190563201138**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Rena Marshella  
Nomor Induk Mahasiswa : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 14 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**Rena Marshella.**  
**NIM. 190563201138**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TINGKAT SMP NEGERI DI  
KABUPATEN KARIMUN**

**Oleh:**

**Rena Marshella  
NIM. 190563201138**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP di Kabupaten Karimun khususnya di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data secara primer dan skunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Teori Van Meter Van Horn dengan enam indikator yaitu Ukuran-ukuran atau Tujuan-tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap/kecendrungan (*Disposition*), komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil dari penelitian (1) ukuran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan walaupun standar dari keberhasilan belum sesuai, (2) SDM sudah memiliki kuantitas dan kualitas tetapi masih ada fasilitas yang rusak seperti ruang kelas, (3) para pelaksana paham dan menjalankan tugas sesuai aturan dengan tegas dan disiplin, (4) masih adanya pro kontra dari masyarakat, para pelaksana sejauh ini sangat membantu pelaksanaan sistem zonasi, (5) Komunikasi antar organisasi sudah terjalin hanya saja belum meratanya penyebaran poster dan sosialisasi yang diberikan, (6) dari segi sosial masih kurang pemahaman masyarakat terkait komputer dari segi ekonomi dan politik sudah berjalan dengan sesuai tujuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing sudah menjalankan PPDB sistem zonasi sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Karimun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

**Kata Kunci: Implementasi, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik**

**IMPLEMENTATION OF THE NEW STUDENT ADMISSION ZONING  
SYSTEM (PPDB) POLICY AT THE PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL  
LEVEL IN KARIMUN REGENCY**

**By:**

**Rena Marshella  
NIM. 190563201138**

***ABSTRACT***

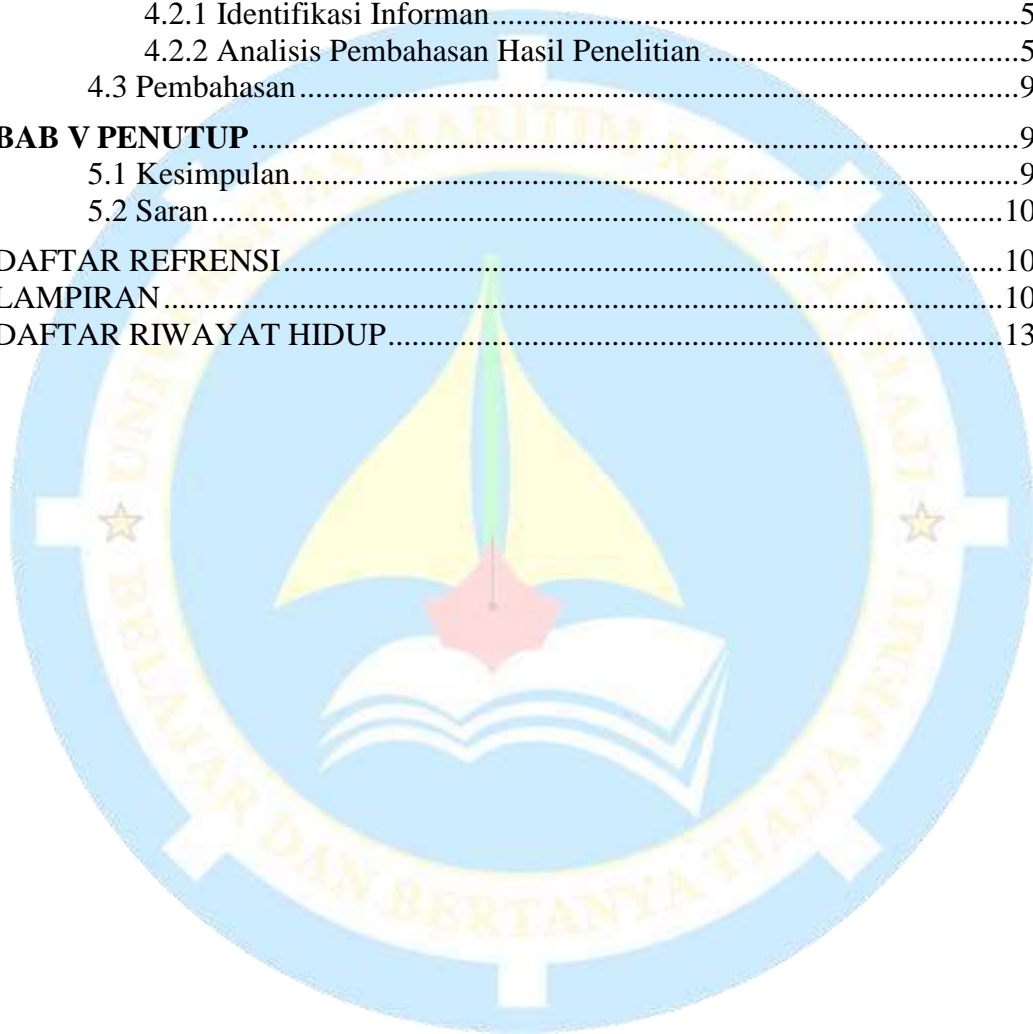
The purpose of this study is to find out and describe the Implementation of the Zoning System Policy for New Student Admissions (PPDB) at the Junior High School Level in Karimun Regency, especially at SMP Negeri 1 Karimun and SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing. This study uses a qualitative descriptive method with primary and secondary data sources. The theory used in this study is the Van Metre Van Horn Theory with six indicators: policy measures or objectives, resources, implementing characteristics, attitudes/dispositions, inter-organisational communication, social environment, economy, and politics. The study's findings are as follows: (1) the size and objectives of the zoning system policy at SMP Negeri 1 Karimun and SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing have been operating in accordance with the established regulations even though the standards of success are not appropriate. (2) HR has already established quantity and quality but there are still facilities such as classrooms that are damaged. (3) the executors comprehend and perform their duties in accordance with the rules in a strict and disciplined manner. And (4) there are still pros and cons from the community, so far the executors have been very helpful in implementing the zoning system. (5) There has been inter-organizational communication; nevertheless, posters and socialisation have not all been dispersed equally. 6) From a societal standpoint, the general populace still doesn't understand computers. It has been operating in accordance with its objectives from an economic and political standpoint. The study's findings indicate that the PPDB zoning system has been implemented at SMP Negeri 1 Karimun and SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing in accordance with Permendikbud Regulation Number 1 of 2021 and the technical guidelines established by the Regent of Karimun Regency prior to the start of new student admissions.

***Keywords: Implementation, Zoning System, Acceptance Of Student***

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	14
1.4.2 Manfaat Praktis .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	15
2.1.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Kerangka Teori.....	17
2.2.1 Teori Implementasi .....	17
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	18
2.2.3 Kebijakan Pendidikan .....	20
2.2.4 Model Implementasi Kebijakan .....	21
2.2.5 Sistem Zonasi .....	25
2.2.6 Peserta Didik .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran .....	28
2.4 Definisi Konsep.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	33
3.2 Objek dan Lokasi penelitian.....	34
3.4 Sumber Data .....	35
3.6 Informan .....	38
3.7 Teknik Analisi Data .....	39
3.8 Jadwal Penelitian.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi penelitian .....	42

4.1.1 Sejarah Kabupaten Karimun .....	42
4.1.2 Gambaran Umum SMP Negeri 1 Karimun Dan SMP Negeri SATAP 4 Tebing .....	44
4.1.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri SATAP 4 Tebing .....	49
4.1.4 Keadaan Siswa .....	50
4.1.5 Pedoman Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 .....	52
4.2 Hasil Penelitian .....	56
4.2.1 Identifikasi Informan.....	56
4.2.2 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
4.3 Pembahasan.....	91
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	100
DAFTAR REFRENSI.....	103
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135

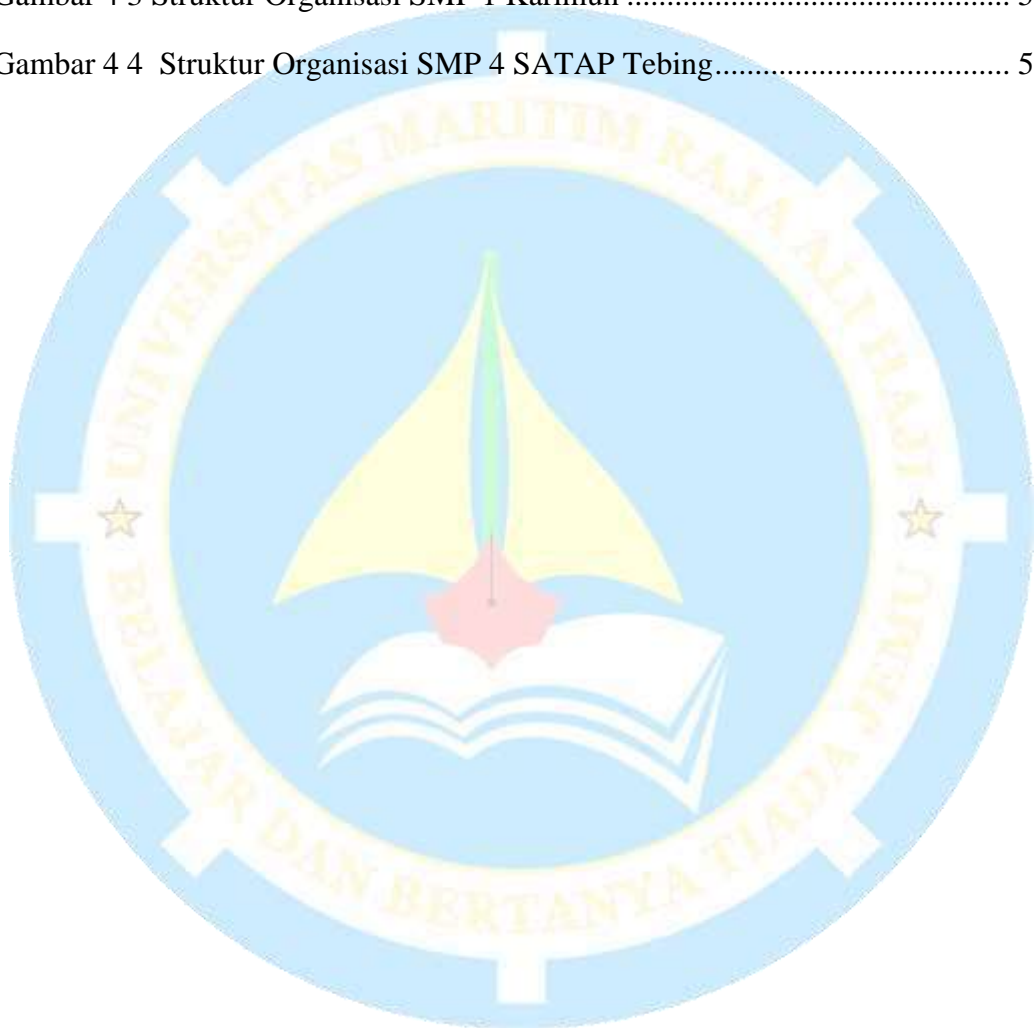


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Wilayah Sistem Zonasi Di Kab.Karimun .....	6
Tabel 1. 2 Data Keseluruhan SMP Kab.Karimun .....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3. 1 Daftar Jumlah Informan .....	38
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4. 1 Jumlah Daya Tampung Siswa SMP 1 Karimun.....	51
Tabel 4. 2 Jumlah Daya Tampung Siswa SMP 4 SATAP Tebing.....	51
Tabel 4. 3 Jumlah Keseluruhan Di SMP 1 Karimun.....	51
Tabel 4. 4 Jumlah Keseluruhan Di SMP 4 SATAP Tebing.....	51
Tabel 4. 5 Daftar Identifikasi Informan .....	58
Tabel 4. 6 Sarana dan Prasarana Di SMP 1 Karimun .....	72
Tabel 4. 7 Sarana dan Prasarana SMP 4 SATAP Tebing .....	72

## DAFTAR GAMBAR

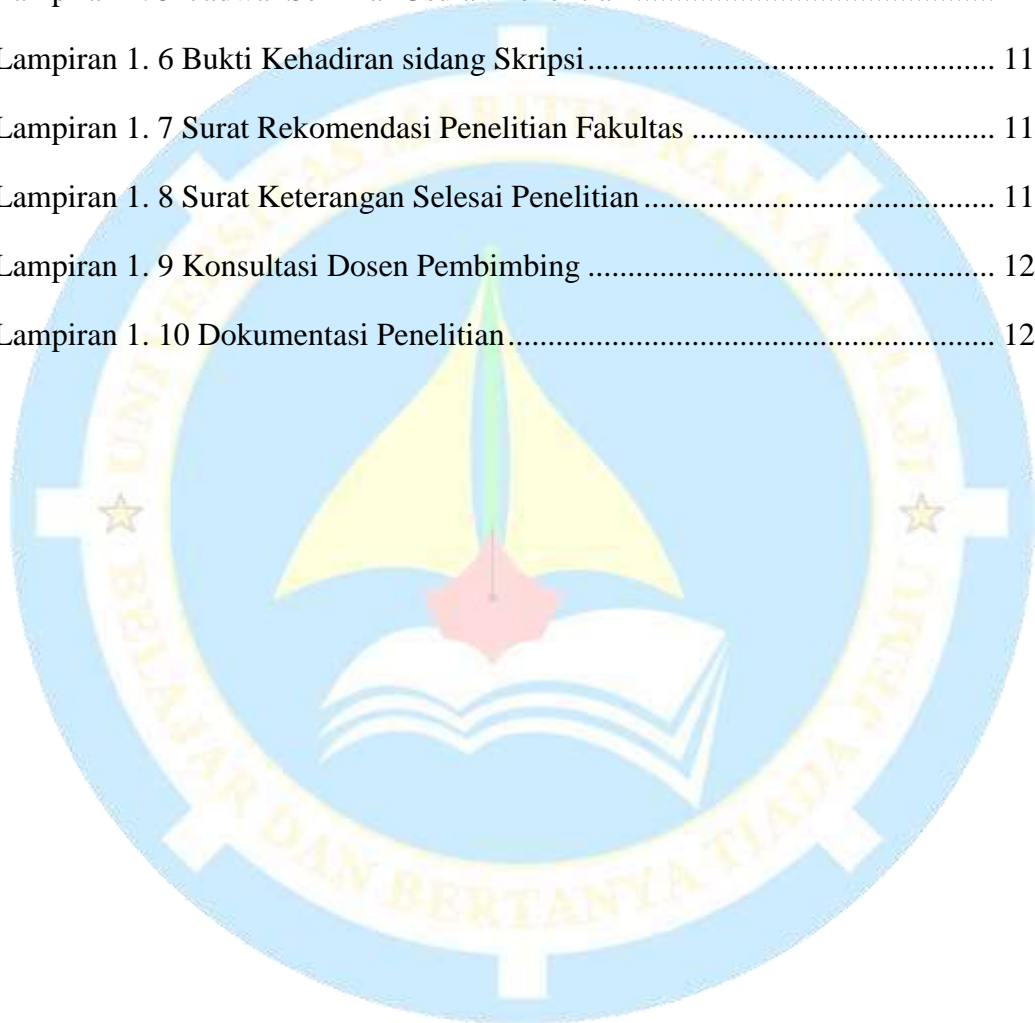
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4 1 Peta SMP Negeri 1 Karimun.....	45
Gambar 4 2 Peta SMP Negeri 4 SATAP Tebing.....	48
Gambar 4 3 Struktur Organisasi SMP 1 Karimun .....	50
Gambar 4 4 Struktur Organisasi SMP 4 SATAP Tebing.....	50





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara .....	106
Lampiran 1. 3 Surat Ketetapan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian.....	109
Lampiran 1. 4 Surat Ketetapan Seminar Usulan Penelitian.....	111
Lampiran 1. 5 Jadwal Seminar Usulan Penelitian .....	112
Lampiran 1. 6 Bukti Kehadiran sidang Skripsi.....	113
Lampiran 1. 7 Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas .....	114
Lampiran 1. 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	119
Lampiran 1. 9 Konsultasi Dosen Pembimbing .....	122
Lampiran 1. 10 Dokumentasi Penelitian.....	125



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sumber daya yang berkualitas dalam sebuah negara. Tujuan pendidikan adalah pengembangan sifat-sifat manusia yang disengaja. Di semua jenjang tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kegiatan ini dilakukan secara terus menerus karena sadar akan tujuannya. Dalam sistem pendidikan terpadu, semuanya terhubung. Dimana Seperti yang kita ketahui bahwasannya pendidikan memang wajib diterapkan disetiap negara agar memiliki kemajuan dari berbagai aspek.

Pendidikan menjadi sebuah penggerak dalam kelangsungan hidup baik itu dari segi sosial, ekonomi politik dan sebagainya. Kualitas pendidikan juga menjadi dasar utama memiliki wawasan yang baik dan berkarakter oleh karena itulah pendidikan harus diperhatikan demi menumbuhkan dan menghasilkan sumber daya yang memiliki ide dan motivasi yang bisa membangun bangsa. Pemerintah juga harus membuat perubahan secara bersamaan terhadap hal yang berkaitan pada pendidikan saat ini.

Indonesia harus terus memberikan prioritas utama kepada pendidikan dalam artian luas. Komitmen terhadap pendidikan harus termanifestasi bukan hanya dalam total tahun sekolah yang tersedia bagi semua siswa, tetapi juga dalam hal mutu dan isi. Para pemimpin saat ini harus menerima bahwa persyaratan untuk kompetisi pendidikan sekarang sangat berbeda dengan sekolah pendidikan masa mendatang

yang serba canggih dan berkualitas karena dari pendidikan yang berkualitas juga memiliki manfaat dan kegunaan (Subiyantoro, 2004:348).

Fungsi dan kegunaan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik 'menyiapkan "diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap,tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan diri (Suardi, 2016).

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara, sesuai Pasal 11 ayat 1 undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Mutu layanan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan standar akademik dan meningkatkan kerangka pendidikan yang digunakan di masing-masing institusi. Peningkatan layanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan strategi untuk menaikkan standar pendidikan.

Menurut Pasal 31 UUD 1945, pada ayat (1) dan (2), setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib dibiayai oleh pemerintah. Pada ayat (3), pemerintah berupaya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang menumbuhkembangkan akhlak mulia dan taqwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pengembangan sistem zonasi pada bidang pendidikan lainnya didasarkan pada terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan sekolah menengah kejurusan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Dengan menerapkan

pendekatan baru ini, akan berdampak jangka panjang bahwa setiap sekolah akan memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sama dalam mendukung setiap proses penerimaan siswa baru; kasta atau label lain tidak akan lagi digunakan untuk menggambarkan institusi atau siapa pun yang terkait dengannya (PDSPK Kemendikbud, 2018).

Dengan meningkatkan standar secara keseluruhan adalah mungkin untuk memperbaharui sistem pendidikan dan memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang sebanding. Reformasi baru telah dilakukan pada sistem pendidikan dari yang sudah ada, khususnya dengan mengadopsi sistem zonasi untuk pengenalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan sebelum memulai tahun ajaran baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dimana satuan pendidikan memilih calon peserta didik baru untuk diterima di sekolah sebagai peserta didik baru pada satuan pendidikan.

Selain bertujuan untuk pemerataan pendidikan sistem zonasi ini juga di pengaruhi dengan adanya efek dari latar belakang dari kemampuan orang tua dimana masih banyak masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak dengan berbagai faktor keadaan. *Grand theory* dari Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah teori administrasi negara. Teori administrasi negara menurut Gie (2011:3) mengatakan: “administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.”

Kebijakan zonasi pendidikan menggunakan metode wilayah geografis yang dikenal dengan zona untuk mempercepat pemerataan akses pemerataan pendidikan yang bermutu. Zona yang dimaksud adalah wilayah tempat penyelenggaraan layanan pendidikan, yang biasanya berada dalam satu wilayah administrasi. Hal itu merujuk pada betapa mudahnya negara memperoleh layanan pendidikan terdekat. Seperti yang diketahui zonasi pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan indonesia yang lebih baik, melibatkan semua pihak (setiawan & Kusnadi, 2019:5)

Sistem zonasi adalah sistem yang mengamankan setiap sekolah berlaku untuk menerima semua siswa masuk yang mendaftar sesuai dengan zona radius yaitu dua kilo meter atau jarak sekolah tanpa terkecuali. Selain itu, calon siswa harus mendaftar di sekolah yang terdekat dengan radius 2 km dengan tempat tinggalnya atau lokasi yang ada di kartu keluarga. Dengan begitu, dapat menurunkan konsentrasi anak cerdas di sekolah yang memiliki reputasi favorit. Jalur zonasi di Kabupaten Karimun memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat yaitu 2 km dengan sekolah diterima minimal 50% dari total jumlah keseluruhan daya tampung, apabila jumlah pendaftaran melebihi maka prioritas ialah jarak udara yang terdekat dari rumah kesekolah, jalur afarmasi yaitu dari keluarga tidak mampu paling sedikit 15% dari jumlah daya tampung, jalur perpindahan orang tua sebanyak 5% dari jumlah daya tampung, lalu jalur prestasi sisa dari kuota jalur lainnya.

Karena diketahui dengan baik bahwa sistem zonasi memiliki dampak positif dan negatif, khususnya di Kabupaten Karimun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkannya pada tahun 2018. Kepala Dinas Pendidikan,

menyatakan bahwa sementara sistem zonasi upaya untuk menawarkan setiap siswa preferensi untuk mendaftar di sekolah terdekat, kita juga harus menyadari bahwa masih ada beberapa kursi.

Seiring dengan kebijakan pemerintah juga menerapkan kebijakan baru agar proses pendaftaran menjadi lebih sederhana dan efektif. Kebijakan baru ini, yang dikenal sebagai pendaftaran online, mempermudah kebutuhan siswa baru dan orang tua dalam proses pendaftaran, lalu mengunjungi sekolah untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses pendaftaran dan melihat pengumuman terkait penerimaan peserta didik, masyarakat selalu dapat membaca pengumuman atau informasi melalui smartphone atau komputer yang terhubung ke internet, termasuk informasi penerimaan siswa baru.

Kondisi daerah harus diperhatikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi karena beberapa daerah memiliki banyak sekolah dan ada yang memiliki sedikit sekolah, serta adanya ketidak seimbangan mengenai beberapa daerah yang memiliki kepadatan penduduk khususnya dikabupaten karimun ( Raharjo & Yufriawati, 2022:6).

Untuk mendukung proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Karimun Terbitnya Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Didalam peraturan bupati karimun sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun.

Kabupaten Karimun mempunyai 12 Kecamatan 29 Kelurahan serta 42 Desa (dari total 70 Kecamatan. 141 Kelurahan dan 275 Desa di seluruh kepulauan Riau). Tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 240.891 jiwa dengan luas wilayahnya 912,75 km serta sebaran penduduk 264 jiwa (Angayubagia, 2022). Zonasi dimana dalam kebijakan ini jarak alamat tempat tinggal dengan sekolah SMPN Kabupaten Karimun yang ingin didaftar. Jalur zonasi ini pada umumnya didasarkan pada kelurahan /kecamatan yang berdekatan dengan sekolah tersebut.

**Tabel 1. 1 Wilayah Sistem Zonasi Di Kab.Karimun**

SMP NEGERI KABUPATEN KARIMUN		
SMP	Wilayah Zonasi	Kuota yang diterima
SMPN1 Karimun	Kelurahan Tanjung Balai, Kelurahan Teluk air, Kelurahan Lubuk Semut, Tanjung Balai kota, Sungai Lakam Timur	256 siswa
SMPN2 Karimun	Kelurahan Tanjung Balai, Teluk air, Lubuk semut, Tanjung Balai Kota, Sungai Lakam Timur	160 siswa
SMPN3 Karimun	Pulau Parit (Tidak zonasi)	32 siswa
SMPN4 Karimun	Pulau Tulang (Tidak zonasi)	32 siswa
SMPN 1 Meral	Kelurahan Sungai Pasir, Sungai Raya, Meral kota, Baran barat	192 siswa
SMPN 2 Meral	Kelurahan Sungai Pasir, Sungai Raya, Meral kota, Baran Barat	128 siswa
SMPN 3 Meral	Kelurahan Baran Barat, Baran Timur, Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat	160 siswa
SMPN 1 Meral Barat	Kelurahan Pasir Panjang, Darus Salam	96 siswa
SMPN 2 Meral	Kelurahan Parit Benut, Desa Pangke barat, Desa Pangke, Darus salam	96 siswa
SMPN 1 Tebing	Kelurahan kapling, Sungai Lakam Barat, Harjo sari, Tebing	224 siswa
SMPN 2 Tebing	Pulau Karimun	128 siswa

SMPN 3 Tebing	Kelurahan Tebing, Pamak, Teluk uma, Harjo sari, Darus salam	192 siswa
SMPN 4 Tebing	Desa Pongkar, Kelurahan Darus salam	64 siswa
SMPN 1 Buru	Pulau Buru	128 siswa
SMPN 2 Buru	Pulau Papan	64 siswa
SMPN 1 Kundur	Tanjung Batu kota, Tanjung Batu Barat, Sei Sebasia bagian barat, Parit Gantung, parittegak, Parit seratus, Parit Baru, Keluruhan Gading Sari	256 siswa
SMPN 2 Kundur	Tanjung Batu Kota, Tanjung Batu Barat, Sei Sebasia, Sei Unggar, Sei Unggar Utara sampai Parit Siping	128 siswa
SMPN 3 Kundur	Lubuk dan Gading Sari	64 siswa
SMPN 1 Kundur barat	Sawang, Sawang Selatan dan Sawang Laut	128 siswa
SMPN 2 Kundur barat	Kobel laut, kampung Baru	64 siswa
SMPN 3 Kundur barat	Km 6 s/d km 14 Pulau Kundur	64 siswa
SMPN 1 Kundur utara	Tanjung Berlian, Berlian Barat, Sei Ungar Utara, Parit Senang sampai Sungai Raya	96 siswa
SMPN 2 Kundur utara	Perayun, Teluk Radang, Gemuruh, Setunak	128 siswa
SMPN 3 Kundur utara	Sang lang, Teluk Radang, Kampung Asam, Selat Kisar	64 siswa
SMPN 1 Ungar	Pulau Ungar dan Manda	96 siswa
SMPN 2 Ungar	Pulau Ngai	32 siswa
SMPN 1 Belat	Pulau Lebu, Penarah, Sebele, Degung	64 siswa
SMPN 2 Belat	Sungai Asam	32 siswa
SMPN 3 Belat	Tebias	32 siswa
SMPN 1 Moro	Tebias, Pulau Sugi Bawah, Keridik, Pulau Jang, Pulau Moro dan Pauh	192 siswa
SMPN 2 Moro	Dusun Niur, Tanjung Semukul, Buah Rawa, Keban, Selat Binga	64 siswa
SMPN 3 Moro	Setonggeng, Kampung Baru, Kampung Tengah dan Pasir Todak	32 siswa
SMPN 4 Moro	Selat Mie	32 siswa
SMPN 5 Moro	Tanjung Pelanduk	32 siswa
SMPN 6 Moro	Buluh Patah	32 siswa
SMPN 7 Moro	Sugie	32 siswa
SMPN 8 Moro	Pulau Bahan	32 siswa



SMPN 1 Durai	Tanjung Kilang, Telaga Tujuh	64 siswa
SMPN 2 Durai	Sanglar, Tebing, Teluk Sekengkam, Tanjung Perai	32 siswa
SMPN 3 Durai	Pulau Sandam, Semembang, Akad	32 siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2023

Tingkat sekolah SMP di kabupaten karimun memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak dimana hal tersebut lah yang membuat menteri pendidikan memiliki upaya-upaya yang di buat dalam berbagai program kebijakan dalam dunia pendidikan yang tentunya untuk memajukan dunia pendidikan yang lebih baik lagi.(Statistik n.d.)

**Tabel 1. 2 Data Keseluruhan SMP Kab.Karimun**

SEKOLAH SEKABUPATEN KARIMUN					
SMP Swasta	SMP Negeri	SD-SMP satu atap	SMA Swasta	SMA Negeri	Total
13 sekolah	40 sekolah	14 sekolah	12 sekolah	19 sekolah	98

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengatakan sistem zonasi yang dilakukan di Kabupaten Karimun saat ini juga merupakan salah satu strategi cepat pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang berkualitas agar tidak terjadi lagi penumpukan-penumpukan siswa, lalu agar tidak adanya lagi predikat sekolah favorite, lalu agar tidak terjadinya pemaksaan dalam satu ruangan dimana batas siswa didalam kelas melebihi kapasitas yang disediakan setiap kelas, hal ini membuat proses belajar mengajar tidak terlaksana dengan baik dan efektif.

Dalam sistem zonasi ini tentunya ada resiko dan permasalahan yang timbul salah satunya beberapa orang tua yang mengeluh dan protes bahwa anak mereka tidak diterima disistem zonasi yang diterapkan padahal mereka masuk kedalam

wilayah zonasi yang dicantumkan, Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengenai kebijakan sistem zonasi yang dijalankan, Ada juga beberapa kasus yang terjadi yang dimana kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan yaitu adanya siswa baru di kabupaten karimun yang memiliki umur diatas 15 tahun masuk kedalam zonasi SMP yang diinginkan tetapi ia mendapat penolakan dikarenakan umurnya yang tidak sesuai persyaratan sistem zonasi berbagai ancaman yang dilakukan siswa tersebut seperti bunuh diri agar dapat memasuki SMP yang diinginkan yang akhirnya membuat sekolah tersebut menerima siswa baru ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (PotretNews.com).

Permasalahan lain yang terjadi yaitu terkait daya tampung dimana permasalahan daya tampung masih terus terjadi sebelum dan sesudah melaksanakan sistem zonasi tidak sedikit yang kecewa jika mereka tidak diterima di SMP yang diinginkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yaitu Bapak Sugianto mengatakan beliau meminta kepada orang tua yang ekonominya menengah keatas untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi persoalan daya tampung yang terjadi. (rcmnews.id).

Terjadinya kenaikan jumlah pendaftaran disetiap tahunnya pada sekolah SMP Negeri 1 Karimun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 278 dan tahun 2022 sebanyak 316 dari kenaikan jumlah pendafatar tersebut tidak adanya perubahan kuota atau daya tampung dari sekolah tidak adanya penambahan kuota padahal jumlah

pendaftar terus meningkat setiap tahunnya. Lain halnya dengan SMP 4 Satu Atap Tebing yang belum pernah memenuhi kuota yang disediakan.

Komisioner ombudsman Suedy mengatakan bahwa dalam sistem zonasi yang diterapkan ini juga masih terjadi malaadministrasi ditemukannya jual beli surat domisili, adanya intervensi pejabat daerah tertentu, adanya pungutan liar, dan ketidaksesuaian titik koordinat di jaringan online. Seharusnya disetiap sekolah salah satunya sekolah kabupaten karimun sudah bisa mengetahui calon-calon siswanya sejak dua atau tiga bulan sebelumnya sehingga dapat memberi tahu orang tua siswa bahwa anak mereka akan menjadi murid baru disekolah tersebut atau tidak.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas dapat dikaitkan dengan teori Van Horn (1975) yang digunakan untuk memperkuat dari penelitian ini mengenai adanya idealitas dan realitas secara keseluruhan yang terjadi dalam proses implementasi sistem zonasi. Yang dimana idealitasnya yaitu pertama tercapainya tujuan yang diinginkan untuk membuat sebuah pemerataan pendidikan, penghapusan pelebelan, pelayanan pendidikan yang lebih bagus serta membantu perekonomian namun realitasnya, sampai saat ini masih adanya penumpukan siswa baru dari beberapa sekolah, masih kurangnya pelayanan pendidikan yang diinginkan. Kedua, Sumber daya dimana setiap sekolah memiliki sumber daya manusi dan non manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, namun realitanya masih kurangnya fasilitas yang dimiliki dari beberapa sekolah untuk melaksanakan sistem zonasi. Ketiga, Karakteristik Pelaksana yang mendukung kebijakan serta peserta didik baru yang mempercepat pelaksanaan, realitasnya masih banyak para pelaksana yang kurang

memperhatikan masyarakat dalam proses pendaftaran serta peserta didik yang masih memperlambat proses dikarenakan kurangnya pemahaman terkait sistem zonasi. Keempat Sikap/Kecendrungan reaksi para pelaksana yang siap, sudah adanya pengetahuan dan pemahaman para guru, realitasnya masih adanya ketidaksiapan dari para guru dikarenakan terjadinya perbedaan kualitas kemampuan setiap anak di dalam kelas, semua guru paham terkait sistem zonasi tetapi tidak semua guru mengerti cara proses pendaftaran sistem zonasi yang dijalankan. Kelima Komunikasi antar organisasi yang terus terjalin, realitasnya masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait sistem zonasi. Keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berjalan sesuai dan tidak ada kendala, realitasnya dari lingkungan sosial masih terjadinya pro kontra dari masyarakat, dari ekonomi tidak semua masyarakat merasa terbantu karena tidak setiap siswa diterima di SMP Negeri, dari politik masih terus terjadinya perdebatan terkait kuota yang berubah dan tidak sesuai bahkan masih adanya kepentingan politik yang terjadi.

Terkait permasalahan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMPN Kabupaten Karimun ini peneliti mengambil beberapa sampel dari SMP Negeri di Kabupaten Karimun untuk diteliti lebih lanjut yakni SMP Negeri 1 Karimun yang ialah sekolah favorite dimana sekolah SMP 1 Karimun selalu menjadi panduan dan contoh baik dalam menjalankan sistem zonasi di kabupaten karimun dan SMP Negeri 4 Tebing yang ialah sekolah reguler dan sekolah yang termasuk kedalam kriteria 3T ( Terpencil, Terdepan, Terisolir) .

SMP Negeri 1 Karimun merupakan salah satu sekolah terfavorite di kabupaten karimun dimana tidak sedikit murid berlomba-lomba untuk masuk ke sekolah tersebut karena memiliki akreditasi A walaupun sebenarnya sudah tidak ada lagi julukan sekolah favorite atau tidak, hal ini lah yang menyebabkan terjadinya penumpukan siswa sesuai yang dikatakan oleh kepala sekolah SMP 1 Karimun Ibu Salawati mengatakan bahwa dimana kuota yang disediakan itu kurang dengan jumlah siswa baru yang mendaftar akan tetapi saat ini sekolah tersebut sudah melaksanakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Sedangkan sekolah SMP Negeri 4 Tebing merupakan salah satu sekolah yang berada di pelosok dan pedalaman yang memiliki lokasi cukup jauh dan terpencil dimana sekolah ini juga dijuluki dalam kriteria 3T sekolah ini juga sudah melaksanakan sistem zonasi walaupun sekolah tersebut terletak dilokasi yang cukup jauh, terpencil dan sedikit penduduk tetapi sistem zonasi masih berjalan.

Di Kabupaten Karimun memiliki wilayah yang luas, daerah yang cukup banyak beragam dan sekolah yang banyak, dimana disetiap daerah belum tentu memiliki beberapa SMP ada beberapa daerah yang hanya mempunyai satu sekolah hal ini di karena keterbatasan dari berbagai hal dari infrastururur, sumber daya manusia yang masih kurang, serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, kaitan kajian ini dengan kajian administrasi negara, yang membahas tentang interaksi antara masyarakat dan pemerintah, salah satunya adalah menimbulkan perubahan sosial dalam pendidikan sistem zonasi, sehingga mempengaruhi kehidupan mereka.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang di buat oleh pemerintah pada penerimaan peserta

didik baru di SMP Negeri Kabupaten Karimun dengan judul : “ **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun) “.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut akan diteliti oleh peneliti dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan di atas “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMPN di Kabupaten Karimun”?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Karimun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

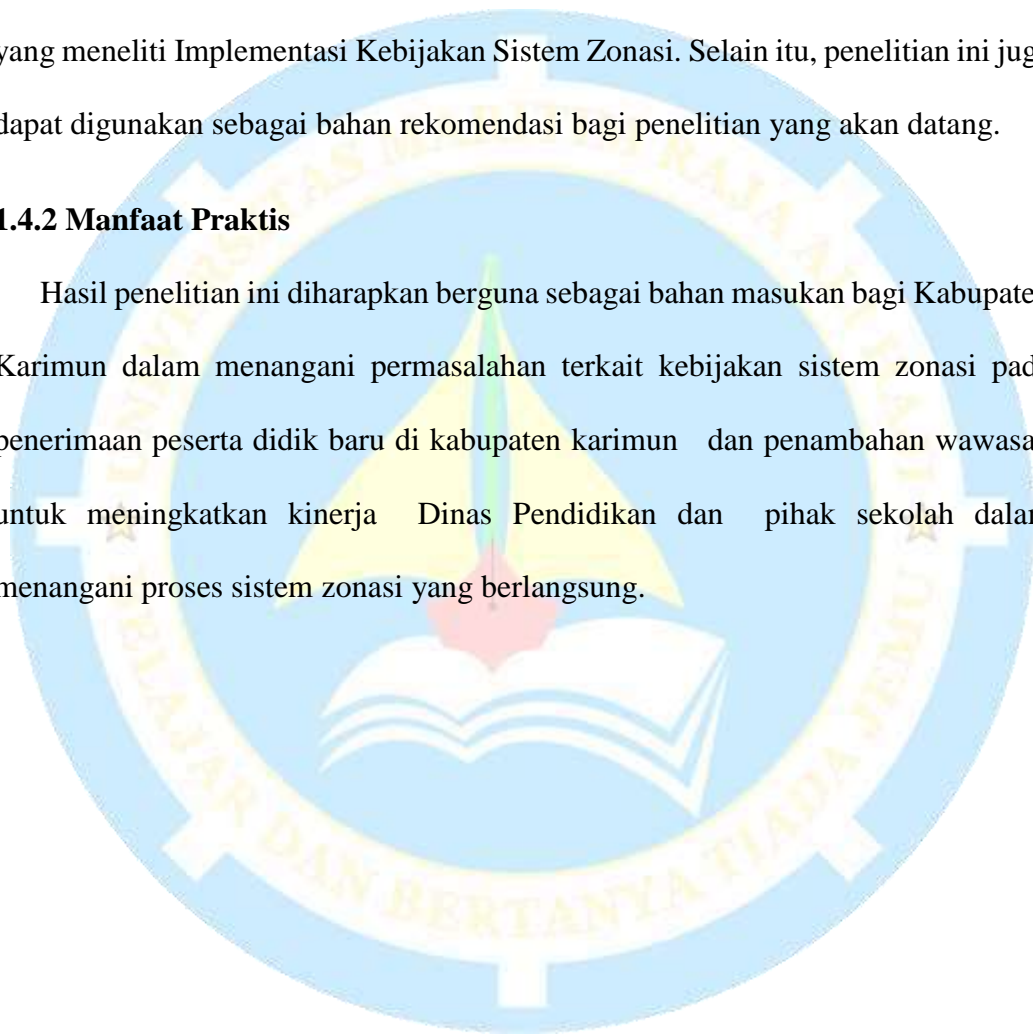
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki manfaat dan kegunaan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, begitu pula dengan kajian ini, penulis berharap berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya terutama penulis sendiri tentunya. Karena dari hasil penelitian ini Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi berharap agar menarik Penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama dan serupa diharapkan dapat menarik minat peneliti lain khususnya mahasiswa.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berusaha berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi. Dari penelitian studi-studi yang dikaji sebelumnya, beberapa kajian mengenai kebijakan sistem zonasi misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Juliani, Elsa Nida, & Yunita Sari yang meneliti Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi penelitian yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi Kabupaten Karimun dalam menangani permasalahan terkait kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di kabupaten karimun dan penambahan wawasan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam menangani proses sistem zonasi yang berlangsung.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya terkait

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi yaitu :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Elsa Nida (2019) dengan judul Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik	Kajian ini menggunakan rancangan studi kasus untuk lebih mempermudah memperoleh informasi yang sebenarnya. Dalam kajian ini ditemukan masih adanya kendala yang dialami dalam sistem zonasi ini yaitu kurangnya pemahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan beberapa wali murid masih memiliki pendidikan yang rendah sehingga susah untuk memahami teknologi yang mendukung sistem zonasi yang dijalankan	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ialah lokasi objek sedangkan penelitian yang dilakukan adalah membahas mengenai implementasinya. Pada penelitian terdahulu membahas kepada implementasi dan kendala yang terjadi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru dan menggunakan metode kualitatif
2	Juliani (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Negeri 1 Gowa	Berdasarkan temuan kajian yang dilakukan dalam kebijakan sistem zonasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Gowa sudah bagus. Tetapi disamping itu ada kelemahannya, terjadinya kesalahan dikarenakan ada siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah justru tidak	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ialah lokasi objek dan fokus penelitiannya di SMA. Pada penelitian terdahulu membahas implementasi melalui jalur yang diterapkan dan undang-undang yang disahkan serta dampak dari implementasi kebijakan serta menggunakan teori George C Edward III . Sedangkan penelitian



		lolos masuk di SMA Negeri 1 Gowa. Jadi bisa di simpulkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik.	yang dilakukan membahas bagaimana implementasi kebijakan dari dua sekolah dan menggunakan teori Van Meter Van Horn. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama meneliti implementasi kebijakan pada penerimaan peserta didik baru.
3.	Yunita Sari (2020) Dengan judul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Negeri Kota Serang	Setelah penulis melakukan observasi lapangan dan berbagai teknik yaitu teknik <i>snowball sampling</i> untuk mengumpulkan data dan sumber informasi dimana teknik pengumpulan informasi yang digunakan yaitu <i>triangulasi</i> (gabungan) kebijakan tersebut ternyata belum terimplementasi dengan baik. hal tersebut terjadi karena banyaknya keluhan siswa atau siswi dan orang tua	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan ialah Lokasi penelitian dan fokus penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu membahas penerimaan peserta didik baru SMA sedangkan peneliti membahas penerimaan peserta didik baru SMP. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai implemntasi kebijakan dan menggunakan alat yang sama dalam mengambil informasi.
4	Pinuji Handayani (2021) dengan judul Implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru(Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMAN 8 Batam)	Dari temuan di lapangan yang dilakukan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam sudah berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan hanya saja jumlah peserta didik yang mendaftar tidak sebanding dengan daya tampung sekolah .	Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan ialah lokasi penelitian serta judul penelitian yang sedikit berbeda karena membahas lebih dalam sesuai peraturan. sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi. Persamaan peneliti terdahulu dan penelitian yaitu sama-sama membahas implementasi dan membahas dua sekolah yang ingin diteliti serta menggunakan metode kualitatif.
5.	Muizzatuzzakiyah Abdullah (2021) Dengan judul Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas	Hasil temuan lapangan dan sampel motivasi belajar peserta didik berada pada kategori sedang, disebabkan beberapa indikator yaitu keinginan belajar, kebutuhan belajar, cita-cita peserta didik,	Penelitian yang ingin diteliti menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat ex-post facto dimana peneliti ingin mengetahui pengaruh sistem zonasi terhadap motivasi belajar sedangkan penulis menggunakan

	VIII Di SMP Negeri 11 Maros	penghargaan belajar, kegiatan yang menarik dan lingkungan yang kondusif. Masih ada peserta didik yang motivasi dan keinginan belajarnya tidak meningkat.	penelitian kualitatif.persamaan dari penelitian ini dan penulis yaitu sama-sama membahas kebijakan sistem zonasi yang dilaksanakan untuk pemerataan sekolah.
--	-----------------------------	--	--

Sumber:Olahan Peneliti, 2023

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut (Purwanto, 2012:12).

Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Sabilu, 2022:8).

Implementasi merupakan indikator kunci keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Proses slogan hasil akhir (outcomes), khususnya tercapai tidaknya hasil yang diinginkan, dapat digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan. Dua faktor, yaitu proses kebijakan dan apakah kebijakan diimplementasikan sesuai dengan apa yang ditentukan dengan mengacu pada tindakan kebijakan, dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan. Luasnya perubahan yang terjadi, dampak dari tujuan kebijakan pada individu dan

kelompok dalam masyarakat, serta penerimaan kelompok sasaran. Jika dalam program kebijakan yang dibuat tidak diimplementasikan dengan baik maka itu hanya akan menjadi catatan-catatan elite, oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diputuskan sebagai alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi, masyarakat maupun pemerintah (Mughni, 2021:36).

Pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengontrol organisasi, interpretasi, dan definisi dari kebijakan yang dipilih. Implementasi birokrasi yang baik juga diperlukan implementasi yang merupakan perluasan operasi yang saling beradaptasi untuk mencapai tujuan (Gordon dalam Mulyadi, 2016:24)

Pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan (Nugroho, 2003:158)

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun (Grindle,1980).

Disamping itu menurut Winarno (2007), Implementasi kebijakan adalah tindakan badan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini termasuk berusaha untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, atau melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan kecil dan besar yang ditentukan oleh keputusan pemerintah tersebut.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya semata dilaksanakan oleh lembaga administrasi yang telah ditetapkan, namun juga pelaksanaan kebijakan public juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat berupa kekuatan sosial, ekonomi dan politik serta keterlibatan berbagai pihak (Bakry dalam Juliastuti, 2013). Sama halnya dengan pelaksanaan kebijakan dapat juga di artikan sebagai sebuah aktivitas yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan dilandasi acuan norma yang disesuaikan untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati (Afandi & Warijo, 2015).

Dari pendapat beberapa para ahli diatas menurut Damayanti (2017) dalam Linda Sari suatu kebijakan berhubungan dengan proses meyakinkan masyarakat mengenai fungsi kebijakan, dalam proses meyakinkan ini maka diperlukanya pengubahaan informasi kebijakan menjadi argumentasi kebijakan. Adapun komponen dalam argumentasi kebijakan tersebut yaitu:1) Informasi yang berhubungan dengan kebijakan; 2) Klaim kebijakan. Keputusan dari argumentasi kebijakan; 3) Pembenaran. Pembenaran dapat berupa intuitif, otoritatif, sebab-akibat, analisentrik, dan prigmatik (penilaian); 4) Pendukung yaitu semua data yang dapat membenarkan informasi dapat berupa data ilmiah, usulan pakar ahli, prinsip

etis dan moral; 5) Kriteria yaitu yang dapat menyamakan sejauh mana analisis diyakini mengenai klain sebuah kebijakan

### **2.2.3 Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan yang mengatur sistem pendidikan disebut kebijakan pendidikan. Banyak kebijakan pendidikan yang dikeluarkan untuk memudahkan penyelenggara pendidikan dan masyarakat, serta memfasilitasi pengembangan pendidikan yang inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Elwijaya et., al 2021).

Menyatakan bahwa melakukan kebijakan pendidikan sangat penting karena menetapkan arah dan juga memberikan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Kebijakan pendidikan dipantau oleh Perdana Menteri dan partai-partai di wilayahnya masing-masing dan memperhatikan apa yang perlu diidentifikasi untuk kemajuan pendidikan. Dengan melakukan analisis kebijakan, kita sebagai pengelola pendidikan dapat mempelajari dan memahami dengan baik kebijakan pemerintah atau pihak terkait. Politik sebagai modal yang dimiliki oleh pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kebijakan yang dikembangkan dikembangkan dan dikelola dengan baik dan benar untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan pengalaman dan wawasan belajar kepada anak (Primasari et., al 2021).

Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan yang telah ada sejak lama sebagaimana kebijakan pada bidang lainnya merupakan proses kebijakan publik yang terdiri atas rumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, kinerja kebijakan pendidikan, dan lingkungan kebijakan (Salahudin, 2017).

## 2.2.4 Model Implementasi Kebijakan

Dalam sebuah keberhasilan menjalankan implementasi kebijakan tentunya ditentukan oleh banyak faktor dan variabel yang saling berubungan. Ada beberapa ide dari para tokoh dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang ditemukan, ada beberapa model yaitu.

1. Model Implementasi Edward III (1980:10) yang terdiri dari 4 variabel: komunikasi, sumber daya, struktur organisasi Indikator implementasi:

### 1.) Komunikasi

Transfer informasi dari satu media ke media lain disebut sebagai komunikasi. Informasi tentang kebijakan dikomunikasikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam proses yang dikenal dengan komunikasi kebijakan. Komunikasi antar organisasi terkait inisiatif implementasi dengan indikator sebagai berikut:

- a. *Transmisi* (penyampaian) program standar dan informasi serta tujuan kebijakan kepada pelaksana dan pengguna kebijakan
- b. Kejelasan penyampaian program dan informasi pelaksanaan sistem zonasi di SMP Negeri PPDB Kabupaten Karimun.

### 2.) Sumber daya

Ini berkaitan dengan aksesibilitas sumber daya tambahan, terutama sumber daya manusia. Ini berbicara tentang kemampuan mereka yang menerapkan kebijakan pendidikan untuk melakukannya dengan sukses. Sumber daya yang relevan ialah:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan sistem zonasi, misalnya administrator sistem yang menangani pendaftaran PPDB di SMP Negeri Kabupaten Karimun.
- b. Fasilitas (sarana prasarana) yang disediakan oleh SMPN Kabupaten Karimun untuk mendukung proses implementasi kebijakan sistem zonasi.

### 3.) Disposisi

Mengenai kesiapan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pihak sekolah membentuk tim koordinasi pada setiap tingkatan tugas yang ada terkait dengan pembagian tugas atau disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini. pemusnahan pelaksana, antara lain:

- a. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMP Negeri Kabupaten Karimun
- b. Sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMP Negeri Kabupaten Karimun

#### 4.) Struktur birokrasi

Meliputi struktur organisasi, distribusi kompetensi, hubungan antar unit organisasi dalam organisasi itu, dan hubungan organisasi dengan organisasi eksternal.

## 2. Model Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Varn Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam buku (Agustino 2014:141) mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variabel terkait adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan terealisasi. Ada enam Variabel yang memengaruhi kinerja implementasi yakni:

### 1) Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan

### 2) Sumber daya

Keberhasilan proses kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia Tetapi jika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan waktu karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia kompeten telah tersedia sedangkan finansial dan waktu belum tersedia dengan baik dan cukup.

### 3) Karakteristik Pelaksana

Organisasi resmi dan organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik menjadi sasaran perhatian para pelaksana. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat dan kesesuaian agen implementasi.

### 4) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*)

Sikap penerima atau penolakan pelaksana sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang mengetahui persoalan dan persoalan yang mereka ketahui. Namun kebijakan yang diterapkan oleh implementor adalah kebijakan *top-down* dimana kemungkinan besar pengambil keputusan tidak akan pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau masalah yang ingin diselesaikan oleh warga.

#### 5) Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi terkoordinasi, semakin sedikit kesalahan yang diasumsikan dan sebaliknya.

#### 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula mengkondusifkan kondisi lingkungan eksternal.

#### 3. Model kebijakan Elmore ( dalam Hill:1993,:314-345)

Mengemukakan bahwa pada hakekatnya semua kebijakan publik diimplementasikan oleh organisasi-organisasi publik yang besar, oleh karena itu pengetahuan tentang organisasi telah menjadi suatu unsur penting dari analisis kebijakan. Model-model tersebut yaitu:(Tachjan 2006:67)

- 1) Model manajemen sistem-sistem (*The system management model*)
- 2) Model proses birokrasi (*The bureaucratic process model*)
- 3) Model perkembangan organisasi (*The organizational development model*)
- 4) Model konflik dan bargaining (*The conflict and bargaining model*)

#### 4. Model Kebijakan Grindle dalam buku Pahrudin (2023:51)

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang



diperlukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikutL;

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan yang mencakup didalamnya
  - a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
  - b) Derajat perubahan yang diinginkan
  - c) Kedudukan pembuat kebijakan
  - d) Sipa pelaksana program dan
  - e) Sumber daya yang dihasilkan
- 2) Konsep implementasinya yaitu
  - a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
  - b) Karakteristik lembaga dan penguasa
  - c) Kepatuhan dan daya tanggapp

#### 5. Model Mazmanian & Sabitier (1998)

Model implementasi ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi. Fokus implementasi didefinisikan dengan memahami apa yang nyata terjadi setelah sebuah program dilakukan, yakni dapat berbentuk dengan kegiatan ataupun kejadian yang muncul setelah disahkan pedoman kebijakan negara, baik itu yang berkenaan dengan berbagai upaya dalam mengadministrasikannya, ataupun menyebabkan timbulnya akibat konkrit dalam masyarakat ataupun berbagai kejadiannya. Keefektivitasan peneraapan kebijakan dipengaruhi dengan enam keadaan, diantaranya ialah:

- 1) Terdapatnya instruksi pemerintah ataupun perundang-undangan yang bertanggung jawab mengenai kebijakan yang konsisten dan jelas
- 2) Dengan undang-undang ini memudahkan terdapatnya penggunaan teori yang sesuai dan tepat, dengan demikian ini nantinya akan mengetahui berbagai faktor utamanya yang memiliki keterkaitan hubungan dengan sebab-akibat dalam memberi pengaruh terhadap tujuan penerapan kebijakan yang nantinya kana diraih serta memberikan kewenangan serta kendali yang tepat dan strategis untuk pelaksanaan atas berbagai kelompok sasaran dalam memberi hasil yang diharapkan.
- 3) Perundang-undangan ini nantinya akan dapat menghasilkan proses implementasi yang baik serta dianggap dapat memberi hasil yang baik,

dikarenakan terdapatnya keterlibatan oleh para kelompok ataupun pelaksana sasarannya.

- 4) Pemimpin institusi pelaksana atau badan pelaksana mempunyai kapasitas kecakapan politis serta manajerial, rasa pengabdian serta pertanggungjawaban terhadap suatu usaha untuk mencapai sasaran yang direncanakan dengan berlandaskan pada aturan yang ada dan yang berlaku.
- 5) Kebijakan ini nantinya akan mendapatkan dukungan oleh pihak eksekutif dan legislatif, sementara itu untuk pihak yudikatif sifatnya netral
- 6) Tingkat prioritas sasaran ini akan dapat diraih berdasarkan kebijakan yang tidak mengalami perubahan walaupun adanya kebijakan publik yang berlawanan dengan perubahan keadaan ekonomi dan sosial yang meminimalkan kekuatan teori keterkaitan sebab-akibat yang dapat mendukung kekuatan dukungan politis peraturannya.

### 2.2.5 Sistem Zonasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang berhubungan secara teratur membentuk suatu kesatuan (Sugono, 2008:1362). Zonasi dalam kamus bahasa Indonesia yang terpenting adalah zonasi dari kata zona yang berarti daerah dengan batasan khusus atau daerah (Sugiono, 2008:1633)

Kebijakan Sistem Zonasi Umumnya diterapkan di negara maju baik negara Eropa maupun Amerika Serikat, dan beberapa negara maju lain. Mereka telah puluhan tahun mengimplementasikan sistem zonasi dengan tujuan ideal memutus rantai kemiskinan. Beberapa studi tentang sistem zonasi di luar negeri antara lain: Studi Macarthur Foundation yang menyatakan bahwa sistem zonasi sekolah atau pendidikan inklusif dapat mengurangi segregasi baik dari sisi identitas prestasi maupun latar belakang sosial ekonomi. Meskipun demikian ada prasyarat yang harus dikembangkan seiring kebijakan zonasi, yaitu penyebaran kualitas pendidikan di semua sekolah. (Fawaid et al 2023).

Sistem zonasi yang berkembang di negara-negara lain tidak berjalan sendirian. Bersamaan dengan perubahan yang radikal atas sistem penerimaan siswa, negara-negara itu juga mengakselerasi peningkatan kapasitas guru dan pemenuhan fasilitas di institusi pendidikan (Cheng, 2020; Coughlan, 2018).

Sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018 (Khadowmi, 2019 : 36).

Sistem zonasi merupakan upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antara sekolah maju yang disukai dan sekolah terbaik. Dalam sistem ini tidak semua siswa terbagi antara kaya dan miskin, berhasil atau tidak. Semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Setiap orang dapat belajar, menggali bakat, keterampilan, dan kemampuannya untuk menjadikan masa depan pendidikan lebih cerah. Ketika ada pemerataan pendidikan, semua sekolah menjadi disukai (Setiyanti, 2019:164).

#### **2.2.6 Peserta Didik**

Peserta didik menurut UUD No.20 Tahun 2003 “merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan dirinya melalui proses kegiatan pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu “Menurut Danim (2010:1) peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam pendidikan formal. Sedangkan menurut Hamalik

Oemar (2010:205) peserta didik adalah suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang kemudian selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional “Untuk menjadi peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan maka harus adanya penerimaan siswa baru yang dimana pertama proses pencarian, kemudian merekrut untuk menentukan calon siswa baru dan menarik pelamar tersebut.

Penerimaan peserta didik adalah suatu proses pencarian atau penarikan calon peserta didik yang mempunyai potensi dan kualitas untuk dijadikan input sekolah melalui proses seleksi yang sudah dirancang oleh sekolah (Sheila et al 2020). Prosedur PPDB meliputi: 1. perencanaan, 2. pengorganisasian, 3. pelaksanaan. Sama halnya penerimaan siswa baru adalah proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan siswa baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru (Rohiat, 2012:208).

Penyelenggaraan sekolah reguler di mana calon siswa yang memenuhi persyaratan tertentu diterima mengikuti pelatihan di satuan pengajaran dan mengikuti pendidikan lebih tinggi (Palilingan, 2014:2). Penerimaan peserta didik Baru adalah penerimaan siswa baru melalui jalur pendaftaran dan persyaratan yang ditetapkan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan hak-hak keperdataan kepada masyarakat (Patta, 2016).

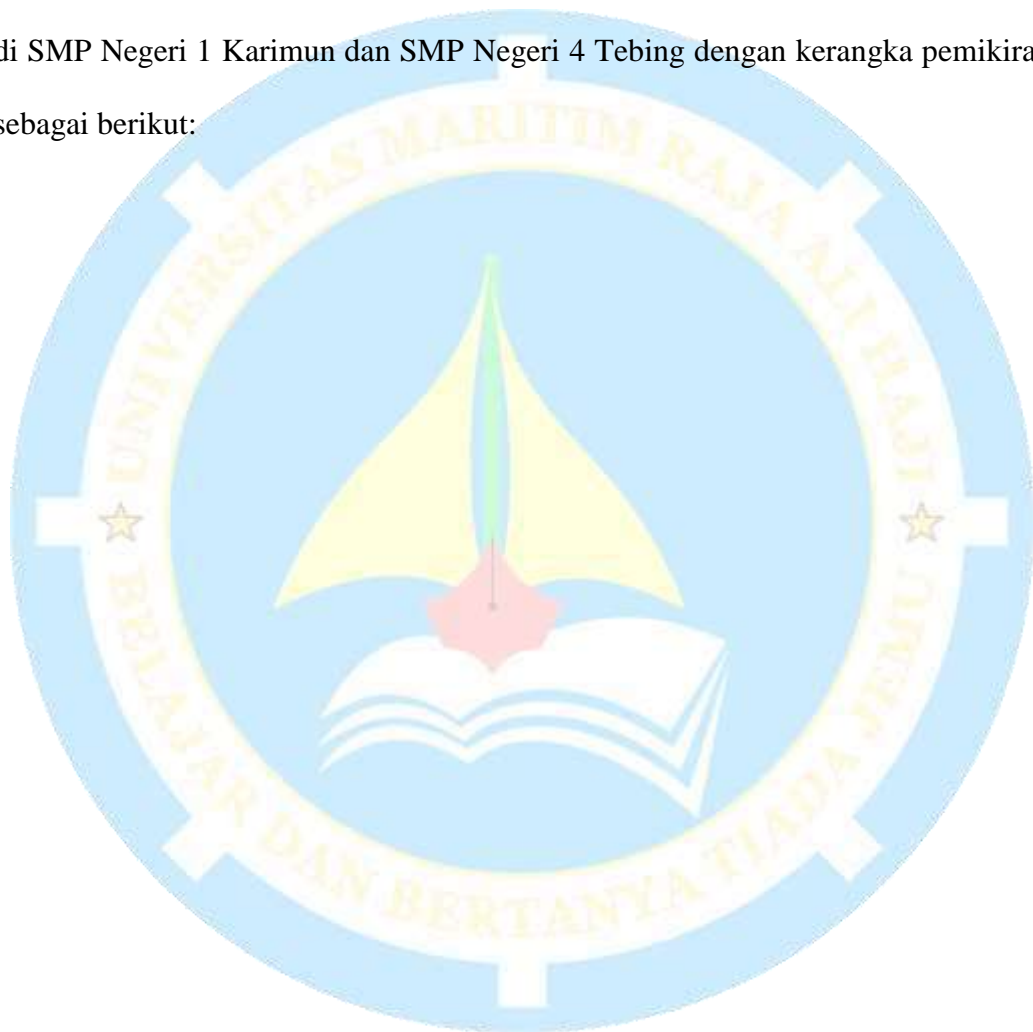
Dari beberapa pendapat diatas Alfian (2019:118-134) mengemukakan bahwa keadilan sosial telah menjadi tema yang direvitalisasi dalam banyak penelitian tentang pendidikan karena kepedulian terhadap berbagai masalah telah muncul di lapangan. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi cultural lag dalam penerimaan peserta didik baru, calon peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan yang ada jadi bisa disimpulkan bahwa harus adanya keadilan sosial dalam penerimaan peserta didik baru terhadap peserta didik.

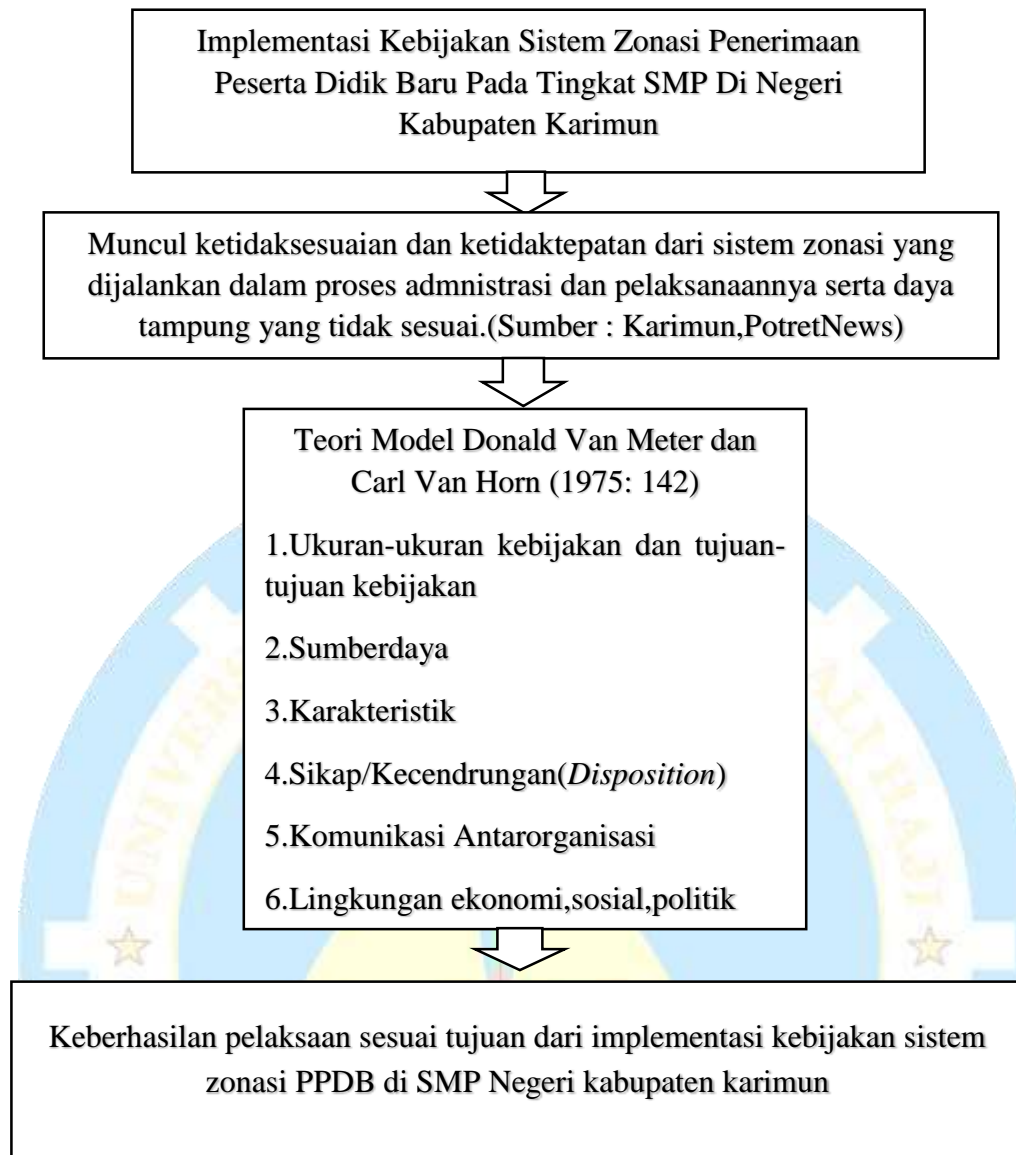
### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur pemikiran yang diambil dari suatu teori yang telah dibuat yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang dibahas didalam rumusan masalah penelitian tersebut. Kerangka berfikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Masyhuri, 2008:113).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan pendidikan dengan menerima siswa baru yang telah ditentukan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru atau yang disebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi yang memperhatikan penerimaan murid baru. Jarak tempat tinggal siswa dari sekolah Pertimbangkan pelajaran atau sekolah. Tujuannya adalah pemerataan akses layanan pendidikan bagi semua siswa, mendekatkan lingkungan sekolah siswa dengan lingkungan siswa, dan

menghilangkan segala bentuk diskriminasi dari sekolah, khususnya sekolah negeri. Sistem zona ini mencakup beberapa calon siswa baru, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, administrator, orang tua dan masyarakat. Didalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi yang diterapkan dan dilaksanakan di kabupaten karimun khususnya di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 Tebing dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:





**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Definisi Konsep

Dari kosep teori diatas, dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun. Penulis menggunakan Teori yang berhubungan dengan Implementasi suatu program kebijakan melalui 6 variabel yang menjadi fokus dalam mengatasi permasalahan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun yaitu:

### 1) Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan Penerimaan sistem zonasi dalam implementasi kebijakannya harus dapat diukur tujuannya dan tingkat keberhasilannya tetapi hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan serta harus danaay standar keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut agar bisa melihat apakah kebijakan tersbeut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### 2) Sumberdaya

Keberhasilan proses kebijakan penerimaan sistem zonasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya manusia dan non manusia yang tersedia seperti Dinas pendidikan, Guru, dan masyarakat tetapi jika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya non manusia seperti finansial dan sumber daya waktu yang digunakan untuk memperlancar keberhasilan penerimaan sistem zonasi di kabupaten karimun.

### 3) Karakteristik pelaksana

Sudah sampai dimana dukungan terhadap kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Masyarakat di kabupaten karimun. Karakteristik masyarakat dan peserta didik baru yang seperti apa yang mempercepat atau memperlambat kebijakan sistem zonasi di kabupaten karimun .



#### 4) Sikap/kecendrungan(*Disposition*)

Disposisi para pegawai Dinas Pendidikan meliputi, reaksi para pegawai terkait sistem zonasi, kedua sudah sampai sejauh mana pengetahuan terkait sistem zonasi, Sikap penerima atau penolakan dari masyarakat dan implementor serta pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan sistem zonasi.

#### 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Dalam melaksanakan kebijakan penerimaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sangat penting untuk dikoordinasikan dengan para instansi lain seperti pemerintah ke pihak sekolah dan kelurahan agar dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi benar-benar tertib sehingga terwujudnya keberhasilan dari pelaksanaan sistem zonasi yang diterapkan.

#### 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di kabupaten karimun yang dimana mencangkup sumber daya ekonomi di lingkungan Kabupaten Karimun

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu. penelitian lapangan langsung digunakan dalam pendekatan ini. Mirip dengan Bog dan Taylor, ia mendefinisikan metodologi kualitatif ini sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang dan perilaku yang dapat diamati sendiri. Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pedekatan dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrumen pengumpulan data dan sesuai fakta.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:9)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan penggalian data berdasarkan apa yang diungkapkan responden tentang data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dari wawancara, dokumen pribadi, gambar dan catatan lapangan. Penggunaan metode kualitatif

dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek secara deskriptif menurut kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan menggunakan metode alam.

### **3.2 Objek dan Lokasi penelitian**

Adapun objek penelitian yang akan diteliti ialah implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat SMPN di kabupaten karimun Alasan peneliti meneliti objek penelitian ini karena menurut peneliti pelaksanaan sistem zonasi dikabupaten karimun ini masih perlu dilihat sejauh mana telah dijalankan mengingat keadaan wilayah kabupaten karimun yang memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil dan bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Lokasi penelitian merupakan cara peneliti untuk dapat memperoleh data maupun informasi yang diperlukan, yaitu di Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun khususnya di SMP Negeri 1 karimun dan SMP Negeri 4 tebing. Adapaun objek penelitian ini ditekankan pada masyarakat yaitu peserta didik baru, orang tua, guru, disamping itu juga melibatkan pemerintah, sekolah Rt,Rw serta kepala Desa setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail yang akan sangat membantu penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kepada pembahasan terkait implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat SMPN

di Kabupaten Karimun. Adapun yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan enam implementasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kebijakan sistem zonasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Varn Horn (1975) yaitu: yang pertama Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Kedua, sumber daya. Ketiga, karakteristik. Keempat, sikap kecendrungan (*Disposition*). Kelima, komunikasi antarorganisasi. Keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Apabila variabel tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar maka implementasi kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan sesuai tujuan.

### 3.4 Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis data untuk penelitian ini ialah sebagaimana dibawah ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber informasinya dilapangan yang berhubungan dengan data awal yang membahas implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di kabupaten karimun. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana peneliti adalah instrumen penelitian yang dilakukan.

Maka informasi utama dari penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mencari dan mengumpulkan informasi tentang apa yang diinginkan dan berkaitan langsung dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini diperoleh informasi dasar dari

pejabat pemerintah, kepala desa sekitar termasuk mahasiswa baru, masyarakat Rt, Rw dan Kondisi Tanjung Balai Karimun yang terlihat sebagai informasi lain berdasarkan dokumen yang memenuhi syarat.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi atau data yang tersedia dari sumber lain untuk mendukung data primer yang diperoleh di lapangan, dan data sekunder juga dianggap terkait dengan topik penelitian. Informasi dasar ini bersumber dari dokumen-dokumen yang ada, baik berupa dokumen asli maupun bahan pendukung lainnya. Sekalipun informasi tersebut berasal dari orang lain atau dokumen lain, informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sumber informasi pertama. Data dasar untuk penelitian ini dapat diperoleh atau didokumentasikan dari desa, sekolah dan masyarakat, antara lain:

- a. Historis dan Geografis
- b. Keadaan Lingkungan
- c. Keadaan penduduk dan Mata Pencarian
- d. Kepala Desa / Dinas pendidikan

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan jenis data ini dalam sebuah penelitian ilmiah ini dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Namun dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono:2017 yaitu:

- a. Observasi

Hasil penelitian ini merupakan alat untuk mendapatkan informasi terpenting dari data lapangan. Peneliti menggunakan bentuk observasi

partisipan pasif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non-partisipan, dan posisi peneliti hanya sebagai pengamat, serta catatan yang diambil selama proses observasi untuk analisis data dan pengecekan ulang serta alat pengumpulan data pengecekan data kembali dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan observasi ini adalah daftar ceklis.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara terbuka, dimana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan juga mengetahui tujuan dan maksud dari wawancara tersebut.

Dalam mengidentifikasi informan digunakan metode purposive sampling dalam penelitian ini, metode yang mengambil aspek tertentu dari sumber data. Aspek-aspek khusus ini, misalnya seseorang yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin menguasai untuk memudahkan peneliti mempelajari objek/situasi sosial yang diteliti. Semua informan tersebut dipilih karena kemampuannya dalam menjawab dan merespon pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk tanya jawab secara langsung mengenai implementasi kebijakan sistem

zonasi di kabupaten karimun. Peneliti juga menggunakan perekam suara (*Voice Recorder*) agar dapat memperkuat dan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi sudah lama. Disimpulkan bahwa definisi dokumentasi yaitu mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber seperti dokumen dan lain-lain yang tentunya berkaitan dengan yang ingin diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang.

### 3.6 Informan

Informan merupakan orang yang di wawancarai untuk dimanfaatkan sebagai informasi yang dibutuhkan secara fakta dari suatu objek penelitian, informan juga merupakan orang yang mengetahui situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3. 1 Daftar Jumlah Informan**

No	Informan	Daftar Informan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pendidikan	Pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan secara langsung dalam kebijakan sistem zonasi di kabupaten karimun	<i>Key informan</i>
2.	Staf Dinas Pendidikan SMP		
3.	Kepala Sekolah		
4.	Panitia PPDB		
5.	Peserta Didik Baru	Pihak-pihak yang menjalankan sistem zonasi yang diterapkan	<i>Secondary informan</i>
6.	Masyarakat		

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2023

### 3.7 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis dan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang memiliki atau memiliki sifat menyajikan informasi secara wajar dan apa adanya. Terbagi menjadi tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh serta disusun sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Proses ini bermaksud menarik simpulan berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian peneliti mengambil simpulan



yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung menolak kesimpulan.

Triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data yang mensitesa data dari berbagai sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan meungkin memeplihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal. Triangulasi bisa menjawab pertanyaan terhadap kelompok resiko, efektivitas, kebijakan dan perencanaan anggaran, dan status epidemik dalam sutau lingkungan berubah.

### **3.8 Jadwal Penelitian**

Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis sesuai dengan tabel rencana penelitian sebagai berikut.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Kabupaten Karimun**

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah kabupaten karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah kabupaten karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan akhirnya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (Sembilan) kecamatan dan jumlah keseluruhan sebanyak 22 kelurahan dan 32 desa, 327 RW dan 945 RT.

Berdasarkan luas wilayahnya, kabupaten karimun merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi. Sebagai daerah kepulauan kabupaten karimun memiliki 245 pulau dimana 3 diantaranya merupakan pulau-pulau besar, yakni pulau karimun, pulau kundur, pulau sugi. Terdapat 245 pulau di wilayah kabupaten karimun terdiri dari 73 pulau berpenghuni, 172 pulau tidak berpenghuni, 200 pulau bernama dan 45 pulau tidak bernama.

Kabupaten karimun merupakan wilayah yang relative datar dan landai dengan ketinggian 2-500 meter diatas permukaan laut. Sebagian wilayah kabupaten karimun merupakan pegunungan perbukitan dengan kemiringan 40 dan ketinggian

20-500 m diatas permukaan laut yang terdapat diutara pulau karimu. Pentingnya pengendalian dan jumlah penduduk, jelas memiliki implasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi. Penting bagi sebuah wilayah untuk memperhatikan kualitas dan peningkatan sumber daya dan ekonomi dari daerah, dimana seperti yang diketahui di beberapa wilayah kabupaten karimun memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan ada juga beberapa wilayah yang tidak padat penduduk seperti yang kita ketahui dari bidang pendidikan merupakan salah satu cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan ekonomi yang ada di kabupaten karimun saat ini pendidikan di kabupaten karimun sudah bisa dikatakan baik karena kabupaten karimun mengikuti setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

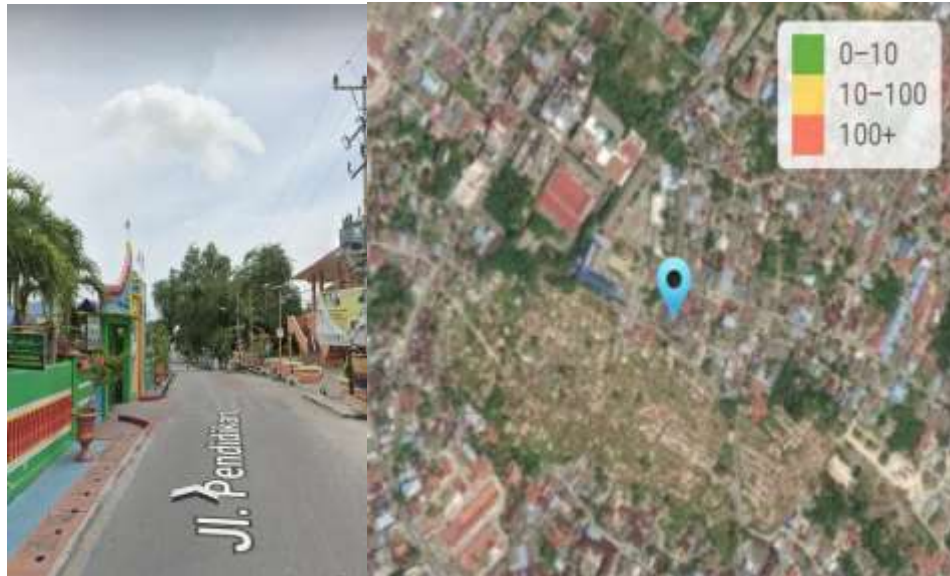
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu mengenai penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan di kabupaten karimun memiliki beberapa tempat yang padat akan penduduk, oleh karena itulah pemerintah daerah menerapkan sistem zonasi ini agar tercapainya tujuan yang diinginkan walaupun tidak semua sekolah menerapkan PPDB sistem zonasi ini karena masih adanya beberapa kendala yang dialami oleh daerah dan sekolah tersebut, PPDB sistem zonasi ini diterapkan di kabupaten karimun pada tahun 2019 pada saat itu masih banyaknya permasalahan yang terjadi akan tetapi kebijakan tersebut masih dilakukan sampai saat ini dengan segala evaluasi dan pembaharuan dari pemerintah.

#### **4.1.2 Gambaran Umum SMP Negeri 1 Karimun Dan SMP Negeri SATAP 4 Tebing**

##### **1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Karimun**

SMP Negeri 1 Karimu ini merupakan salah satu sekolah yang cukup terkenal dan banyak memiliki peminat di sekolah tanjung balai karimun bahkan juga ada siswa luar dari tanjung balai karimun yang berminat untuk masuk ke SMP Negeri 1 Karimun, awal mula SMP ini bernama PGSMP. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 agustus 1957, awal mula berdirinya sekolah ini yaitu dari seorang Dr Hibah orang tiongwa karena tanah sekolah ini berasal dari beliau. Kepala sekolah pertama bernama Bapak Mohammad Yunus Sarona, kedua Bapak Abdullah Jamal, ketiga Bapak Darman, DJS, Keempat Bapak Idrus Abdullah, Kelima Bapak Sudarmadi, Keenam Bapak Ruslan, Ketujuh Ibu Rahayu Kusrianti, Kedelapan Bapak Sugianto, Kesembilan Bapak Juprizal, Kesepuluh Ibu Salawati yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Karimun dan beliau merupakan orang kedua yang menjadi kepala sekolah pere.

SMP Negeri 1 Karimun merupakan salah satu SMP yang terletak di tepi jalan dan berdekatan dengan SD, SMP 2 Karimun dan SMK yaspika Jl. Pendidikan No. 100, Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun Kab. Karimun. SMP 1 Karimun ini selalu dijuluki SMP yang menjadi panutan di Tanjung Balai Karimun.



Sumber : Profil SMP Negeri 1 Karimun

**Gambar 4 1 Peta SMP Negeri 1 Karimun**

**a. Profil SMP Negeri 1 Karimun**

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Karimun

Kepala Sekolah : Salawati

NPSN : 11000206

Kurikulum : 2013

Akreditasi : A

Alamat : Jl. Pendidikan No. 100, Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Nomor Telefon : 0777-21234

Kode Pos : 29611

E-mail : [smpn1\\_karimun@yahoo.com](mailto:smpn1_karimun@yahoo.com).

Website : -

**b. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 1 Karimun**

Agar tercapainya masa depan yang diinginkan SMP 1 Karimun merumuskan sebuah visi yaitu “ Siap berkompetensi menuju sumber daya yang beriman, bertaqwa, berkualitas dalam ilmu pengetahuan, terampil, dan

mandiri serta menjunjung tinggi nilai budaya daerah yang berwawasan lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dibutuhkan misi untuk mewujudkan semua yang akan dicapai antara lain :

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai tahap perkembangan remaja, yaitu taushiah setiap jumat pagi.
2. Menunjukkan sikap percaya diri dalam berfikir dan bertindak.
3. Memperoleh dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan berbagai sumber secara logis dan kreatif.
4. Mewujudkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan inovatif.
5. Mwujudkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensu yang dimiliki
6. Menunjukkan kemampuan berkreasi dalam karya seni suara dan tari melalui ekstra kulikuler setiap hari sabtu sehingga dapat melestarikan, menghargai budaya daerah dan nasional.
7. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis sastra pendek sederhana dengan memanfaatkan waktu luang.
8. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Melestarikan alam sekitar sebagai salah satu sumber pembelajaran.
10. Melaksanakan kegiatan gotong royong dan penghijauan setiap hari sabtu.

Sedangkan tujuan dari SMP Negeri 1 Karimun berdasarkan profil SMP 1 Karimun 2021/2022 yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi siswa dalam berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, seni budaya, dan keagamaan.
2. Meningkatkan mutu lulusan.
3. Menciptakan suasana belajar berstandarnasional.
4. Meningkatkan prestasi dalam bidang IPA, matematika, olahraga, kreasi seni, dan imtaq.
5. Meningkatkan usaha kesehatan sekolah
6. Melaksanakan kegiatan wiyatamandala berbasis lingkungan
7. Mengoptimalkan penggunaan praktik labor, IPA, bahasa, dan computer.
8. Menciptakan suasana perpustakaan sebagai tempat yang nyaman.
9. Berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh BSNP.
10. Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler.

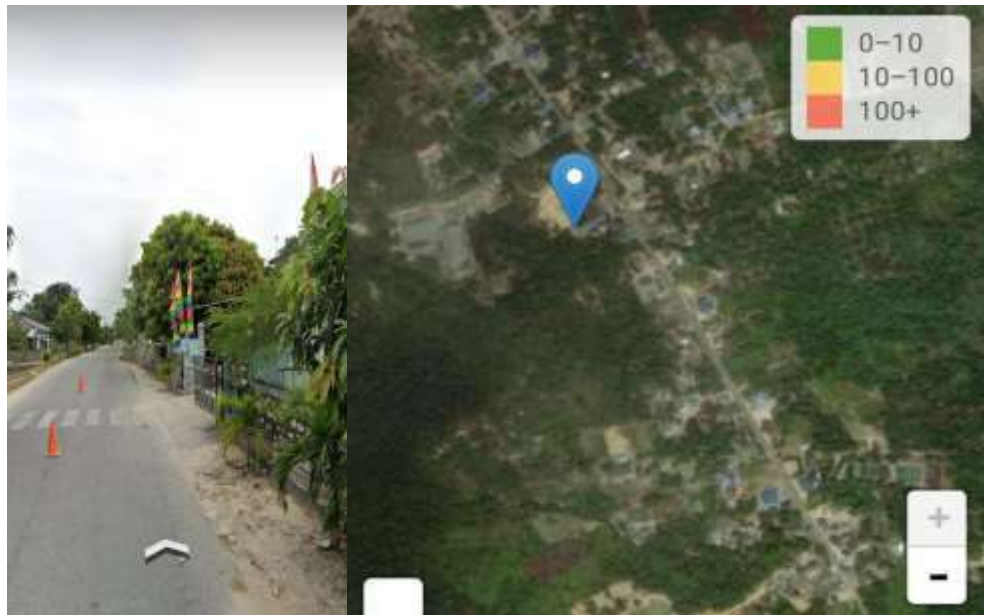
## **2. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 4 SATAP Tebing**

SD-SMP Negeri 4 satu atap tebing adalah satu-satunya sekolah tingkat menengah yang berada di Desa pongkar. Awalnya anak-anak desa pongkar

untu meneruskan jenjang pendidikan menengah pertama harus jauh menempuh perjalanan hingga keluar desanya. Dengan pertimbangan hal tersebut guru, tokoh dan masyarakat dari desa pongkar sangat antusias mengupayakan adanya smp disini dan pada tanggal 17 juli 2007 resmilah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing sebagai sarana untuk memberikan pendidikan tingkat pertama.

Lokasi sekolah ini sangat strategis yaitu tepat ditengah Desa Pongkar lokasi SD-SMP Negeri 4 SATAP berada di Brigjen Katamso RT 001 RW 002 Dusun 1 desa pongkar kecamatan tebing kabupaten karimun sekolah ini datu kawasan dengan SD Negeri 006 Tebing maka dari itu disebut dengan sekolah satu atap. Pada tahun 2007 SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing ini berdiri masih dipimpin oleh kepala sekolah SD Negeri 006 tebing yaitu Pak Junaidi, M.Pd. Pendidikan SD-SMP Negeri 4SATAP Tebing masih dibantu dengan guru SD 006 dan guru bantu dari sekolah lain. Pada tahun 2019 merupakan pertama kali sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah dari jenjang SMP. Kepala sekolah tersebut bernama Dra.Hj Darmi Aryana hingga tahun 2021. Setelah itu digantikan dengan ibu Suharmi, S.Pd.Fis selama beberapa bulan dan dianti lagi dengan ibu Sitti Murni, S,Pd.Ing hingga sekarang.





Sumber: Profil SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing

**Gambar 4 2 Peta SMP Negeri 4 SATAP Tebing**

**a. Profil SMP Negeri SATAP 4 Tebing**

Nama Sekolah : SMP Neeri 4 SATAP Tebin

Kepala Sekolah : Sitti Murni

NPSN : 11002480

Akreditasi : B

Alamat : Brigjen Katamso, Desa pongkar, Kec.Tebing,  
Kab.Karimun,Prov.Kepulauan Riau.

Nomor Telefon :

Kode Pos: 29665

E-mail : smpnsatap\_tebing@yahoo.co.id.

Website : -

**b. Visi, Misi SMP Negeri SATAP 4 Tebing**

Agar tercapainya masa depan yang diinginkan SMP Satu atap 4 Tebing merumuskan Visi yaitu “Terwujudnya Insan Yang Beriman dan Bertaqwa,

Disiplin, Bersih, Berprestasi.” Berdasarkan visi tersebut maka dibutuhkan misi untuk mewujudkan semua yang akan dicapai antara lain :

1. Menanamkan nilai-nilai agama dan berahlak mulia kepada seluruh warga sekolah
2. Menjadikan warga sekolah yang mempunyai disiplin yang tinggi
3. Menjadikan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, sehat dan hijau
4. Meningkatkan prestasi dalam semua mata pelajaran dengan pendekatan “PAKEM”

#### **4.1.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri SATAP 4 Tebing**

Struktur organisasi merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menggambarkan suatu tingkatan jabatan yang akan mempermudah dalam setiap pembagian tugas dan peran didalam suatu organisasi dengan adanya struktur kita bisa melihat dan mengetahui apa saja jabatan yang ada sebagai salah satu proses kemudahan dalam sebuah organisasi. Disetiap struktur yang dijabarkan dan ditampilkan sudah tertera apa jabatan yang diduduki oleh seseorang dalam struktur tersebut. Adapun struktur organisasi SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri SATAP 4 Tebing yaitu:

**Gambar 4 3 Struktur Organisasi SMP 1 Karimun**



Sumber: Profil SMP Negeri 1 Karimun

**Gambar 4 4 Struktur Organisasi SMP 4 SATAP Tebing**



Sumber : Profil SMP 4 SATAP Tebing

#### 4.1.4 Keadaan Siswa

Jumlah siswa SMP Negeri 1 Karimun dan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing setiap tahun mengalami peningkatan. Peserta didik bisa dikatakan 90% berasal dari lingkungan sekitar sekolah yang merupakan penduduk setempat.

Peneliti akan menjabarkan secara keseluruhan data yang peneliti dapatkan dalam wawancara dan observasi lapangan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Jumlah Daya Tampung Siswa SMP 1 Karimun**

Tahun Pelajaran	Daya Tampung	Jumlah yang Diterima	Jumlah Pendaftar
2019/2020	256	259	278
2020/2021	256	270	312
2021/2022	256	275	316

Sumber:Olahan Peneliti 2023

**Tabel 4. 2 Jumlah Daya Tampung Siswa SMP 4 SATAP Tebing**

Tahun Pelajaran	Daya Tampung	Jumlah yang Diterima	Jumlah Pendaftar
2019/2020	60	32	32
2020/2021	64	40	40
2021/2022	64	50	50

Sumber: Olahan Peneliti 2023

**Tabel 4. 3 Jumlah Keseluruhan Di SMP 1 Karimun**

Status	Jumlah
Guru	47
Rombel belajar	8
Siswa Laki-laki	385
Siswa Perempuan	410

Sumber: Profil SMP 1 Karimun

**Tabel 4. 4 Jumlah Keseluruhan Di SMP 4 SATAP Tebing**

Status	Jumlah
Guru	10
Rombel belajar	6
Siswa Laki-laki	84
Siswa Perempuan	70

Sumber: Profil SMP 4 SATAP

#### **4.1.5 Pedoman Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021**

##### **a. Ketentuan Umum Penerimaan Peserta Didik Baru**

###### **1. Taman kanak-kanak atau TK**

- a) berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A dan
- b) Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B

###### **2. Sekolah Dasar (SD)**

- a) kelas 1 SD berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- b) Sekolah memeprioritaskan penerimaan calon peserta didik yang berusia 7 tahun.
- c) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang diperutukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional\ Dewan guru sekolah.

###### **3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

- a) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan dan
- b) Memiliki ijazah sd/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD

###### **4. SMA/SMK**

- a) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan dan
- b) Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan sudah menyelesaikan kelas 9 SMP
- c) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10(sepuluh).

##### **b. Ketentuan Khusus Penerimaan Peserta Didik Baru**

1. Syarat usia calon peserta didik TK sd SMA/SMK dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T.
3. Calon peserta didik baru WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.
4. Sekolah yang menerima peserta didik WNA wajib menyelenggarakan mertikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
5. Jika sekolah yang menerima peserta didik WNA tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
6. Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.

★ c. Proporsi Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ★

1. SD

Jalur zonasi : minimal 70%

Jalur Afirmasi : minimal 15%

Jalur perpindahan tugas orang tua : maksimal 5%

Jalur prestasi: sisa kuota pendaftaran

2. SMP dan SMA

Jalur zonasi : minimal 50%

Jalur Afirmasi : minimal 15%

Jalur perpindahan orang tua : maksimal 5%

Jalur prestasi : sisa kuota

SMK: dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB

3. Jalur PPDB dikecualikan bagi

a) SMK

b) Satuan pendidikan kerja sama

- c) Sekolah indonesia diluar negeri
- d) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
- e) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- f) Sekolah berasrama
- g) Sekolah didaerah 3T dan
- h) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar.

4. Pelibatan sekolah swasta dalam PPDB Pasal 16

- a) Pemerintah daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB
- b) Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

d. Ketentuan dari setiap jalur yang ditetapkan :

1. Jalur Zonasi

- a) Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
- b) Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu tersebut meliputi : bencana alam atau bencana social.

c) Penetapan Zonasi

- Pelibatan MKKS

1. Ditetapkan setai jenjang oleh pemda
2. Pemda harus memperhatikan: sebaran satuan pendidikan, data sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah
3. Melibatkan KKKS/MKKS

- Penetapan Wilayah

1. Wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang.

2. Wajib memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- Kerja Sama PEMDA

1. Dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar pemda bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan prov/kab/kota.

- Pengumuman

1. Wajib diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB

2. Wajib dilaporkan ke menteri melalui UPT kementerian di daerah paling lama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan.

## 2. Jalur Afirmasi

a) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

b) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

c) Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemda setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah

d) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemda dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

## 3. Jalur Perpindahan Orang tua/wali

a) Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

b) Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan orang tua/ wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

c) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

## 4. Jalur Prestasi



- a) Ditentukan berdasarkan;
  - 1. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal atau
  - 2. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik
- b) Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 semester terakhir.
- c) Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian akan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan. Dalam kajian Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian.

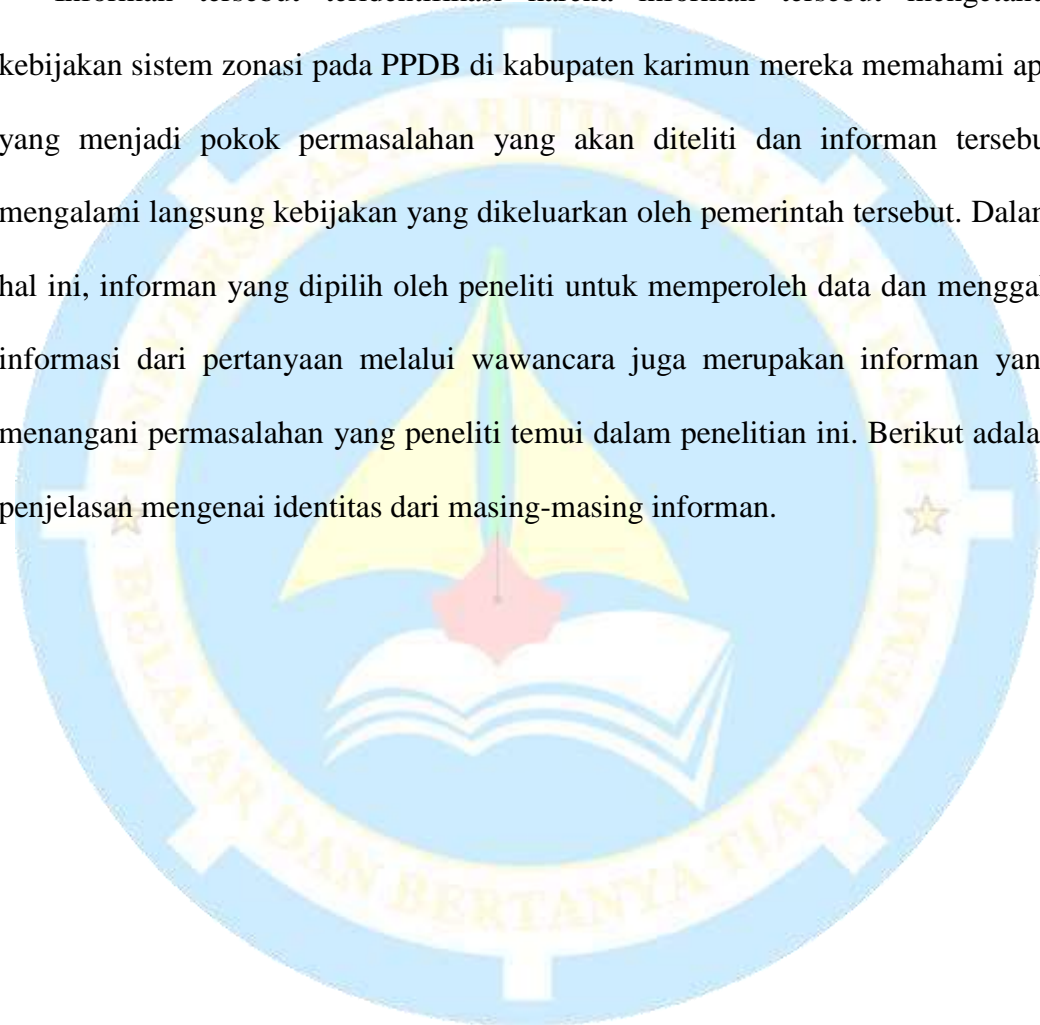
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Namun berdasarkan temuan peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyangkut Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah

### **4.2.1 Identifikasi Informan**

Dalam kaitanya dengan judul yang diambil yaitu: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri

Di Kabupaten Karimun. Peneliti menggali data dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2014) maka dilakukan wawancara pada beberapa informan peneliti yaitu.

Informan tersebut teridentifikasi karena informan tersebut mengetahui kebijakan sistem zonasi pada PPDB di kabupaten karimun mereka memahami apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan informan tersebut mengalami langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini, informan yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data dan menggali informasi dari pertanyaan melalui wawancara juga merupakan informan yang menangani permasalahan yang peneliti temui dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai identitas dari masing-masing informan.



**Tabel 4. 5 Daftar Identifikasi Informan**

No	Nama	JK	Jabatan
1.	H. Sugianto, S.S.,M.M	L	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun
2.	Hendri, S.Pd, MMPd	L	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3.	Salawati, S.Pd., M.M	P	Kepala Sekolah SMPN 1 Karimun
4.	Sitti Murni	P	Kepala Sekolah SMPN 4 SATAP Tebing
5.	Noni Noviyanti	P	Guru panitia pelaksanaan
6.	Afridayani	P	Guru Panitia Pelaksanaan
7.	Syadza Ghaitsa Amri	P	Siswa
8.	Winroland Gempita Alam	L	Siswa
9.	Rahayu Permatasari	P	Siswa
10.	Putri	P	Siswa
11.	Safira	P	Siswa
12.	Mareka Sary	P	Masyarakat/Orang tua
13.	Susi	P	Masyarakat/Orang tua

Sumber: Olahan penelitian

#### **4.2.2 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai bagaimana Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun. Penerimaan peserta didik baru merupakan tahap awal bagi calon peserta didik baru untuk mendaftar ke sekolah yang ingin dituju melalui berbagai persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah

dan pihak yang berwenang. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu proses kebijakan baru yang dikeluarkan bidang pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Telah dikeluarkannya pertama kali kebijakan sistem zonasi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana pada saat kebijakan ini dikeluarkan pertama kali masih banyak sekolah yang belum menjalankan kebijakan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan.

Terbitnya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikarenakan kebijakan pertama yang dikelurkan. Kebijakan ini dikeluarkan guna untuk menyempurnakan kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya selama beberapa tahun yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Ketika Proses penerimaan peserta didik baru di jalankan setiap sekolah menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi tersebut melewati proses penyeleksian berdasarkan radius jarak rumah calon peserta didik baru dengan sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan ketersediaan batas usia dan daya tampung dalam rombongan belajar.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan tugas bagi setiap pemerintah daerah untuk mengawasi, melaksanakan serta menjadi penanggung jawab pelaksanaan sistem zonasi dari setiap masing-masing daerah. Di setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing, di kabupaten karimun sendiri mengeluarkan peraturan khusus untuk kabupaten karimun dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, didalam peraturan bupati karimun tersebut sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun. Harapan diterapkannya sistem zonasi ini yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan perbedaan terhadap sekolah favorite dan reguler sehingga akan terjadi pemerataan kualitas di setiap sekolah dan masyarakat juga dapat memperoleh hak dan pelayanan yang sama di setiap sekolah tanpa adanya perbedaan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil dua sekolah yang ada di kabupaten karimun dimana kedua sekolah ini sudah menjalankan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Alasan peneliti mengambil dua sekolah yaitu peneliti ingin melihat bagaimana proses dari kebijakan itu berlangsung terhadap dua sekolah yang memiliki background yang berbeda, SMP Negeri 1 Karimun terkenal dengan background sekolah terfavorite dan kualitas pendidikan yang sangat baik sedangkan SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing yang terkenal dengan sekolah yang berada dipelosok.

Pada penelitian ini model implementasi yang digunakan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah terhadap sistem zonasi pada penerimaan

peserta didik Baru (PPDB) di kabupaten karimun adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2014:141), terdapat enam variabel yang berhubungan dengan proses implementasi suatu kebijakan yaitu ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, sikap/kecendrungan (*Disposition*), komunikasi antar organisasi, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

### **1. Ukuran-ukuran dan Tujuan –tujuan Kebijakan**

Pada variabel pertama ini berkaitan dengan standar dan tujuan yang dapat digunakan untuk melihat berhasil atau gagal suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Standar dan tujuan kebijakan dalam proses PPDB sistem zonasi ini dapat kita lihat melalui peraturan tentang sistem zonasi, tujuan zonasi dan pelaksanaannya yang telah diterbitkan melalui peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit SD 70%, SMP dan SMA/SMK 50% dari daya tampung sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaan tingkat SMP di Kabupaten Karimun diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dalam peraturan bupati karimun sudah tercantum segala persyaratan dan ketentuan dalam pelaksanaan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di kabupaten karimun. Dalam peraturan tersebut mengatur kuota

penerimaan peserta didik baru jalur zonasi sebanyak 75% jalur afarmasi 10%, jalur perpindahan orang tua 5%.

Menteri dinas pendidikan dan kebudayaan pada dasarnya harus memiliki standar kebijakan dalam pelaksanaan sistem zonasi ini secara jelas dan terukur, sehingga apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan bisa sesuai dengan hasil yang diinginkan. Maka peneliti melakukan wawancara bersama Bapak H. Sugianto, S.S.,M.M selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karimun. Berikut penjelasan dari Bapak Sugianto:

*“Standar atau ukuran keberhasilan dari PPDB sistem zonasi ini yaitu terpenuhinya kuota atau daya tampung yang disediakan. Menurut saya sejauh ini tujuan dari sistem zonasi sudah terwujud karena terbukti dengan tidak adanya lagi pelebelan dalam sebuah sekolah. Seperti yang diketahui bahwasannya sebenarnya tidak ada kendala serius dari sistem zonasi yang diberlakukan saat ini hanya saja ada beberapa kendala dari pihak orang tua murid baru seperti orang tua lebih panik terhadap sistem zonasi yang diberlakukan karena masalah penggunaan pendaftaran online dan penggunaan IT yang tidak dipahami oleh orang tua tetapi dari kami juga sudah melakukan sosialisasi dan peringatan terhadap setiap pihak sekolah untuk bantu mengatasi dan melakukan solusi agar tidak adanya kesalah pahaman dari masyarakat mengenai sistem zonasi ini, dan telah adanya salah satu solusi yaitu berupa adanya pos pelayanan di setiap sekolah yang akan melayani semua kendala yang dialami oleh peserta didik baru. Situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini sejauh ini sudah baik, kondusif dan sudah terkendali dengan aman sejauh ini sudah tidak ada lagi kendala yang cukup rumit ya terkait peserta didik baru yang mendaftar dan menurut saya dengan adanya sistem zonasi ini bahkan seharusnya mempermudah masyarakat ya untuk mendaftar masuk ke sekolah apa lagi sistem zonasi sekarang sudah ada sistem zonasi secara daring dan luring”*

Berikut website yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru:



Sumber: <https://karimun.siap-ppdb.com>.

Sesuai dengan adanya website yang diberikan oleh pemerintah tentunya mempermudah masyarakat dan pihak sekolah untuk mengakses segala bentuk informasi mengenai sistem zonasi ini sesuai dengan website yang diberikan, dimana kita tidak perlu lagi sebenarnya takut tidak mengetahui informasi karena ia bisa diakses 24 jam.

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh Bapak Hendri, S.Pd, MMPd. Selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Beliau mengatakan:

*"Standar keberhasilan menurut pemerintah yaitu terpenuhinya daya tampung sekolah dan yang paling penting sebenarnya sudah meratanya penerimaan murid baru disetiap sekolah tanpa adanya penumpukan, semua kendala dan solusi juga sudah di sampaikan pada rapat yang dilakukan kepala dinas dan sekolah-sekolah agar mampu menghadapi masalah-masalah yang timbul."*

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Ibu Salawati, S.Pd., M.M selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karimun. Beliau mengatakan:

*"Untuk saat ini sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintah tentunya standar dan tujuan keberhasilan dari PPDB sistem zonasi di smp 1 karimun ini yaitu terpenuhinya kuota atau daya tampung yang*



*disediakan sejauh ini smpn 1 karimun sudah memenuhi kuota yang disediakan tentunya tujuan yang diinginkan agar tidak terjadinya penumpukan dan predikat sekolah terfavorite jugak sudah tidak ada, yang menjadi sasaran dalam kebijakan sistem zonasi ini yaitu peserta didik baru. seperti yang diketahui bahwasannya sebenarnya tidak ada kendala serius dari sistem zonasi yang diberlakukan saat ini hanya saja ada beberapa kendala dari pihak orang tua murid baru seperti orang tua lebih panik terhadap sistem zonasi yang diberlakukan karena masalah penggunaan pendaftaran online dan penggunaan IT yang tidak dipahami oleh orang tua tetapi dari pihak sekolah telah melakukan solusi berupa adanya pos pelayanan yang akan melayani semua kendala yang dialami oleh peserta didik baru karena kita sudah menyiapkan panitia-panitia yang akan menyelesaikan kendala yang dialami dari segi pendaftaran dan pengumuman juga bisa ditanyakan kepada pos pelayanan panitia yang telah di sediakan, dari situs atau website pendaftaran itu kita melayani 24 jam jadi website pendaftaran itu bisa kita gunakan 24 jam tanpa adanya batasan jam dimulai dari tanggal pendaftaran dan segala updetan dari sekolah itu bisa kita lihat kapan saja. Situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini sejauh ini sudah baik, kondusif dan sudah terkendali dengan aman bahkan dari smp negeri 1 karimun sendiri itu selalu mengalami kelebihan kuota walaupun begitu mereka masih bisa untuk mendaftar kesekolah lain karena bukan hanya jalur zonasi saja tetapi juga ada afirmasi dan prestasi. Ya sekolah telah memenuhi peraturan yang diberikan dan sekolah juga sudah siap untuk melaksanakan sistem zonasi tersebut karena kami memiliki berbagai kesiapan bukan hanya dari segi pegawai tetapi juga dari segi sarana dan prasarana dari pihak sekolah yang sudah cukup baik.”*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ibu Noni noviyanti selaku panitia PPDB SMP 1 Karimun yang membahas mengenai sistem zonasi yang cukup membantu dan meringankan dan tentunya pasti memiliki risiko tersendiri disetiap kebijakan yang dikeluarkan.

*“Dari segi sejauh ini kami sudah memenuhi standar keberhasilan karena kuota kami sudah penuh walaupun masih sering mengalami banyaknya yang mendaftar itu kita kembalikan lagi agar mendaftar kesekolah lain, kami juga sudah semaksimal mungkin untuk membantu proses kebijakan dan sejauh ini semua aman terkendali.”*

Akan tetapi berdasarkan wawancara lebih lanjut Peneliti juga mewawancarai Ibu Sitti Murni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing, Beliau mengatakan mengenai kuota yang mereka sediakan untuk peserta didik baru yang sampai detik ini masih belum penuh.

*“Standar keberhasilan dari PPDB sistem zonasi ini seperti yang telah dijabarkan oleh pemerintah yaitu terpenuhinya kuota atau daya tampung yang disediakan setiap sekolah, sejauh ini smpn 4 Satu atap tebing karimun sejauh ini belum memenuhi kuota yang disediakan karena masih banyak siswa baru yang mendaftar kesekolah lain yang masih satu zonasi dengan alasan sekolah tersebut lebih bagus dalam sistem pendidikan dan masih adanya perspektif orang tua mengenai sekolah yang favorite. Sebenarnya tidak ada kendala serius dari sistem zonasi yang diberlakukan saat ini hanya saja ada beberapa kendala dari pihak orang tua murid baru seperti orang tua lebih panik terhadap sistem zonasi yang diberlakukan karena masalah penggunaan pendaftaran online dan penggunaan IT yang tidak dipahami oleh orang tua tetapi dari pihak sekolah telah melakukan solusi berupa adanya pos pelayanan yang akan melayani semua kendala yang dialami oleh peserta didik baru karena kita sudah menyiapkan panitia-panitia yang akan menyelesaikan kendala yang dialami dari segi pendaftaran dan pengumuman juga bisa ditanyakan kepada pos pelayanan panitia yang telah di sediakan, .Situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini sejauh ini sudah baik, kondusif dan sudah terkendali dengan aman. ya sekolah telah memenuhi peraturan yang diberikan dan sekolah juga sudah siap untuk melaksanakan sistem zonasi tersebut karena kami memiliki berbagai kesiapan walaupun sebenarnya kita masih kekurangan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan seperti masih kurangnya komputer dan ruangan kelas dan ruangan lain yang masih sedikit dan belum cukup memadai tetapi secara kesiapan dari para guru tentunya sudah siap.”*

Sama halnya dengan Ibu Afridayani selaku panitia PPDB SMP 4 SATAP beliau mengatakan bahwa:

*“selama proses sistem zonasi ini diterapkan saya merasa tidak terlalu banyak perubahan terjadi di sekolah kami mungkin karena sekolah kami*

*berada dipelosok dan tidak memiliki penduduk yang ramai dan dalam proses pelaksanaan sejauh ini sudah berjalan dengan baik”*

Peneliti mewawancarai siswa Smp 1 karimun yaitu Syadza Ghaita Amri yang mengatakan bahwa:

*“Selama mendaftar sekolah kami merasa tidak ada kendala, situasi dan kondisi kemaren juga banyak yang mendaftar online ad juga yang offline kalau tak paham, kalau kami kemarin daftar lewat online”*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Rahayu permatasari siswa SMP 1 karimun beliau salah satu murid yang mendaftar melalui jalur zonasi.

*“Selama proses pendaftaran kami merasa tak ada kendala kami tau kalau sistem zonasi pasti diterima kalau rumah dekat jadi main daftar aja jalur zonasi kami daftar secara langsung kesekolah”*

Hal yang hampir serupa disampaikan juga oleh Winroland Gempita Alam beliau merupakan siswa SMP 1 Karimun :

*“waktu mendaftar untuk sekolah kami pakai jalur prestasi dan kami daftar de online kadang-kadang situs aplikasi de suke tak bise dibuka orang tue yang menghubungi pihak sekolah”*

Peneliti juga melakukan wawancara bersama siswa dari SMP 4 SATAP yaitu Putri beliau mengatakan bahwa:

*“selama proses pendaftaran tidak ada kendala atau masalah kami juga daftarnya secara langsung kesekolah karena dekat dengan rumah.pas datang kesekolah juga banyak yang daftar secara langsung kesekolah”*

Hal yang serupa disampaikan oleh Safira murid SMP 4 SATAP:

*“waktu daftar kemaren tak ade masalah kami daftar de langsung tak pakai online karena orang tua juga kurang paham takut salah”*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat atau orang tua yang mendaftarkan anaknya kesekolah yaitu Ibu Susi beliau mengatakan bahwa:

*“Selama proses pendaftaran anak juga saya bawak kesekolah saya dfatar jalur offline karena kurang paham jadi sampai disekolah pihak sekolah yang membantu dan mengarahkan kallau tak paham jadi kendala de itu aj berkas dan lainh-lain juga langsung dibawa biar dapat langsung daftar kalau kurang saye balek kadang ade beberape berkas yang tak lengkap.”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat yaitu

Ibu Mareka sary beliau mengatakan bahwa:

*“selama proses pendaftaran saya selalu datang kesekolah sya daftarnya online jadi ada tetangga yang bantu daftarin kalau ada yang kurang saya datang kesekolah nanyak kadang suka eror aplikasinya juga itu aja kendalanya, selebihnya mana aja.”*

Dengan adanya beberapa informan yang telah peneliti wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi yang diberlakukan sebenarnya sudah cukup membantu mempermudah pihak sekolah dan masyarakat akan tetapi ternyata perbedaan pendapat dari dua kepala sekolah yang memiliki background sekolah yang berbeda masih ada sekolah yang belum memenuhi standar keberhasilan dari kebijakan sistem zonasi ini. Hal tersebut di karenakan masih kurangnya sarana dan prasarana dari sekolah tersebut dan perlunya evaluasi dari pemerintah khusus untuk sekolah pelosok yang masih belum memadai untuk melakukan sistem zonasi. Dari pendapat kepala dinas juga bisa disimpulkan bahwa ternyata pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai solusi tetapi juga bisa dilihat ternyata pemerintah belum paham betul mengenai strategi di sekolah pelosok dengan sekolah didaerah perkotaan mungkin kebijakan kuota atau standar keberhasilan bisa di bedakan khusus sekolah yang jauh dari pemukiman masyarakat atau memiliki penduduk yang sedikit agar standar keberhasilan dapat terpenuhi.

## 2. Sumber Daya

Pada variabel kedua ini, sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan non manusia yang menjadi pendukung keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi ini para pihak pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik, sumber daya yang tidak memadai tentunya akan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hal ini perlu diperhatikan. Maka peneliti melakukan wawancara Bersama Bapak Bapak Sugianto selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Berikut penjelasan yang beliau berikan:

*“Sejauh ini menurut saya sumber daya manusia di dinas pendidikan sudah cukup secara keseluruhan kita sudah layak untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini.”*

Peneliti juga melakukan wawancara Bersama Bapak Hendri selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, beliau mengatakan tentunya dari dinas pendidikan sendiri sebelum diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini dinas pendidikan kabuapten karimun sudah memepersipakan segala hal termasuk resiko apa yang akan dihadapi.

*“Didinas pendidikan sendiri sebenarnya sumber daya manusia sudah cukup memadai dari segi sarana dan prasarana jugak sudah memadai jadi tidak ada alasan bahwasannya kita tidak melaksanakan sistem zonasi yang dibuat oleh pemerintah”*

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Susi selaku masyarakat yaitu orang tua murid baru, beliau mengatakan bahwa:

*“Kesiapan kami sebagai orang tua tentunya kami berusaha yang terbaik untuk menyekolahkan anak kami sesuai dengan sekolah yang diinginkan, kami berusaha memahami mengenai sistem zonasi walau sebenarnya sampai detik ini kami sebagai orang tua juga sebenarnya masih kurang paham jadi selalu minta bantuan dari pihak sekolah langsung.”*

Hal yang serupa disampaikan oleh masyarakat yaitu Ibu Mekar sary orang tua murid yang mendaftar beliau mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini kami sebagai orang tue sudah siap dengan kebijakan baru yang dikeluarkan saya juga cukup paham terkait kebijakan baru yang mane jalur sekarang dah banyak dan pakai sistem zonasi semacam peraturan sekolah yang dekat rumah.para staf danguru juga sangat siap membantu kendala yang kami alami kalau kami datang kesekolahuntuk bertanya”*

Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Putri di SMP 4 Negeri SATAP ia mengatakan bahwa sangat minim pemahaman terkait sistem zonasi ini jadi kebanyakan hanya mengikuti arahan dari orang tua.

*“Sebenarnya dari kami sendiri kami tak paham dan tak tau tentang sistem zonasi ni jadi kesiapan kami Cuma berusaha belajar aje supaye bise masuk cuman kan setau kami kalau kami masuk dekat SMP 4 SATAP ni kami dah pasti jebol karena dekat dengan rumah kami.”*

Peneliti juga mewawancarai Safira dari SMP 4 SATAP yang menatakan bahwa:

*“ saya mearsa sudah cukup siap untuk melaksanakan sistem zonasi walaupun kurang paham tapi kami diajrkan sama sekolah kalau tak paham kesiapan kami paling nunggu informasi dari sekolah dan berkas apa saja yang harus disipkan .”*

Selain siswa smp SATAP peneliti juga mewawancarai Syadza Ghaitsa dari SMP 1 Karimun :

*“tentunya saya siap untuk melaksnakan sistem zonasi ini saya juga sudah belajar dengan sangat giat dan selalu mencari informasi pendaftaran kesekolah yang saya inginkan.”*

Hal yang serupa dismpaikan oleh Rahayu murid SMP 1 Karimun:

*“saya sangat siap untuk melaksakan sistem zonasi ini belum lagi saya merasa cukup berperan karen saya daftar jalur zonasi jadi saya banyak*

*menyiapkan berkas yang membuktikan bahwa rumah say tidak jauh dari sekolah.”*

Peneliti juga mewawancarai Winroland Gempita Alam murid SMP 1

Karimun ia mengatakan bahwa:

*“Kesiapan saya saat mau mendaftar tentunya mencari informasi dan memberitahu kepada orang tua karena sekarang pakai jalur zonasi jadi susah nak masuk sekolah yang kita mau jadi saya pakai jalur prestasi biar jebol dan menyiapkan segala bentu prestasi yang saya miliki.”*

Peneliti juga mewawancarai Ibu Salawati selaku Kepala Sekolah SMP 1

Karimun sebagai salah satu sekolah yang cukup banyak diminat siswa baru terbilang cukup baik dalam segi kuantitas dan kualitas sekolah. Beliau mengatakan:

*“Ya sumber daya manusia dari sekolah smp n 1 karimun sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan sudah cukup kompeten sesuai dengan bidang masing-masing. Kesiapan para guru dalam pelaksanaan sistem zonasi ini yaitu sebelum adanya pendaftaran baru kepala sekolah dan beberapa orang guru mengikuti seminar yang diadakan dinas pendidikan guna untuk mengetahui dan belajar apa yang perlu disiapkan untuk proses penerimaan peserta didik baru tersebut sekolah juga sudah melakukan rapat dan membentuk sebuah panitia yang akan menangani kendala yang dialami oleh masyarakat dimana semua panitia yang dibentuk tersebut merupakan guru-guru yang benar-benar paham mengenai IT dan pelayanan serta guru-guru yang siap untuk mencurahkan segala waktunya untuk PPDB sistem zonasi ini karena cukup banyak masyarakat atau orang tua yang menelfon pada jam berapapun untuk menanyakan kendala yang mereka alami. Kondisi sumber daya manusia dari smp n 1 karimun sudah cukup baik untuk melaksanakan sistem zonasi ini, dari jumlah guru yang sudah memadai bahkan sampai fisik dari para guru yang sudah cukup untuk melaksanakan sistem zonasi. “*

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh Noni Noviyanti selaku salah satu panitia PPDB di SMP 1 Karimun yang mengatakan bahwa:

*“Disekolah smp 1 karimun sendiri memiliki sumber daya yang baik dan sudah cukup memadai untuk melaksanakan sistem zonasi ini, dari sekolah*

*sendiri juga membentuk panitia PPDB setiap tahunnya untuk melaksanakan sistem zonasi jadi tidak semua guru memiliki wewenang dalam PPDB ini tetapi ada panitia PPDB tersendiri yang telah dibentuk sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab sudah jelas. Menurut Saya sebagai Panitia PPDB sejauh ini kemampuan para guru dan staf itu sudah cukup bahkan jaringan internet dan komputer yang disediakan pihak sekolah juga sudah cukup baik”*

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Sitti Murni Kepala Sekolah SMP 4 Satu Atap Tebing, masih banyak masalah yang terjadi tentunya dari segi fasilitas mereka yang masih memiliki keterbatasan dan kerusakan yang cukup memprihatinkan dimana mereka sangat minim kelas untuk belajar bahkan mereka tidak memiliki mushola untuk sholat hal ini membuat ibu sitti murni sangat ingin meminta perhatian dari pemerintah karena menurut beliau sebenarnya mereka sudah tidak terlalu tertinggal dikarenakan mereka sudah memiliki akses jaringan yang cukup baik .

*“Selama saya berada di SMP 4 SATAP ini sebagai kepala sekolah menurut saya sumber daya manusia nya sudah cukup baik para guru dan staf sudah sangat mampu untuk menjalankan sistem zonasi ini hanya saja terkait sarana dan prasarana di disini masih sangat kurang kenapa saya mengatakan seperti itu karena komputer dan ruang kelas disini masih cukup minim dan bahkan ada beberapa ruangan yang perlu ada tetapi disekolah kami tidak ada bahkan kami menggunakan satu ruangan dengan dua kegunaan dan tidak bisa dipungkiri kami merasa masih sangat kekurangan fasilitas disini.”*

Hal yang hampir serupa disampaikan oleh Ibu Afridayani Panitia PPDB beliau mengatakan bahwa :

*“sejauh ini dari segi sumber daya manusia sudah cukup sesuai dengan banyaknya murid karena kami juga tidak memiliki begitu banyak murid, cuman kami sangat kekurangan fasilitas disekolah yang cukup minim tapi kami pihak sekolah juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik dari segi fasilitas dan kenyamanan.”*



Berikut merupakan hasil dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti terkait sumber daya sarana dan prasarana di SMP 1 Karimun dan SMP 4 Satu Atap Tebing yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta implementasi sistem zonasi yang diterapkan bisa kita lihat dan kita bandingkan bagaimana fasilitas dari kedua sekolah tersebut. Dari setiap sekolah tentunya melaporkan segala kerusakan dan ke kurangan yang setiap sekolah alami agar adanya perubahan yang lebih baik.

**Tabel 4. 6 Sarana dan Prasarana Di SMP 1 Karimun**

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Ruang kelas dengan kondisi baik	20
2.	Ruang kelas dengan kondisi rusak ringan	4
3.	Ruang kelas dengan kondisi rusak sedang	1
4.	Lapangan olahraga	1
5.	Ruang UKS	1
6.	Musholla	1
7.	Laboratorium	1
8.	Perpustakaan	1
9.	Kamar Mandi	6

Sumber: Profil SMP Negeri 1 Karimun 2023

**Tabel 4. 7 Sarana dan Prasarana SMP 4 SATAP Tebing**

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Ruang kelas dengan kondisi baik	4
2.	Sanitasi dengan kondisi rusak ringan	2
3.	Kamar Mandi	1

Sumber: Profil SMP Negeri 4 SATAP Tebing

Berdasarkan dokumentasi diatas dapat diketahui bahwa SMP Negeri 1 Karimun memiliki 25 ruang kelas, lapangan olahraga 1, Ruang UKS 1, Laboratorium 1, Perpustakaan 1, Musholla 1 sedangkan di SMP Negeri 4 SATAP Tebing hanya memiliki ruang kelas sebanyak 6, bahkan fasilitas lain sangat-sangat kurang dan minim.

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk melancarkan proses belajar mengajar dan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Karimun lain halnya dengan SMP 4 SATAP Tebing yang masih terbilang belum cukup memadai sebenarnya. Melalui hasil pengamatan yang peneliti lakukan SMP Negeri 1 karimun memang cukup bagus bahkan ada beberapa ruangan kelas yang direnovasi dan di perbaiki mulai dari semua kebutuhan ruangan yang lengkap sampai ke tempat sampah yang ada disetiap sudut pun disediakan oleh sekolah dari sin bisa kita lihat bahwasannya ada upaya dari sekolah untuk lebih memperbagus sekolah, lain halnya dengan SMP 4 SATAP Tebing yang hanya memiliki beberapa ruang kelas bahkan mereka tidak memiliki musholla ketika adanya pesantren kilat mereka menggunakan musholla masyarakat sekitar, tidak memiliki laboratorium bukan hanya itu ruang perpustakaan dan majelis guru dijadikan satu agar mereka tetap memiliki perpustakaan untuk membaca, ruang kepal sekolah dan TU juga dijadikan satu ruangan.

### 3. Karakteristik Pelaksana

Variabel ketiga ini yaitu karakteristik pelaksana yang dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugas serta wewenang pihak-pihak yang telah bekerja sama didalam suatu kebijakan dimana dalam suatu kebijakan tentunya membutuhkan para pelaksana yang tegas dan disiplin. Berdasarkan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Menurut wawancara yang dilakukan ke Bapak Hendri selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, beliau mengatakan bahwa:

*“Didinas pendidikan kabupten karimun sendiri tentunya bertugas menjadi sarana sebagai informasi untuk menjalankan terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dalam proses PPDB. Pada proses PPDB berlangsung menggunakan aplikasi untuk mengontrol jadi secara langsung setiap sekolah nantinya langsung terkoneksi dengan dinas pendidikan jadi secara otomatis kita mengetahui berapa jumlah peserta didik baru yang mendaftar. Yang terlibat dalam kebijakan sistem zonasi ini tentunya bukan hanya dinas pendidikan saja tetapi sekolah dan masyarakat juga tentunya berperan penting.”*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Bapak Sugianto Beliau mengatakan bahwa:

*“Saya sebagai kepala dinas juga selalu melakukan dan memonitoring secara langsung kesekolah-sekolah untuk melihat proses pendaftarannya dan Didinas pendidikan kabupten karimun sendiri tentunya bertugas menjadi sarana sebagai informasi untuk menjalankan terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dalam proses PPDB. Pada proses PPDB berlangsung menggunakan aplikasi untuk mengontrol jadi secara langsung setiap sekolah nantinya langsung terkoneksi dengan dinas pendidikan jadi secara otomatis kita mengetahui berapa jumlah peserta didik baru yang mendaftar. Yang terlibat dalam kebijakan sistem zonasi ini tentunya bukan hanya dinas pendidikan saja tetapi sekolah dan masyarakat juga tentunya berperan penting untuk membantu mensukseskan kebijakan ini karena semua dilakukan untuk kepentingan bersama.”*

Peneliti juga mewawancarai Ibu Salawati selaku Kepala sekolah Di SMP Negeri 1 Karimun beliau mengatakan bahwa:

*“Sekolah bertugas untuk mengatur dan menerima peserta didik baru serta merupakan operator pelaksana PPDB dalam artian kita mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan. Program sistem zonasi ini sejauh ini menurut saya sudah cukup bisa diterima oleh masyarakat khususnya peserta didik baru karena kebijakan ini sudah berjalan dalam beberapa tahun dan sejauh ini terkendali dengan aman. Mengenai karakter kemampuan siswa yang beragam tidak bisa kita bohongi pastinya akan ada perbedaan dari sebelum jalur sistem zonasi dan sesudah adanya jalur sistem zonasi ini dari karakter kemampuan yang berbeda tersebut itu merupakan salah satu tugas guru bagaimana membuat tidak terlalu adanya perbedaan kemampuan yang terlalu mencolok dari dalam kelas, menurut saya ini juga tugas bagi orang tua untuk lebih mengawasi juga perkembangan belajar anak.”*

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Noni Noviyanti selaku panitia PPDB di SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing, selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung kami berusaha dan memberikan yang terbaik untuk seluruh calon siswa yang mendaftar karena sekolah juga sudah memberikan hak penuh dan tanggung jawab, bahkan juga melayani segala keluhan yang berdatangan pada jam berapa pun jadi untuk segala laporan terkait PPDB juga kami sangat teliti agar tidak terjadinya kesalahan dan kesalahpahaman kedepannya .

*“Tugas kami panitia lebih tepatnya dari pihak sekolah mengontrol dan mendata siswa yang mendaftar, membantu permasalahan yang dialami serta membuat hardcopy secara tertulis dan dikirimkan ke dinas pendidikan kami juga membuat laporan hasil setiap tahunnya mengenai PPDB lalu dikirimkan ke dinas pendidikan.”*

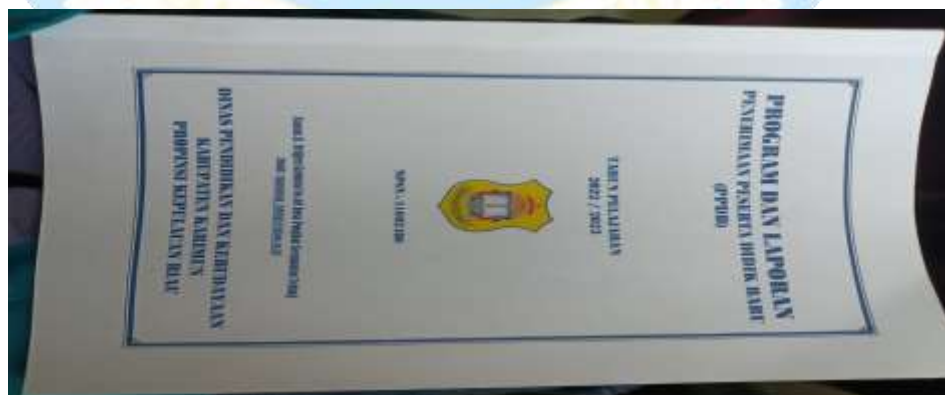
Peneliti juga mewawancarai Ibu Sitti Murni selaku kepala sekolah SMP 4SATAP Tebing beliau mengatakan bahwa:

*“Sekolah bertugas untuk mengatur dan menerima peserta didik baru serta kita mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan. Program sistem zonasi ini sejauh ini menurut saya sudah cukup bisa diterima oleh masyarakat khususnya peserta didik baru karena kebijakan ini sudah berjalan dalam beberapa tahun dan sejauh ini terkendali dengan aman. Mengenai karakter kemampuan siswa yang beragam sejauh ini tidak terlalu menonjol menurut saya semua sama jika ada ketidak seimbangan dari setiap kemampuan murid ini merupakan tugas guru bagaimana membuat tidak terlalu adanya perbedaan kemampuan yang terlalu mencolok dari dalam kelas, menurut saya ini juga tugas bagi orang tua untuk lebih mengawasi juga perkembangan belajar anak.”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Afridayani selaku paniti PPDB SMP 4 SATAP tebing:

*“Tugas kami panitia lebih tepatnya dari pihak sekolah mengontrol dan mendaftarkan siswa yang mendaftar, membantu permasalahan yang dialami serta membuat hardcopy secara tertulis dan dikirimkan ke dinas pendidikan kami juga membuat laporan hasil setiap tahunnya mengenai PPDB lalu dikirimkan ke dinas pendidikan.”*

Ini merupakan laporan setiap tahun yang harus diserahkan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karimun walaupun sudah memberikan laporan berupa file dan dinas pendidikan juga sudah memilikinya karena dinas pendidikan bisa mengontrol dan melihat sesuai dengan situs yang disediakan.



Sumber: SMP 4 SATAP Tebing

Peneliti juga mewawancarai Puti yaitu Siswa SMP 4 SATAP Tebing ia mengatakan bahwa:

*"sistem zonasi saya kurang paham tapi saya terima saja kalau sudah ketentuan dari sekolah."*

Hal serupa disampaikan oleh Safira murid SMP 4 SATAP Tebing yang mengatakan bahwa:

*"saya merasa sejauh ini menerima saja segala peraturan yang sekolah buat."*

Peneliti mewawancarai Winroland gempita siswa SMP 1 Karimun ia mengatakan bahwa:

*"sistem zonasi yang dikeluarkan menurut saya cukup ribet karena ada yang pakai online jadi kurang paham. selama dikelas juga saya tidak merasa ada perbedaan kemampuan tetapi kan pasti wajar ada yang juara dan tidak sesuai kemampuan."*

Hal yang sama disampaikan oleh Rahayu murid SMP 1 karimun ia mengatakan bahwa:

*"saya merasa mudah saja karena juga selalu dibantu orang tua dalam proses pendaftaran."*

Hal yang berbeda disampaikan oleh Syadza murid SMP 1 Karimun ia mengatakan bahwa:

*"saya sebenarnya merasa sedikit keberatan dengan adanya sistem zonasi dan tidak mudah untuk paham dengan cepat ini karena menurut saya cukup ribet dan cukup membuat banyak tanda tanya karena tidak sedikit yang tidak paham."*

Peneliti juga melakukan wawancara bersama masyarakat yaitu Ibu Mekar sary yang mengatakan bahwa:

*"saya cukup terkejut dengan kebijakan baru ini walaupun sudah pernah tau dan dengar sebelum mendaftarkan tapi tidak tau bahwa seribet ini belum lagi kita mendaftarkan harus secara online menurut saya ribet karena"*

*bagi saya yang kurang paham internet menjadi kendala yang cukup serius.”*

Peneliti juga mewawancarai Ibu Susi sebagai masyarakat dan orang tua murid baru ia mengatakan bahwa:

*“mau tidak mau harus paham dan harus terima krena ini kan sudah peraturan dari sekolah dan pemerintah.”*

Bedasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karimun sebagai pelaksana ditingkat daerah dan sebagai salah satu instansi yang mengontrol berjalannya kebijakan sistem zonasi ini sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik dan disiplin, SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing juga sudah menjalankan kewajiban dan tugas dengan baik bahkan mereka sudah menjalankan tugas sesuai yang diberikan. Sekolah setiap tahunnya memiliki tanggung jawab melaporkan hasil kedinas pendidikan setiap tahunnya untuk mendata dan melihat lebih rinci terkait peserta didik baru walaupun sebenarnya di website sudah tercantum secara otomatis ke dinas pendidikan. Bagi sekolah yang betul-betul merasakan adanya perbedaan kemampuan karakteristik dari peserta didik baru pastinya menjadi sebuah motivasi juga bagi para guru untuk lebih bisa membuat anak-anak murid memiliki kemampuan yang lebih baik dalam segi berfikir dan belajar serta hak dan kewajiban yang sama dalam proses belajar

#### **4. Sikap/Kecendrungan (*Dispotiton*)**

Variabel keempat yaitu mengenai sikap dari para pelaksana dalam kebijakan yang dijalankan. Kita bisa melihat dan menilai bagaimana kesiapan,

pemahaman, sikap penerima atau penolakan dari masyarakat, implementor dan pelaksana yang akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan yang di jalankan.

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dapat dilihat dari bagaimana kesiapan dan pemahaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Karimun, dan sekolah untuk menjalankan sistem zonasi ini, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Bapak Sugianto dan, beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah dikeluarkannya kebijakan sistem zonasi ini tentu saja kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu dari segi staf dan sekolah yang paham betul mengenai kebijakan sistem zonasi tetapi tidak semua sekolah dikabupaten karimun itu melaksanakan sistem zonasi karena ada di beberapa wilayah yang belum memungkinkan untuk melaksanakan sistem zonasi yang diterapkan, saya selalu turun lapangan untuk mengontrol dan melihat proses PPDB lalu pengawasan yang kami lakukan berupa membuat website dan memonitoring setiap pelaksanaan baik secara langsung maupun online, tanggapan atau sikap dari dinas pendidikan tentunya sangat mengapresiasi dengan kebijakan yang dikeluarkan.”*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Hendri kepala bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama, beliau mengatakan bahwa:

*“staf dan sekolah tentunya sudah paham betul mengenai kebijakan sistem zonasi ini karena kita sebelum melaksanakan tentunya harus mempersiapkan segala hal terlebih dahulu termasuk resiko yang akan dihadapi, tetapi tidak semua sekolah dikabupaten karimun itu melaksanakan sistem zonasi karena ada di beberapa wilayah yang belum memungkinkan untuk melaksanakan sistem zonasi yang diterapkan, pengawasan yang kami lakukan berupa membuat website dan memonitoring setiap pelaksanaan baik secara langsung maupun online, tanggapan atau sikap dari dinas pendidikan tentunya sangat mengapresiasi dengan kebijakan yang dikeluarkan.”*



Peneliti juga mewawancarai Ibu salawati kepala sekolah SMP Negeri 1

Karimun, beliau mengatakan:

*“Dari sekolah sendiri tentunya sudah sangat siap untuk melaksanakan sistem zonasi ini, dari staf dan para guru sejauh ini sudah sangat paham terkait kebijakan sistem zonasi setiap guru juga sudah diberikan tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, tanggapan saya untuk sistem zonasi ini sudah bagus ya sistem zonasi ini sangat mempermudah sekolah dan masyarakat dalam proses pendaftaran dan seperti tujuan yang ingin dicapai yaitu agar tidak terjadinya penumpukan sejauh ini sudah sangat teratasi dengan baik.”*

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Sitti Murni Kepala sekolah SMP Negeri 4 SATAP Tebing dan Afridayani selaku Panitia PPDB, beliau mengatakan:

*“Menurut saya sebenarnya dari segi sarana dan prasarana kami belum siap untuk mengikuti sistem zonasi ini karena masih banyak kekurangan tetapi dari segi staf dan guru sudah sangat siap bahkan kami sangat paham sekali mengenai sistem zonasi ini walau sebenarnya sistem zonasi yang diberlakukan di sekolah kami sebenarnya tidak membuat perubahan yang terlalu menonjol, tanggapan untuk sistem zonasi ini sebenarnya sudah bagus ya dengan diadakannya sistem zonasi di kabupaten karimun cuman mungkin masih perlu adanya evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang kurang di lihat oleh masyarakat.”*

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan biasanya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dilapangan adanya beberapa permasalahan yang dirasakan akibat sistem zonasi oleh peserta didik baru yaitu tidak diterima sekolah negeri yang diinginkan karena radius atau jarak tempat tinggal dengan sekolah dan daya tampung yang dibatasi seperti yang disampaikan salah satu siswa SMP Negeri 1 karimun Rahayu Permatasari mengatakan bahwa:

*“menurut saya mungkin pengawasan masih kurang karena Ada beberapa dari teman saya yang tidak bisa masuk kesini walaupun rumah meraka*

*dekat dari sini, mengenai sistem zonasi ini menurut saya kurang setuju dengan sistem zonasi ini agak sulit karena kita tidak bisa memilih sekolah yang kita inginkan.”*

Hal yang serupa disampaikan oleh Syadza Ghaitza Amri murid SMP 1

Karimun mengatakan bahwa:

*“pengawasan mungkin sejauh ini baik karena saya merasa tidak ada yang dicurigai hanya saja tanggapan saya terkait sistem zonasi ini kurang suka karena ribet dan banyak persyaratan.”*

Peneliti juga mewawancarai Winroland Gempita siswa SMP 1 Karimun ia mengatakan bahwa:

*“penawasan berbentuk pendaftaran menurut saya sudah baik karena ada panitia yang membantu dan mengurus, dan tanggapan saya sistem zonasi ini cukup emnanatang karen saya masuk benar-benar jalur prestasi bukan lagi jalur nilai.”*

Hal yang berbeda disampaikan oleh putri siswa dari SMP 4 SATAP Tebing yang mengatakan bahwa ia merasa tidak perlu tau karena sejauh ini jika mereka mendaftar pasti diterima jadi mereka juga berfikir bahwa mereka hanya perlu mendaftar tanpa perlu tau jalur apa yang digunakan.

*“Saya kurang mengerti terkait sistem zonasi ini waktu saya daftar juga saya tidak tau saya pakai jalur apa dan rata-rata teman yang mendaftar juga semua lulus masuk kesini, saya mau sekolah disini juga karena dekat dengan rumah jadi tak perlu diantar jemput orang tua cuman ada tetangga saya yang ingin mendaftar agak kedaerah perkotaan tetapi tidak masuk. Saya setuju setuju saja adanya sistem zonasi ini.”*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Safira siswa SMP 4 SATAP Tebing mengatakan bawa:

*“pengawasannya sudah baik karena sekolah betul-betul mengecek berkas saya dengan teliti, tanggapan saya ya suka saja karena dengan ada sistem zonasi ini saya bisa mendaftar dengan mudah sekolah dekat rumah.”*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yaitu ibu Mekar Sary beliau memiliki anak laki-laki yang bersekolah di jenjang SMP, beliau mengatakan:

*“Selama mendaftarkan anak saya ke sekolah saya cukup bingung karena saya juga kurang paham menulis dan membaca jadi dari pihak sekolah yang membantu proses pendaftaran, tentang sistem zonasi saya setuju saja karena dengan begini peluang anak yang tinggal dekat dengan sekolah jadi lebih besar jadi tidak perlu sekolah yang agak jauh dari rumah.”*

Hal serupa disampaikan oleh ibu Susi selaku masyarakat dan orang tua murid, beliau mengatakan bahwa:

*“saya sejauh ini masih kurang paham dengan sistem pendaftaran online kalau peraturan jalur zonasi saya sudah mengerti, tanggapan saya ya setuju saja walaupun pasti tentunya banyak yang merasa sulit dan terbatas untuk anak mereka mendaftar ke sekolah yang diinginkan.”*

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaksana sudah sangat siap menjalankan sistem zonasi ini. Terkait pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ternyata masih menimbulkan masalah terkait masih adanya siswa yang tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan, dari kalangan peserta didik baru juga masih menimbulkan pro dan kontra serta perbedaan pendapat terkait kebijakan sistem zonasi ini bahkan masyarakat dan peserta didik baru juga ternyata belum mengetahui secara dalam terkait sistem zonasi yang telah dijalankan selama beberapa tahun di kabupaten karimun entah karena minim informasi atau kurang kepekaan dari masyarakat terkait pemerintah itu juga belum pasti karena sejauh ini pemerintah tentunya sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan arahan pusat agar semua masyarakat paham dan mengerti.

## 5. Komunikasi antar organisasi

Variabel Kelima adalah komunikasi antar organisasi yang mana variabel ini merupakan salah satu cara yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan serta keadaan yang saling mendukung antara masing-masing institusi yang berkaitan. Untuk mencapai tujuan dari sistem zonasi ini tentunya penting untuk melakukan komunikasi yang berjenjang. Komunikasi antar organisasi ini tentunya melibatkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan selaku pembuat kebijakan tersebut lalu terjun ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan serta di persempit lagi dengan diberikan wewenang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak pelaksana di daerah serta komunikasi yang diterima oleh pihak sekolah dan yang diterima oleh masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB sistem zonasi. Komunikasi antar organisasi ini tentunya dapat dilihat dari sosialisasi atau pola komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana dan mereka-mereka yang terlibat. Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karimun yaitu sosialisasi terkait sistem zonasi pada pihak sekolah.



Sumber: Posmetro Batam

Pada gambar diatas, terlihat bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada sekolah-sekolah mengenai proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi pada tahun 2022/2023 itu merupakan salah stau contoh upaya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun selaku sebagai sarana penerus dalam kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu sistem zonasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugianto Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yang mengatakan bahwa:

*“Para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tentunya sangat paham dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini karena telah dilakukannya sosialisasi mengenai sistem zonasi setiap tahunnya, kita melakukan sosialisasi bersama seluruh kepala sekolah dikabupaten karimun guna untuk memberikan arahan dan pemahaman mengenai sistem zonasi, sosialisasi juga dilakukan secara online dan secara langsung sesuai dengan situasi dan kondisi. Respon saya terhadap kebijakan ini tentunya setuju dan saya berusaha melakukan sengan sebaik mungkin, kami jugak sangat konsistem terkait kebjakan ini sampai saat ini kami masih terus menjalan kan sistem zonasi dan melakukan peruhbahan sesuai arahan dari pemerintah pusat.”*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Hendri selaku Kepala Pembinaan Sekolah Menengah pertama, beliau mengatakan bahwa setiap tahunnya sosialisai pasti diadakan entah itu membahas terkait permasalahan yang terjadi serta mencari solusi untuk permasalahan tersebut dan tentunya setiap sosialisasi yang diberikan sangat berharap setiap sekolah paham betul jadi ketika ada permasalahan sekolah ,mampu mengatasi

*“Didinas pendidikan sendiri tentunya sudah melakukan sosialisasi bagi sekolah agar mereka paham betul mengenai sistem zonasi ini.”*

Hal yang serupa disampaikan oleh Ibu Salawati Kepala Sekolah SMP 1 Karimun dan Ibu Sitti Murni Kepala Sekolah SMP 4 SATAP Tebing, beliau mengatakan bahwa:

*“Kami sekolah tentunya sudah sangat paham mengenai sistem zonasi ini, dan benar setiap tahunnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu memberikan sosialisasi kesekolah mengenai sistem zonasi dan apa yang diubah serta jadwal-jadwal dan arahan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, kalau kepada masyarakat biasanya kami membuat poster pengumuman atau edaran terkait sistem zonasi ini, sejauh ini respon kami bagi sistem zonasi ini sangat baik dan kami berusaha menjalankan sesuai dengan arahan dan tujuan, kami juga sangat konsisten menjalankan sistem zonasi ini karena sejauh ini kami selalu mengikuti perubahan dan arahan dari pemerintah.”*

Hal yang berbeda disampaikan oleh Syadza Ghaitza Amri siswa baru SMP 1 karimun yang mengatakan bahwa:

★ *“Saya pernah mendapat sosialisasi terkait sistem zonasi ini seperti browser yang disebarkan tetapi saya juga masih kurang paham sistem zonasi ini sejauh ini sekolah cukup peduli dengan membantu proses pendaftaran yang saya lakukan karen kurang paham.”*

Hal serupa disampaikan oleh Rahayu Permatasari siswa SMP 1 Karimun mengatakan bahwa:

*“saya pernah menadapat browser tapi tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung.”*

Hal yang berbeda disampaikan oleh Safira siswa baru SMP 4 SATAP Tebing yang mengatakan bahwa:

*“Saya jugak tidak tau mengenai sistem zonasi karena saya tidak pernah mendpatkan sosialisasi langsung, saya hanya dengar dari kawan-kawan dan tetangga saja.”*

Sama halnya dengan yang disampikan oleh Putri siswa SMP 4 SATAP yang mengatakan bahwa :

*“saya juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi, dan saya juga kurang pahan semua diurus oleh orang tua saya.”*

Selanjutnya peneliti mewawancarai siswa SMP 1 karimun Winroland yang mengatakan bahwa:

*“selama mendaftar respon para guru sangat baik mereka membantu setiap proses kesulitan yang kita alami dan menjadi kenadal sebelum mendaftar saya melihat pengumuman mengenai sistem zonasi dari berita dan tetangga saja kalau dari sekolah langsung belum ada.”*

Peneliti juga melakukan wawancara bersama salah satu orang tua/masyarakat yaitu ibu susi, beluai mengatakan:

*“Saya tidak paham mengenai sistem zonasi tetapi saya tau bahwasannya ada kebijakan sistem zonasi kebijakan baru dari pemerintah saya liat diberita dan ada juga sekolah menempelkan di mading sekolah beserta persyaratan untuk anak mendaftar.”*

Sama halnya dengan Ibu Mareka sary yang mengatakan bahwa:

*“saya tau tapi tidak paham karena online kalau terkait jalur zonasi saya sudah cukup paham sejauh ini.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam bentuk sosialisasi, seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kabupaten Karimun melalui secara langsung maupun via online. Respon pelaksana kebijakan juga sangat baik karena kebijakan dikeluarkan untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik pastinya, Sekolah juga sudah memberikan informasi terkait kebijakan sistem zonasi berupa Surat edaran dan poster yang ditempelkan dan dibagi ke masyarakat walaupun masih ada masyarakat yang mengeluh dan mengatakan tidak

pernah mendapatkan sosialisasi dan surat edaran mungkin karena masih belum merata. Dinas Pendidikan dan sekolah juga sudah sangat konsisten menjalankan sistem zonasi ini sesuai arahan dan melakukan perubahan sesuai arahan juga jadi sejauh ini cukup berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Dalam proses PPDB sistem zonasi ini kondisi sosial yaitu terkait ketersediaan dan daya tampung sekolah yang di berikan harus sangat diperhatikan karena menjadi hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru serta masih kurangnya pemahaman orang tua karena proses pendaftaran melalui online. Dalam segi perekonomian, Kondisi ekonomi jugas pasti dirasakan oleh masyarakat atau para pendaftar PPDB karena seperti yang kita ketahui bahwasannya ekonomi setiap orang pasti berbeda-beda. Kondisi ekonomi peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pastinya bervariasi ada yang ekonominya menengah keatas dan ada ekonominya yang menengah kebawah atau bahkan ada yang tidak miskin dan tidak mampu tentunya hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda dari masyarakat.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Hendri Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama beliau mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini menurut saya dari segi ekonomi tentunya pemerintah ingin masyarakat lebih terbantu, dari segi sosial seperti masih adanya masalah masyarakat yang tidak paham mengenai teknologi dan titik jarak rumah mereka kesekolah, tentang politik sejauh ini tidak ada perbedaan atau*



*perubahan apa lagi terkait perubahan kuota karena pemerintah melakukan penambahan atau pengurangan kuota dengan alasan tertentu.”*

Peneliti melakukan wawancara bersama salah satu siswa SMP Negeri 4

SATAP Tebing yaitu Safira, ia mengatakan bahwa:

*“Menurut saya dengan adanya sistem zonasi yang diperuntukkan lebih dekat dengan rumah ini sangat bermanfaat karena untuk saya yang kondisi perekonomian orang tua saya yang kurang ini merupakan salah satu bantuan yang cukup dari segi pendidikan dimana saya tidak perlu sekolah jauh-jauh karena akan memakan biaya transportasi yang lebih besar.”*

Hal serupa disampaikan oleh orang tua atau masyarakat yaitu ibu Susi beliau mengatakan bahwa dengan keadaan ekonomi yang saat ini dimiliki dan segala jenis peningkatan harga yang cukup drastis membuat begitu banyak keluhan yang membuat setiap orang tua memiliki keterbatasan untuk memilih dan berfikir untuk lebih realistis saja seperti sekolah dekat transportasi hemat.

*“dengan adanya sistem zonasi ini sangat menguntungkan bagi rumah yang dekat dan perekonomian yang agak kurang.”*

Peneliti juga mewawancarai Ibu Salawati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karimun, beliau mengatakan bahwa:

*“Sekolah mulai menerapkan sistem zonasi pada tahun 2019, manfaat yang dirasakan sekolah tentunya sekolah merasa lebih terbantu dan lebih dipermudah dalam PPDB sistem zonasi ini, Selama dilaksanakannya sistem zonasi ini kita yang dulunya terkenal sebagai salah satu sekolah SMP Negeri terfavorit di kabupaten karimun tidak bisa di bohongi bahwasannya kita sangat mengalami perbedaan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang untuk mendaftar kita memberikan batas kuota dan adanya jalur yaitu jalur zonasi, afarmasi, prestasi dan perpindahan orang tua dulu sekolah kita melakukan perankingan untuk masuk ke sekolah kita, jadi ketika tidak adanya lagi perankingan dan penilaian dari nilai yang dimiliki peserta didik baru kita sangat merasa adanya perbedaan kemampuan belajar dari para murid.”*

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Noni Noviyanti Panitia PPDB SMP 1

Karimun beliau mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini tentu banyak sekali manfaat yang kita terima terutama dari segi ekonomi, Perbedaan selama saya menjadi guru yang mengajar dan sebagai panitia menurut saya perbedaaan dalam proses nya lebih gampang dan mudah..”*

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Sitti Murni selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SATAP Tebing, beliau mengatakan bahwa:

*“ sekolah menerapkan sistem zonasi pada tahun 2019. tentunya kami merasakan manfaat yang dirasakan setelah adanya kebijakan sistem zonasi ini segala hal lebih dipermudah dan cepat. Sebenarnya selama diterapkannya sistem zonasi ini kami tidak merasakan adanya perbedaan karena sampai saat ini masih banyak siswa yang kurang berminat untuk masuk ke sekolah kami terbukti dengan tidak penuhnya kuota yang kami sediakan.”*

Peneliti juga mewawancarai Ibu Afridayani Panitia PPDBSMP 4 SATAP beliau mengatakan bahwa:

*“menurut saya tidak terlalu banyak perubahan walaupun sisiwa baru sedikit bertambah tapi belum penuh kuota tersebut, pendapat saya terkait sistem zonasi ini dari lingkungan ekonomi yang cukup banyak membuat perubahan dari masyarakat”*

Peneliti juga mewawancarai siswa baru yaitu Winroland Gempita ia mengatakan bahwa:

*“sejauh ini manfaat yang saya rasakan tidak ada karena rumah saya tidak dekat tidak jauh jadi masih menggunakan transportasi,dari keadaan lingkungan sekitar kadang-kadang masih ada yang marah-marah terkait jarak rumah, “*

Hal yang sama disampaikan oleh Syadza Ghaitasa siswa SMP 1 Karimun mengatakan bahwa:

*“Saya merasa keadaan ekonomi dan sosial seperti biasa aja tidak ada perubahan menurut saya.”*

Hal berbeda disampaikan oleh Rahayu Permatasari siswa SMP 1 Karimun yang mengatakan bahwa:

*“keadaan ekonomi saya jauh lebih terbantu manfaat yang saya rasakan sejauh ini mengenai biaya yang lebih hemat, dan manfaat sosial sejauh ini sudah baik banyak masyarakat yang sama rata dan tidak lagi saling membandingkan nilai.’*

Peneliti juga mewawancarai Safira siswa SMP 4 SATAP yang mengatakan hal serupa yaitu:

*“menurut saya keadaan dan manfaat dari segi ekonomi saya merasa lebih bisa menghemat biaya transportasi saya, perbedaan yang saya rasakan terkait tidak ada lagi perankingan nilai dalam pendaftaran.”*

Hal yang sama disampaikan oleh Putri siswa SMP 4 SATAP ia mengatakan bahwa:

*“salah satu alasan saya masuk ke SMP 4 SATAP ini kan karena saya ingin dekat dengan rumah dan tidak perlu diantar jemput, dan lingkungan sosial pertemanannya juga saay kenal semua karena satu tempat.”*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yaitu Ibu Mareka Sary beliau mengatakan bahwa:

*“keadaan perekonomian saya sejauh ini semenjak ada sistem zonasi cukup membantu dalam menghemat biaya untuk antar jemput anak karena sekolah anak dan rumah saya dekat, manfaat lain yang saya rasakan terkait lingkungan sosial yang rata-rata teman anak saya itu semua saya kenal jadi tidak terlalu khawatir.”*

Hal berbeda disampaikan ibu Suisi sebagai masyarakat dan orang tua murid beliau mengatakan bahwa:

*“tidak terlalu banyak perbedaan dan perubahan menurut saya sejauh ini kedaannya sama saja hanya saja sekarang sudah bisa mendaftar secara online .’*

Dalam pemaparan-pemaparan dan penjelasan dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa sekolah dan masyarakat sangat terbantu dan sangat merasa manfaat dari kebijakan sistem zonasi yang dikeluarkan ini terutama

bagi siswa yang kurang mampu masuk ke jalur zonasi dimana mereka sangat terbantu dalam pendidikan, bahkan orang tua juga merasa sekolah dekat memiliki banyak keuntungan melihat dan menimbang kebutuhan kehidupan yang semakin banyak dan naik, saat ini dan ternyata ada perbedaan yang dirasakan setiap sekolah dimana mereka merasa perubahan dari sistematika pendaftaran dan pembelajaran yang berubah tetapi juga ada sekolah yang merasa tidak ada perbedaan mau adanya zonasi atau tidak mereka merasa sistematika dan pembelajaran tetap sama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun juga berpendapat hampir sama dengan masyarakat dari segi politik juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun merasa tidak ada masalah serius yang dialami walaupun terjadinya perubahan-perubahan kuota yang selalu menjadi perbincangan.

#### **4.3 Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing telah melaksanakan sistem zonasi dan telah menjalankan kebijakan sistem zonasi sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlunya peran pemerintah sekolah, dan masyarakat untuk saling membantu dan mensukseskan kebijakan sistem zonasi ini. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 serta peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan petunjuk teknisnya yang dikeluarkan setiap tahunnya sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berlangsung

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi:

#### 1. Ukuran Kebijakan dan Tujuan Kebijakan

Deri kebijakan sistem zonasi ini tentunya akan ada standar atau ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah tentunya, seperti yang diketahui bahwa salah satu standar dari keberhasilan kebijakan sistem zonasi yaitu terpenuhinya daya tampung yang disediakan dan tujuan kebijakan sistem zonasi ini salah satunya yaitu untuk membuat pemertaaan disetiap sekolah, menghapus segala pelebelan dari setiap sekolah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan diindonesia. Pentingnya kebijakan sistem zonasi ini tentu untuk memperkuat dan memperkokoh pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah membuat segala perencanaan dan menjalankan kebijakan agar terjadi sesuai arahan dan harapan,

Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah menjalankan sistem zonasi ini dari tahun 2019 sampai saat ini sama halnya dengan SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 STATAP Tebing yang sudah menjalankan sistem zonasi ini sesuai dengan peraturan Permendikbud dan Peraturan Bupati namun masih ada beberapa sekolah yang belum menjalankan sistem zonasi melalui online karena keterbatasan dari segi fasilitas dan internet. Mengenai standar dan tujuan kebijakan sejauh ini sudah banyak sekolah yang memenuhi standar walaupun masih adanya

sekolah yang tidak dapat memenuhi kuota yang disediakan yaitu salah satunya SMP 4 SATAP tebing. tujuan dari kebijakan ini tentunya sudah berjalan sesuai yang diharapkan dimana sudah tidak adanya lagi penumpukan siswa didalam kelas yang tidak sesuai ataupun saat pendaftaran.

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan dari proses kebijakan sistem zonasi yang dilakukan di kabupaten karimun tentunya akan sangat bergantung kepada sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia maupun yang non manusia.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten karimun yaitu tentunya sumber daya yang ada dan disediakan sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam proses pelancaran sistem zonasi yang dilakukan di dinas pendidikan sendiri sudah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang diberikan sama halnya dengan SMP N 1 karimun dan SMP N4 SATAP tebing yang memiliki sumber daya manusia yang dapat membantu proses pelaksanaan sistem zonasi.

Dari segi sumber daya non manusia di kabupaten Karimun sendiri sudah termasuk salah satu wilayah yang bagus dalam pendidikan walaupun masih adanya sekolah yang kesulitan fasilitas seperti kelas yang tidak

mencukupi dan peralatan yang tidak lengkap serta internet yang belum sepenuhnya memasuki semua wilayah di kabupaten karimun. Di SMP Negeri 1 karimun sejauh ini sudah memiliki fasilitas dan peralatan yang cukup untuk mendukung proses pendaftaran dan pembelajaran lain halnya dengan SMP Negeri 4 SATAP Tebing yang masih mengeluhkan mengenai fasilitas yang belum sepenuhnya lengkap.

### 3. Karakteristik Pelaksana

Dalam proses pelaksanaan sistem zonasi tentunya juga harus didorong oleh karakteristik dimana hal ini menjadi salah satu pendorong lambat atau cepatnya proses kebijakan sistem zonasi ini berjalan. Pemerintah sudah membuat dan memberikan kebijakan yang bisa mempermudah dan memberikan solusi untuk dunia pendidikan.

Sementara hasil penelitian di lapangan karakteristik pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah sangat membantu, SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP tebing juga sudah memberikan pelayanan yang baik untuk membantu proses pendaftaran sistem zonasi sejauh ini karakteristik pelaksana sudah sangat baik dan memberikan dampak yang cukup baik pemerintah dan sekolah sudah memberikan dukungan dan bantuan penuh demi memperlancar proses sistem zonasi yang dijalankan .

### 4. Sikap/Kecendrungan (Disposition)

Sebuah kebijakan yang dijalankan tentunya harus memberikan dampak yang baik untuk penerima kebijakan walaupun tidak bisa kita sangkal bahwasannya disetiap kebijakan memiliki resikonya tersendiri. Sikap penerimaan dan penolakan dari sekolah dan masyarakat juga tentunya mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan sistem zonasi ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan dijalankan oleh masyarakat dan sekolah.

Sementara hasil dari penelitian dilapangan dikaputaen sendiri setiap sekolah sudah sangat siap dan mampu untuk melaksanakan sistem zonasi ini terutama di SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing. Kebijakan sistem zonasi ini sudah diterima oleh Dinas pendidikan Kabupaten Karimun walaupun masih adanya pro kontra yang terjadi serta penolakan secara halus terkait kebijakan sistem zonasi yang dijalankan ini dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang ternyata masih banyak mengeluh.

#### 5. Komuniaksi Antar Organisasi

Dalam kebijakan yang dikeluarkan tentunya komunikasi disetiap organisasi harus terjalin dengan baik guna untuk memanilisir dan membantu segala kendala yang dialami agar tidak adanya juga kesalah pahaman yang terjadi.

Sementara hasil penelitian dilapangan terkait kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karimun khususnya di SMP 4 SATAP dan SMP 1 Karimun sejauh ini sudah melakukan komunikasi satu dengan yang lain dimana



Dinas Pendidikan sendiri juga sudah sering melaksanakan sosialisasi terhadap pihak sekolah terkait sistem zonasi sama halnya dengan sekolah juga melakukan sosialisasi berupa penyebaran brosur mengenai pendaftaran PPDB sistem zonasi yang akan dilaksanakan walaupun masih banyaknya masyarakat yang tertinggal informasi terkait sistem zonasi ini dikarenakan mereka minim informasi.

6. Lingkungan social, ekonomi, dan politik.

Kondisi lingkungan social, ekonomi, dan politik tentunya menjadi pendorong dalam keberhasilan dan mempercepat pelaksanaan sistem zonasi dimana jika kondisi tidak memungkinkan untuk menjalankan sistem zonasi tentunya kebijakan yang dikeluarkan ini tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah tentunya juga sudah memikirkan apa resiko serta kondisi apa yang akan dilami dalam proses kebijakan sistem zonasi ini oleh karena itulah banyak usaha dan upaya serta pembaharuan yang dilakukan pemerintah sejauh ini terkait sistem zonasi.

Sementara hasil penelitian di lapangan dari SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing dari segi lingkungan ekonomi sangat membantu masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang dan menepati lingkungan rumah dekat sekolah tentunya membuat mereka sangat merasakan perbedaan dan manfaat yang dialami, belum lagi banyaknya masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karimun berprofesi sebagai Nelayan, dari segi lingkungan sosial sejauh ini semua tidak ada kendala walaupun masih terjadinya pro

kontra dan keterbatasan hak memilih sekolah, dari segi politik pemerintah merasa semua berjalan sesuai aturan walaupun peraturan yang dikeluarkan selalu mengalami perubahan dan perbaikan tetapi semua dijalankan dengan seharusnya.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi sejauh ini belum mampu memenuhi kepentingan publik secara menyeluruh. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing sudah menjalankan PPDB sistem zonasi sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Karimun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

#### **1. Ukuran-ukuran dan Tujuan-tujuan Kebijakan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SMP Negeri 1 Karimun dan SMP Negeri 4 SATAP Tebing telah menerapkan peraturan tersebut sehingga pada proses pendaftaran peserta didik yang diterima merupakan peserta didik yang memiliki rumah tidak jauh dari sekolah, akan tetapi standar keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan seperti terkait daya tampung yang tidak memenuhi standar karena tidak penuhnya kuota yang diberikan dari sekolah SMP 4 SATAP Tebing ini karena pemerintah menyamaratakan standar keberhasilan disetiap sekolah. Situasi dan kondisi pada saat penerimaan peserta didik baru sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi jika dilihat dari hak peserta didik dalam memilih sekolah ternyata menjadi terbatas karena diatur dari radius zona rumah kesekolah yang lebih

diprioritaskan. Dalam proses penerimaan peserta didik baru sekolah merasa sangat terbantu dalam administrasi akan tetapi orang tua yang masih belum paham terkait pendaftaran online.

## 2.Sumber Daya

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi sistem zonasi sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun sudah sesuai kebijakan dan standar dalam mengimplementasikan sistem zonasi. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing juga sesuai dan siap untuk menjalankan sistem zonasi. Dari sumber daya non manusia seperti sarana dan prasarana atau kualitas dari sekolah tersebut di SMP 1 karimun sudah memiliki cukup ruang kelas dan fasilitas yang baik, tetapi di SMP 4 SATAP Tebing sendiri adanya kekurangan dari segi ruang kelas dan fasilitas yang masih rusak dan sedikit perlunya evaluasi serta perhatian dari pemerintah dalam fasilitas dan kualitas sekolah tersebut.

## 3.Karakteristik Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sejauh ini para pelaksana sistem zonasi sudah menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yang sudah menjalankan tugas serta memonitoring pelaksanaan sistem zonasi tersebut, dari pihak sekolah juga sudah menjalankan kewajiban membantu masyarakat dalam pendaftaran, memberitahukan mengenai kebijakakan, mendata serta membuat laporan yang akan diserahkan ke dinas

pendidikan dan kebudayaan. Kemudian masyarakat juga mudah menerima semua kebijakan yang telah dibuat walaupun masih ada yang belum sepenuhnya paham tetapi pemerintah dan sekolah tetap memberikan pelayanan yang dapat membantu masyarakat, Kemampuan karakteristik siswa baru yang berazam saat setelah penerimaan peserta didik baru sangat dirasakan.

#### 4. Sikap /Kecendrungan (*Dispotiton*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten karimun serta sekolah SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing sudah sangat siap menjalankan sistem zonasi dengan segala kemampuan yang telah dikuasai. Sikap para guru dan staf sangat membantu kendala yang dialami oleh masyarakat atau peserta didik baru. Pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ternyata masih adanya siswa yang tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan, dari kalangan peserta didik baru juga masih menimbulkan pro dan kontra serta perbedaan pendapat terkait kebijakan sistem zonasi ini bahkan masyarakat dan peserta didik baru juga ternyata belum mengetahui secara dalam terkait sistem zonasi.

#### 5. Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dijalin oleh para pelaksana sudah terjalin seperti dilakukannya sosialisai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Karimun kepada SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing, sekolah juga membuat surat edaran dan poster yang diberikan kepada masyarakat tetapi masih ada masyarakat dan peserta didik baru yang tidak mengetahui sistem zonasi ini dikarenakan sosialisasi dan poster edaran yang belum merata terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Konsistensi yang dilakukan para pelaksana sejauh ini juga sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan arahan.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi masyarakat dan sekolah sangat merasakan manfaat dari kebijakan ini seperti proses pendaftaran dan administrasi yang cepat dan akurat serta masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kebijakan peluang jarak rumah ke sekolah lebih dekat dapat menghemat biaya transportasi. Dari segi keadaan sosial yaitu selama adanya perubahan dan perbedaan proses kebijakan dijalankan perbedaan sangat dirasakan oleh SMPN 1 Karimun dari segi sistematika pendaftaran yang berbeda dan proses belajar mengajar yang berbeda, masih adanya masyarakat yang tidak paham karena penggunaan komputer atau pendaftaran online.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan saran yaitu dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP

Kabupaten Karimun pemerintah arus lebih banyak mengkaji dan melihat kelapangan terkait permasalahan yang dialami peserta didik baru dalam pendaftaran, pemerintah juga harus melihat langsung apakah sosialisasi yang dilakukan sudah merata sehingga pelaksanaan PPDB sistem zonasi dapat terlaksana secara optimal. Serta PPDB ini perlu dilanjutkan dan diadakan setiap tahunnya karena memiliki dampak positif bagi pendidikan, Kemudian ada beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan teori yaitu:

1. Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar atau ukuran dari keberhasilan kebijakan mungkin bisa dikaji kembali atau dibedakan oleh pemerintah tergantung daerah atau wilayah karena melihat sebaran penduduk atau kepadatan penduduk yang tidak sesuai.

2. Sumber Daya

Dinas pendidikan Kabupaten karimun atau pemerintah diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan atau fasilitas dari sekolah-sekolah yang masih kurang bagus.

3. Karakteristik Pelaksana

Para pelaksana harus lebih memperhatikan pemahaman masyarakat terkait sistem zonasi ini karena akan banyak sekali problematika yang muncul jika masyarakat tidak memahai kebijakan yang dikeluarkan.

4. Sikap/Kecendrungan (*Dispotiton*)

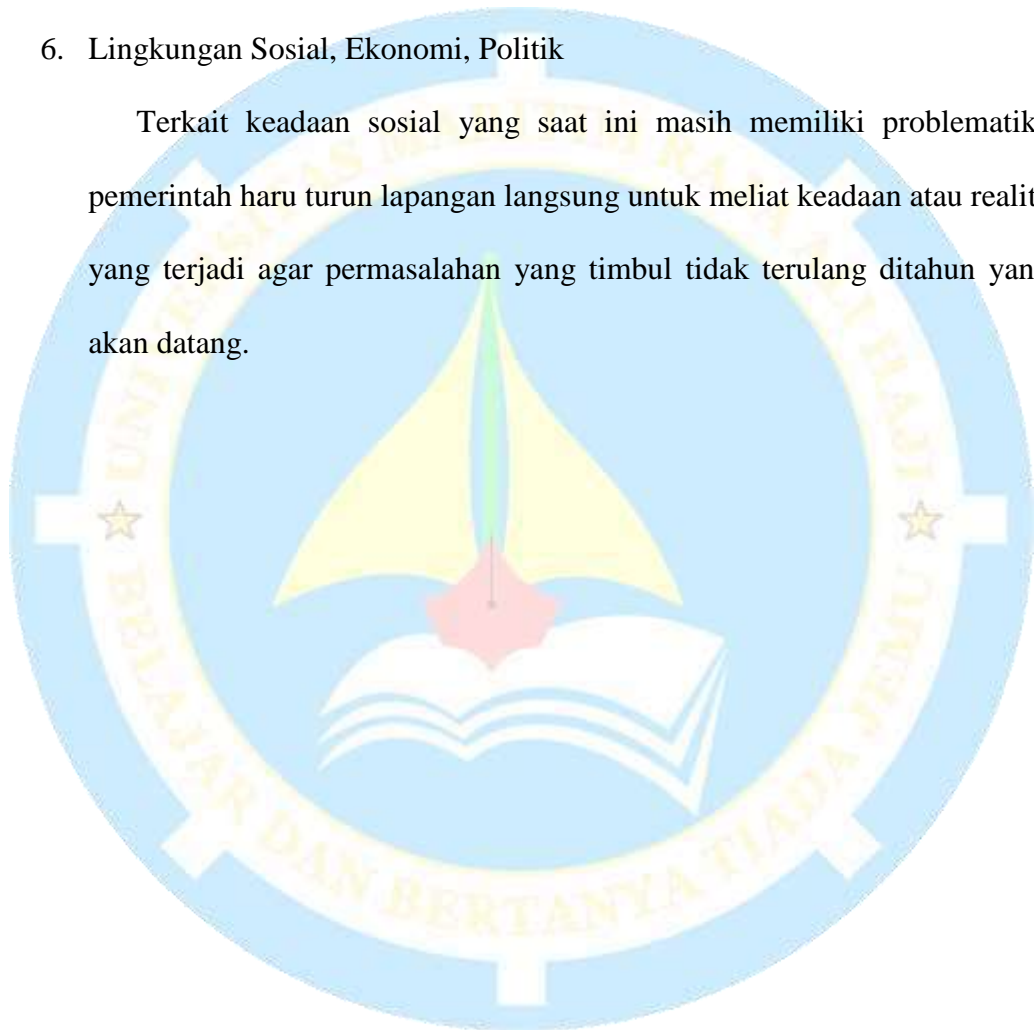
Pemerintah harus mengevaluasi kembali mana sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan sistem zonasi dan mana yang belum siap serta mencari solusi dari belum kesiapan sekolah tersebut.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi

Pemerintah dan sekolah harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan, poster edaran kebijakan yang dibuat juga harus merata agar seluruh masyarakat mendapatkan sosialisasi dan pemahaman yang lebih terkait sistem zonasi ini.

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik

Terkait keadaan sosial yang saat ini masih memiliki problematika pemerintah harus turun lapangan langsung untuk melihat keadaan atau realita yang terjadi agar permasalahan yang timbul tidak terulang ditahun yang akan datang.







## DAFTAR REFRENSI

### BUKU

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anas Salahudin, 2017. *Metode Riset Kebijakan Pendidikan*. 1st ed. edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: 1 April.
- Awan Y.Abdoellah, Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung.
- Budi Winarno, 2013. *Kebijakan Publik Teori,Proses,Dan Studi Kasus*. 2014th ed. edited by Tri Admojo. yogyakarta: PT.Buku Seru.
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Fariied Ali, Andi Syamsu. 2012. *Studi Kebijakan*. Bandung.
- Heru Subiyantoro. 2004. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta
- Masyhuri, Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Bandung.
- Mughni, Ahmad. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana*. Malang.
- RIZKY DERMAWAN. 2016. *Pengambilan Keputusan Landasan Filososis,Konsep Dan Aplikasi*. keempat. edited by ALFABETA. Bandung: Febuari 2016.
- Sabar Budi Raharjo, Yufriidawati, Ais Irmawati. 2022. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*.
- Sabilu, Yusuf. 2022. *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)*. Malang.
- Saefullah, Djaja. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: 2006.
- Suardi, 2016. *Pengantar Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. edited by Bambang Sarwiji;S.E. Jakarta: 2016.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung.
- wawan setiawan, Dwi utami Kusnadi, Muharnanto. 2019. *Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi*.

## JURNAL

- Azis, Rohmad, Djono, and Hieronymus Purwanta. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah Di SMA Se-Kabupaten Sleman (Study Kasus Di SMAN 1 Kalasan, SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Minggir)." *Jurnal Candi* 20(2):145–57.
- Didik, Peserta, Baru Sekolah, and Menengah Atas. 2021. *Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sumatera Utara.*
- Fahrurizki, A. I. 2020. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Di Kota Bandung."
- Handayani, P., Rumzi. S, and Jamhur P. 2022. "Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada Ppdb Sistem Zonasi Di Sma ...." (14).
- Hardiasanti, Maulidia, and Syunu Trihantoyo. 2021. "Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 09(05):1064–77.
- Juliani. 2018. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Negeri 1 Gowa.* Vol. 1.
- PDSPK Kemendikbud. 2018. "Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Zonasi Mutu Pendidikan." *Kemendikbud RI* 24.
- Pendidikan, Dinas, and Kabupaten Karimun. 2021. *Revisi.*
- Profilbaru.com. n.d. "No Title." 2022. Retrieved (<https://profilbaru.com/sekolah/tingkat/pendidikan/SMP/3/kecamatan/Kec.-Karimun/d89eb1efcc15253e30137d49a59ed423954d635b>).
- Riau, Provinsi Kepulauan, Peraturan Daerah, Kabupaten Karimun, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Bupati Karimun. 2021. "Bupati Karimun." 1–58.
- Sari, Yunita. 2020. "Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Yunita Sari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi.
- Sawirdi, Sawirdi. 2017. "Implentasi Kebijakan Sd-Smp Negeri 4 Satu Atap Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun." *Jurnal Pendidikan* 17(2):113–20. doi: 10.33830/jp.v17i2.270.2016.
- Statistik, badan pusat. n.d. "Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Menurut Provinsi, 2021/2022." 2022. Retrieved (<https://www.bps.go.id/publication.html>).

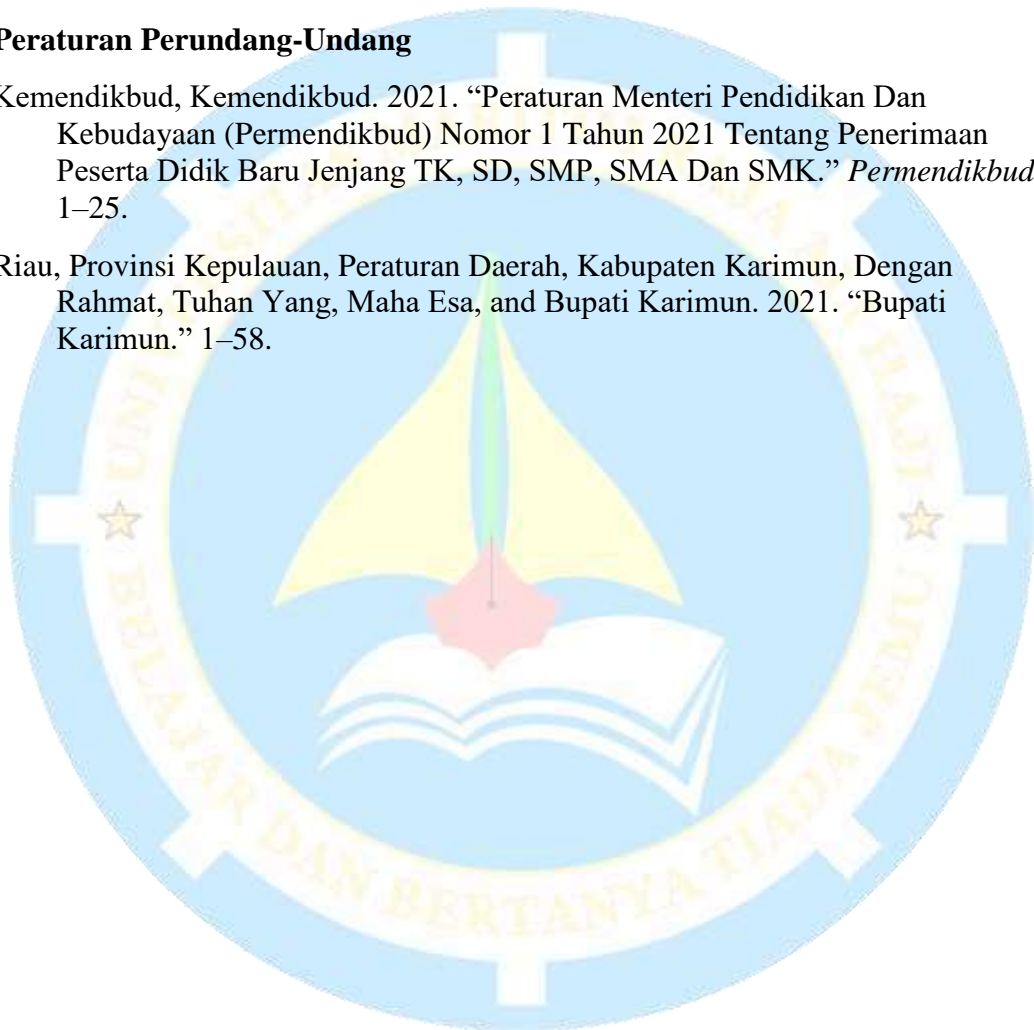
Ula, Dany Miftahul, and Irvan Lestari. 2020. "Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5(1):10. doi: 10.28926/briliant.v5i1.375.

Wijaya, Candra, Ahmad Fuadi, and Syahrul Hasibuan. 2020. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12(1):162. doi: 10.24114/jupiis.v12i1.16463.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Kemendikbud, Kemendikbud. 2021. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA Dan SMK." *Permendikbud* 1–25.

Riau, Provinsi Kepulauan, Peraturan Daerah, Kabupaten Karimun, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Bupati Karimun. 2021. "Bupati Karimun." 1–58.



## LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara

#### A. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan :
5. Hari/Tanggal wawancara :

#### B. Daftar Pertanyaan

##### a. Ukuran-Ukiran Kebijakan dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

1. Apa ukuran atau standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengenai sistem zonasi di SMP 1 Karimun dan SMP 4 Satu Atap Tebing?
2. Apakah selama proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ada kendala dalam menjalankan sistem zonasi?
3. Bagaimana situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing?
4. Apakah pihak-pihak memenuhi peraturan dalam menjalankan sistem zonasi?
5. Apakah tujuan dari kebijakan dari sistem zonasi ?

##### b. Sumber Daya

1. Apakah sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing sesuai dengan kebijakan/peraturan pemerintah tersebut?
2. Bagaimana kesiapan pegawai dan kompetensi dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah terkait sistem zonasi?
3. Bagaimana kondisi sumber daya manusia dan non manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing?
4. Bagaimana kesiapan masyarakat dan peserta didik baru dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi?

**c. Karakteristik Organisasi Pelaksanaan**

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam implementasi program sistem zonasi di Kabupaten Karimun?
2. Apa tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing terkait sistem zonasi?
3. Apakah kebijakan sistem zonasi mudah diterima oleh masyarakat/
4. Bagaimana karakteristik kemampuan dari siswa yang beragam dalam penerapan sistem zonasi ?

**d. Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana**

1. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun,

SMP 1 Karimun dan SMP 4 SATAP Tebing sudah siap untuk melaksanakan sistem zonasi?

2. Bagaimana sikap dan pemahaman para pelaksana dalam penerapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
3. Bagaimana pengawasan dan tanggapan atas pelaksanaan peraturan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karimun?

**e. Komunikasi Antar Organisasi**

1. Apakah implementor memiliki pemahaman dan pengetahuan atas isi dan tujuan dari sistem zonasi?
2. Bagaimana setiap para pelaksana dan penerima kebijakan berkomunikasi mengenai peraturan sistem zonasi?
3. Bagaimana respon implementor terhadap kebijakan sistem zonasi?
4. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi?

**f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik**

1. Apakah keadaan dan manfaat dari sosial, ekonomi, politik dengan implementasinya kebijakan sistem zonasi?
2. Apakah ada perbedaan yang dirasakan oleh sekolah favorite dan reguler saat penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
3. Kapan sekolah mulai melaksanakan sistem zonasi?
4. Bagaimana pendapat para pelaksana terkait lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setelah dilaksanakannya sistem zonasi.

## Lampiran 1. 2 Surat Ketetapan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093  
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau  
Website : umrah.ac.id E-mail : fivip@umrah.ac.id

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 297/UN53.5/HK.04/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
  - b. bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Memperhatikan** :
- Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU** :
- Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** :
- Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian), kualitas data, dan analisis data;



Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 19 Januari 2023

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhuyanto, S.H.,M.H.  
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2. Yth. Tim Pembimbing
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
 TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN  
 Nomor : 297/UNS3.5.HK.04/2023  
 Tanggal : 19 Januari 2023

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	Hukum	Erik Prasetyo	190574201023	Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Kerja Tertulis (Studi Kasus Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. H. Hendra Arjuna, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Irwandi Syahputra, SH.,MH
2	SOS	Muhammad Fahmi	170569201033	Dinamika Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Layang Basak Rahmas - Dompok Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Rahma Syafitri, M.Sos.
3	SOS	Niar	180569201012	Dampak Konflik Ojek Pempang Terhadap Tempat Penitipan Motor Di Kelurahan Sei Enam Di Kecamatan Bantan Timur;	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Siti Arieta, M.A
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
4	SOS	Ayu Vita Lestari	190569201021	Fenomena Rental Pacar Di Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Siti Arieta, M.A
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Sri Wahyuni, M.Si
5	IAN	Febriyan Saputra	170563201062	Analisis Gaya Kepemimpinan Umak Mengatasi Konflik Dalam Pembangunan Desa Di Desa Berindit Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.	Pembimbing Utama	Asist. Prof. H. Jambur Poti, SE., M.Si, Ph.D
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyanto, S.Sos., M.A.
6	IAN	Farhan Abdurrahman	180563201056	Efektivitas E-signature Di Dinas Pemasangan Modul dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
7	IAN	Daniel Septiono Stagian	160563201039	Strategi Pemasaran Pariwisata Pulau Penyengat Melalui Paket Wisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan	Pembimbing Utama	Asist. Prof. H. Jambur Poti, SE., M.Si, Ph.D
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si
8	IAN	Dewi Arianingsih	190563201064	Penerapan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.L., M.Si
9	IAN	Mayang Sary	190563201012	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air terjun Di Desa Pangkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Ramzi Samin, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si
10	IAN	Bela Sapira	190563201013	Efektiva Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kemiskinan Di Kelurahan Labak Pading Kecamatan Baru	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Ramzi Samin, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.L., M.Si
11	IAN	Helly Yana Harahap	190563201073	Efektivitas Dinas Pembudayaan Perempun Pendidikan Anak Dns Pembudayaan Masyarakat (DPAAPM) Dalam Pengendalian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Ramzi Samin, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Edy Akhyary, S.Sos., M.Si
12	IAN	Rena Marshella	190563201138	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerbitan Paspor Diak Baru (PPDB) Di Wilayah Kepulauan Riau (Studi SMP Negeri Kabupaten Karimun)	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Ramzi Samin, S.Sos., M.Si
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.L., M.Si

Lampiran 1. 3 Surat Ketetapan Seminar Usulan Penelitian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN  
SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA  
NOMOR : 559/UN53.5/HK.04/2023  
Pada Tanggal 6 Februari 2023

DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGUJI	
					JABATAN	NAMA
1	IAN	Dewi Asnainingsih	190563201064	Penerapan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun	Ketua	Asist. Prof. Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si.
					Anggota 1	Asist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Asist. Prof. Dr. Olparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si.
2	IAN	Rena Marshella	190563201138	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun	Ketua	Asist. Prof. Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.
					Anggota 1	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Anggota 2	Asist. Prof. Dr. Olparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si.
3	IAN	Lia Agustina	190563201018	Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan	Ketua	Asist. Prof. Ramadhani Setawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 1	Asist. Prof. H. Jambur Poti, SE., M.Si., Ph.D
					Anggota 2	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A.
4	IAN	Arlia Nurbelqis	190563201019	Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Busing Kecamatan Seri Kuala Luban Kabupaten Bintan	Ketua	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Anggota 1	Asist. Prof. H. Jambur Poti, SE., M.Si., Ph.D
					Anggota 2	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A.



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196109292015041002

## Lampiran 1. 4 Jadwal Seminar Usulan Penelitian

JADWAL USULAN SEMINAR PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAT  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

No	NIM	NAMA	Hari, Tanggal Waktu	JUDUL	TIM DOSEN	
					Intan	Noni Desai
1	18016201110	Muharnani	Kamis, 16 Februari 2023 08.00 - 09.00 WIB	Efikasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Desa Sebagai Insang Penggerak Sosial di Desa Air Anak Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas	Ketua	Asist. Prof. Dr. Alfanisri, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Asist. Prof. Dr. Fim Komaringsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Ely Akhyar, S.Sos., M.Si.
2	18016201056	Fahmi Abdurrahman	Kamis, 16 Februari 2023 09.00 - 10.00 WIB	Efektivitas E-governance Di Dinas Perikanan Muli dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Agus Hendrawaty, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Asist. Prof. Dr. Fim Komaringsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
3	18016201048	Dewi Anningsih	Kamis, 16 Februari 2023 10.00 - 11.00 WIB	Penerapan Teknologi Informasi: Pola Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun	Ketua	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Anggota 3	Asist. Prof. Agus Hendrawaty, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Olgarima, S.Sos., M.HI., M.S.
4	18016201012	Muryng Sari	Kamis, 16 Februari 2023 11.00 - 12.00 WIB	Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Desa Pengkar Kecamatan Teluk Kabupaten Karimun	Ketua	Asist. Prof. Dr. Alfanisri, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Assoc. Prof. Dr. H. Fanni Saman, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Ely Akhyar, S.Sos., M.Si.
5	18016201067	Fahmi Wika Purwana	Kamis, 16 Februari 2023 13.00 - 14.00 WIB	Efikasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Program Kampung KB Kelurahan Kampung Sejahtera Kecamatan Tanjungpinang Timur)	Ketua	Asist. Prof. Chosey Farkha Sholeh, S.A.P., M.A.P.
					Anggota 3	Asist. Prof. Dr. Fim Komaringsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Firdi Sobriyoko, S.Sos., M.A.
6	18016201054	Aisy Wiguna	Kamis, 16 Februari 2023 14.00 - 15.00 WIB	Strategi Bisnis Karya Khazanah (BKK) Dalam Peningkatan Pendapatan Dan Pelayanan Tenaga Kerja (Studi Kasus SMDN1 Siman)	Ketua	Asist. Prof. Agus Hendrawaty, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Assoc. Prof. Dr. H. Fanni Saman, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Fim Komaringsih, S.Sos., M.Si.
7	18016201138	Rena Marselita	Kamis, 16 Februari 2023 15.00 - 16.00 WIB	Implementasi Kebijakan Sistem Datas Pokok Pemerintahan Peserta Politik Baru (PPCB) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun	Ketua	Asist. Prof. Dr. Fim Komaringsih, S.Sos., M.Si.
					Anggota 3	Assoc. Prof. Dr. H. Fanni Saman, S.Sos., M.Si.
					Anggota 4	Asist. Prof. Dr. Olgarima, S.Sos., M.HI., M.S.

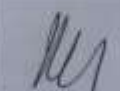
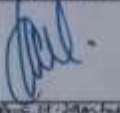
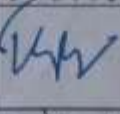

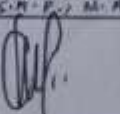


Wakil Dekan I  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

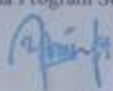
Asist. Prof. Nani Rahawati, M.Si.  
NEM 10134002

Lampiran 1. 5 Bukti Kehadiran sidang Skripsi

**BUKTI KEHADIRAN PADA UJIAN SKRIPSI**

Nama		Rena Marshella	
Nomor Induk Mahasiswa		190563201138	
Program Studi / Departemen / Konsentrasi		UMU ADMINISTRASI NEGARA	
No	Tanggal	Nama Peserta dan Judul Skripsi	Ketua Sidang dan Tanda Tangan
1	17/03/2023	Doty Gurvantry	ASOK PRIN, D.H., BUMI SAMIN S., S.O.S., M.Si
		Evaluasi Pengelolaan Ases Desa Di Desa Kurup Kecamatan Tambakan Kabupaten Bintan.	
2	17/03/2023	Futry	ASST. PROF. DR. H. RANUJAN HARAH, S.P., M.A.P.
		Tata Kelola Badan usaha Minc Desa Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Minc, kec. Lingga cab. Lingga)	
3	16/06/2023	Herina Amelia Putri	ASST. H. JAHNUR POKI, S.E.M.S.I.P.H.D.
		Implementasi Program Sistem Layanan Pencari Kerja (si-sarcan) (Studi Kantor dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan)	
4	16/06/2023	Cindea Putri A-1	ASST. PROF. DR. EBY AKHYAY, S.S., M.Si.
		Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Pendaftaran Orang Asing (APOA) di Kantor Imigrasi kelas II non tempat pemeriksaan imigrasi (tel)	
5	16/06/2023	Nurpalliza	ASST. PROF. CHARY, S.M.P., M.A.P.
		Implementasi kebijakan program Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Di Kecamatan Urai Kabupaten Karimun.	

Tanjungpinang, 26 Juni 2023  
Ketua Program Studi Umu Administrasi Negara

  
Dr. Fitri Kurnianingsih, S.S., M.Si  
NIP/NIDN. 0016030702

Lampiran 1. 6 Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

---

Nomor : 949/UN53.5/TU/2023 28 Februari 2023  
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 1  
Kabupaten Karimun  
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Rena Marshella  
NIM : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Nomor Handphone : 0895603710734  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Karimun."**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Asst. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN 1613048002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

Nomor : 949/UN53.5/TU/2023

28 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 04  
Satu Atap Tebing Kabupaten Karimun  
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Rena Marshella  
NIM : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Nomor Handphone : 0895603710734  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Karimun."**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si  
NIDN 1013048002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.unrah.ac.id> e-mail: [fisip@unrah.ac.id](mailto:fisip@unrah.ac.id)

Nomor : 1257/UN53.5/TU/2023

13 Maret 2023

Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

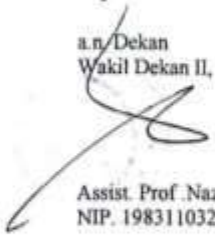
Yth. Kepala Bakesbangpol Karimun  
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Rena Marshella  
NIM : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Nomor Handphone : 0895603710734  
Judul Penelitian/Skripsi : **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Karimun."**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan II,

  
Assist. Prof. Nazaki, S.Sos., M.Si  
NIP. 198311032012121001



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing  
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Kode Pos 29631

Tanjung Balai Karimun, 28 Maret 2023

Nomor : 800.2/BAKESBANGPOL/III/034/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Penyampaian  
Rekomendasi Penelitian/Riset

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun
2. Kepala SMP Negeri 1 Karimun
3. Kepala SMP Negeri 4 SATAP Tebing

di-

Tempat

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penyampaian Rekomendasi Penelitian/ Riset, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian/ Riset, Nomor. 800.2/BAKESBANGPOL/III/034/2023, tanggal 28 maret 2023, atas nama:

Nama/Obyek : **RENA MARSHELLA**  
NIM/Jurusan/ : 190563201138 Ilmu Administrasi Negara / FISIPOL  
Fakultas/Jenjang : /SI  
Judul : **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun.**  
No Hp : 0895603710734

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KARIMUN**  
Sekretaris

  
**RAMLIA S. Sora, M. Si**  
Pembina PKL/IV.b  
NIP.19670905 198603 1002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tg. Pinang.





**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan  
Tebing  
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Kode Pos 29631

**REKOMENDASI PENELITIAN/ RISET**

Nomor: 800.2/BAKESBANGPOL/III/034/2023

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).  
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- Menimbang** : Surat dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1257/UN53.5/TU/2023 Tanggal 13 Maret 2023.
- KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**, memberikan Rekomendasi kepada:
- a. Nama/Obyek : **RENA MARSELLA**
- b. NIM/ Jurusan/ Fakultas/ Jenjang : 190563201138/ Ilmu Administrasi Negara / FISIPOL /SI
- c. Untuk : Penelitian/ Riset
- d. Judul : **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Di SMP Negeri Kabupaten Karimun.**
- e. Lokasi Kegiatan : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.  
2. SMP Negeri 1 Karimun.  
3. SMP Negeri 4 SATAP Tebing.
- f. Waktu/ Lama Kegiatan : 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.  
2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.  
3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- g. Promotor : 1. Dr. H.Rumzi Samin, S. Sos., M.Si  
2. Dr. Okparizan, S. Sos., M.H.I., M. Si

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 28 Maret 2023

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**  
Sekretaris

  
**RAMLI, S. Sos., M. Si**  
Pembina Tk.IV.b  
NIP.19670905 198603 1002

Lampiran 1. 7 Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KARIMUN**  
JL.PENDIDIKAN NO. 100, TANJUNG BALAI KARIMUN KODE POS.29661  
TELP.0777) 21234,Email. Smpn1\_karimun@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 421/SMPN1KRM/IV/126/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALAWATI, S.Pd, M.M  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SMP Negeri 1 Karimun

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Rena Marshella  
NIM : 190563201138  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Telah selesai melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 1 Karimun selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai 27 Maret s.d 27 April 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMP NEGERI KABUPATEN KARIMUN"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karimun, 01 April 2023  
Kepala Sekolah,  
  
  
SALAWATI, S. Pd, M.M  
PEMBINA  
NIP 197908312003122005



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SD-SMPN 4 SATU ATAP TEBING**

Jalan Brigjen Katamso RT. 001 RW. 002 Desa Pongkar, Kecamatan Tebing  
Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29665  
e-mail : smpnsatap.tebing@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 423.1/SD-SMPN 4 STP TBG/IV/061/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Murni, S.Pd.Ing  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SD-SMPN 4 Satu Atap Tebing  
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Desa Pongkar Kec. Tebing – Karimun

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Rena Marshella  
NIM : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Telah selesai melaksanakan penelitian di SD-SMPN 4 Satu Atap Tebing selama 2 minggu, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 s.d. 10 April 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kabupaten Karimun.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing, 11 April 2023

Kepala Sekolah,

  
**Siti Murni, S.Pd.Ing**  
NIP. 197307202002122004



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jend. Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Tanjung Balai Karimun,  
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29631  
Tel/Fax. (0777) 7366051, Website : <http://www.disdik.karimunkab.go.id>  
E-mail : [disdikkarimun@gmail.com](mailto:disdikkarimun@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 420/Disdikbud.Sekr/VV/1274/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dengan ini menerangkan kepada:

Nama : RENA MARSELLA  
NIM : 190563201138  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas : Mantim Raja Ali Haji

Bahwa benar nama tersebut diatas sudah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh data penyusunan skripsi dengan Judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Karimun".

Demikian Surat ini dikeluarkan untuk dapat digunakan dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun

Pada Tanggal: 19 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARIMUN






A. SUGIANTO, S.S., M.M

No. P. 6670/18/1993031008

Lampiran 1. 8 Konsultasi Dosen Pembimbing

**KONSULTASI SKRIPSI**

Nama	Rena Marshella		
Nomor Induk Mahasiswa	190563201138		
Program Studi / Departemen / Konsentrasi	Ilmu Administrasi Negara		
Nama Dosen Pembimbing	Dr.H Ruzni SAMIN, S.Sos, M.Si		
Tanggal Berita Acara Seminar UP	16 Februari 2023		
Judul Skripsi: IMPLEMENTASI KEBUKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK (PPDB) TINGKAT SMP DI KABUPATEN KARIMUN			
No	Tanggal	Arahan Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki Layout</li> <li>Perbaiki bab 4 dan 5 terlalu tinggi</li> <li>Tambahkan Wawancara sesuai responden di bab 4</li> <li>Tambahkan 4.3 pembahasan</li> <li>Ringkaskan lagi kesimpulan Perindikator</li> <li>Buat Cv</li> </ul>	
2.	20 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cari buku Implementasi baru ada 3 edward belum ada</li> <li>Siapkan ppt</li> </ul>	
3.	22 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACC</li> </ul>	




*Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan*

Tanjungpinang, 26 Juni 2023.....  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Dr. Etti Kurnianingsih, S.Sos, M.Si  
NIP/NIDN.0016038702

KONSULTASI SKRIPSI

Nama	Rena Marshella		
Nomor Induk Mahasiswa	10056320130		
Program Studi / Departemen / Konsentrasi	ILMU ADMINISTRASI NEGARA		
Nama Dosen Pembimbing	DEPARIZAN		
Tanggal Berita Acara Seminar UP	16 Februari 2023		
Judul Skripsi:	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun.		
No	Tanggal	Arahan Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	09/06/2023	1. Perbaikan Abstrak 2. Perbaikan latar belakang 3. Perbaikan Kerangka Pemikiran	
2.	12/06/2023	1. Perbaiki lagi latar belakang	
3.	14/06/2023	ACC	

Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Tanjungpinang, 26 Juni 2023  
Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA








Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si  
NIP/NIDN. 0016030702

**PERBAIKAN SKRIPSI  
SETELAH DISIDANGKAN**

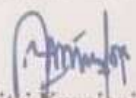
Nama : Rena Marshella  
 Nomor Induk Mahasiswa : 190563201138  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Tingkat SMP Negeri Di Kabupaten Karimun

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal 14 Juli sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan Data di Latar Belakang</li> <li>Daftar Refrensi</li> </ul>	1-5 100		
2	Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tambahkan Data Sekolah Di tanjung Balai Karimun</li> <li>Sinkronkan Kesimpulan</li> </ul>	48 94		
3	Dr. Okparizan, S.Sos., M.HI, M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latar Belakang</li> </ul>	1-5		
4	Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan Jarak dari sistem</li> </ul>	1-6		
5	Dr. Alfiandri, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Latar Belakang</li> <li>Bab 2</li> <li>Kesimpulan</li> </ul>	1 13 94		

Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Tanjungpinang, 20 Juli 2013  
 Ketua Dewan Penguji,

  
**Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si**  
 NIP/NIDN. 0016038702

Lampiran 1. 9 Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak H. Sugianto, S.S.,M.M Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten karimun



Wawancara bersama Bapak Hendri, S.Pd, MMPd Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karimun.





Wawanacar bersama Ibu Siti Murni Kepala Sekolah SMP Negeri 4 SATAP Tebing



Wawancara bersama Ibu Salawati, S.Pd., M.M Kepala Sekolah SMP N 1 Karimun



Wawancara bersama Ibu Afridayani Selaku Panitia PPDB SMP 4 SATAP Tebing



Wawancara bersama Ibu Noni Noviyanti Panitia PPDB SMP 1 Karimun



Wawancara bersama Putri Siswa SMP 4 SATAP Tebing



Wawancara bersama Safira Siswa SMP 4 SATAP Tebing



Wawancara bersama Syadza Ghaita Amri siswa SMP 1 Karimun



Wawancara bersama Rahayu Permatasari siswa SMP 1 Karimun



Wawancara bersama masyarakat yaitu ibu Mareka Sary



Wawancara bersama Masyarakat yaitu Ibu Susi



Wawancara bersama Winroland Gempita Alam Siswa SMP N 1 Karimun

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARIMUN**

*Menginformasikan ...*

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
JENJANG PAUD, SD, DAN SMP SE-KAB KARIMUN  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**SISTEM PPDB :**

- Sistem Offline : Dilaksanakan pada jenjang PAUD, SD dan SMP
- Sistem Online : Dilaksanakan pada 10 sekolah jenjang SMP.

**JALUR PPDB :**

1. Jalur Zonasi
2. Jalur Afirmasi
3. Jalur Perpindahan Orang Tua
4. Jalur Prestasi (Khusus SMP)

**PENDAFTARAN DAN SELEKSI JALUR PRESTASI SMP :**

Tanggal : 13 s.d 15 Juni 2023

**PENDAFTARAN DAN SELEKSI JALUR ZONASI, AFIRMASI & PERPINDAHAN ORANG TUA**

Jenjang PAUD, SD, DAN SMP : 13 s.d 17 Juni 2023

**PENGUMUMAN :**

1. Jalur Prestasi SMP : 16 Juni 2023
2. Jalur Zonasi, Afirmasi & Perpindahan Orang Tua jenjang PAUD, SD, DAN SMP : 19 Juni 2023

**PENDAFTARAN ULANG :**

Jenjang PAUD, SD, dan SMP Tanggal : 20 s.d 22 Juni 2023

**PERSYARATAN JENJANG PAUD :**

- Satuan Paud Sejenis (SPS) : Usia 0 - 4 Tahun  
Jika di daerah tersebut jauh dari TK, maka SPS boleh menerima usia 0 - 6 tahun.
- Kelompok Bermain (KB) : Usia 2 - 4 Tahun  
Jika di daerah tersebut jauh dari TK, maka KB boleh menerima usia 0 - 6 tahun.
- Taman Kanak-Kanak (TK) : Usia 4 - 6 Tahun
  - TK A : Usia 4 - 5 Tahun
  - TK B : Usia 5 - 6 Tahun

**PERSYARATAN JENJANG SD :**

- Diutamakan anak usia 7 tahun, yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Ket. Lahir & KK.
- Umur 6 thn pada tgl. 01-07-2023 dapat diterima jika masih tersedia daya tampung.

**PERSYARATAN JENJANG SMP :**

- Berusia maksimal 15 th pada tgl. 01-07-2023
- Memiliki ijazah SD sederajat / Surat Keterangan Kelulusan.

**UNTUK PPDB ONLINE DAPAT MENGAKSES LAMAN :**

[karimun.siap-ppdb.com](http://karimun.siap-ppdb.com)

**DAFTAR SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PPDB ONLINE :**

1. SMPN 1 KARIMUN	6. SWPN 1 TEBING
2. SMPN 2 KARIMUN	7. SWPN 2 TEBING
3. SMPN 1 MERAL	8. SMPN 3 TEBING
4. SMPN 2 MERAL	9. SMPN 1 MERAL BARAT
5. SMPN 3 MERAL	10. SMPN 2 MERAL BARAT

**MASA PENGENGALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) :**

Tanggal : 10 s.d 12 Juli 2023

**UNTUK INFORMASI SELANJUTNYA DAPAT MENGHUBUNGI :**

1. Jenjang PAUD : RAZALI, S.Ag (HP : 081270969645)
2. Jenjang SD : WISGIANTO, S.Pd SD (HP : 082387897884)
3. Jenjang SMP : LINDA HARIANI, S.Si, M.MPd (HP : 08136423574)

Pelaksanaan PPDB, tetap menjaga protokol kesehatan covid-19

*Pendaftaran tidak dipungut biaya!*

design by : [www.arsid.com](http://www.arsid.com)

**PDSKO :  
SABERPUNGLI  
0812 6633 5757**

**Data Sistem Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)**  
**Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Sistem Pendaftaran dan Seleksi dengan Sistem Online**

No.	Nama Sekolah Pendaftaran	Membuk Pendaftaran	Status Sekolah	Alamat	Kota	Provinsi	SMP		Tahun	Bulan	Tipe
							Isi	Pr			
1	SMP Negeri 1 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 1, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
2	SMP Negeri 2 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 2, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
3	SMP Negeri 3 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 3, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
4	SMP Negeri 4 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 4, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
5	SMP Negeri 5 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 5, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
6	SMP Negeri 6 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 6, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
7	SMP Negeri 7 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 7, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
8	SMP Negeri 8 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 8, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
9	SMP Negeri 9 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 9, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
10	SMP Negeri 10 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 10, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
11	SMP Negeri 11 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 11, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
12	SMP Negeri 12 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 12, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
13	SMP Negeri 13 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 13, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
14	SMP Negeri 14 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 14, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
15	SMP Negeri 15 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 15, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
16	SMP Negeri 16 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 16, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
17	SMP Negeri 17 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 17, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
18	SMP Negeri 18 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 18, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
19	SMP Negeri 19 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 19, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
20	SMP Negeri 20 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 20, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler

No.	Nama Sekolah Pendaftaran	Membuk Pendaftaran	Status Sekolah	Alamat	Kota	Provinsi	SMP		Tahun	Bulan	Tipe
							Isi	Pr			
21	SMP Negeri 21 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 21, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
22	SMP Negeri 22 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 22, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
23	SMP Negeri 23 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 23, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
24	SMP Negeri 24 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 24, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
25	SMP Negeri 25 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 25, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
26	SMP Negeri 26 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 26, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
27	SMP Negeri 27 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 27, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
28	SMP Negeri 28 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 28, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
29	SMP Negeri 29 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 29, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler
30	SMP Negeri 30 Semarang	2022	Reguler	Jl. Pemuda No. 30, Semarang	Semarang	Jawa Tengah	15	15	2022	06	Reguler



**Jadwal Pelaksanaan Zonasi**

	KEGIATAN	LOKASI	HARI/TGL	WAKTU
	Verifikasi Berkas Pendaftaran dan Penerimaan Token	Online	15 – 28 Juni 2022	07:00 – 23:55 WIB
	Pemeriksaan Data Siswa	Online	15 – 28 Juni 2022	24 jam
	Aktivasi Akun	Online	15 – 28 Juni 2022	24 jam
	Pendaftaran	Online	29 Juni – 1 Juli 2022	07:00 – 16:00 WIB ((Tanggal 01 Juli 2022 DITU TUP pukul 16:00 WIB))
	Evaluasi, Pemingkatan, dan Penyaluran	Online	2 – 3 Juli 2022	24 jam
	Pengumuman Hasil Seleksi	Online	4 Juli 2022	24 jam ((paling lambat pukul 23:59 WIB di Situs ppdb.jatengprov.go.id))
	Daftar Ulang	Sekolah diterima	5 – 7 Juli 2022	24 jam
	Hari Pertama Masuk Sekolah	Sekolah diterima	18 Juli 2022	24 jam







**SD-SMPN 4 SATU ATAP TEBING**  
Terakreditasi B

**MENERIMA PENDAFTARAN  
PESERTA DIDIK BARU**  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023




**1. Syarat Matri**

**YEE**  
Berikut Papan Isian, Cara dan Kompetensi yang Berkecukupan Nasional dan Lokal serta Matri:

**MCSI**

1. Melaksanakan Penilaian INTAQ
2. Melaksanakan Pembinaan Curiklat
3. Melaksanakan Pembinaan Akademik dan Non Akademik
4. Mengembangkan Sekolah sebagai Komunitas Belajar
5. Melaksanakan Keaktifan Sekolah
6. Melaksanakan Pemantauan Berbasis ICT
7. Melaksanakan Pengelolaan Sekolah Berbasis ICT

**Regimen Skenario/ujian dan Pengembangan Diri**

- Pengajaran Tiga Jarak
- Klub Akademik
- Klub Vokal
- Sajak Sela
- Teka Teki
- Jambore
- Pramuka

**2. Syarat Pendaftaran**

**Mengajukan**  
Foto copy Lembar/SDM/ Stempel 2 lembar  
Foto copy Akta Kelahiran 2 lembar  
Pas Foto KK dan KTP Orang Tua/Wali  
Pas Foto ukuran 3x4 dan 2x3 sebanyak 2 lembar  
Buku 10 ribu 1 lembar  
Kartu PIR/BSM Biji Siswa Yang Masih  
Foto scan Tawar Misi/TKW

**3. Waktu dan Tempat Pendaftaran**

Pendaftaran: 18 s/d 23 Juni 2022  
Pengumuman: 25 Juni 2022  
Pendaftaran Ulang: 25 s/d 27 Juni 2022

**Tempat Pendaftaran:**  
SD-SMPN 4 SATU ATAP TEBING  
21, Brijuni Kataman Desa Puhok

**4. Foto Kegiatan Sekolah**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Rena Marshella** Lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 maret 2001. Penluis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan merupakan satu-satunya anak peerempuan dari Bapak Muhammad dan Ibu Silawati. Peneliti memulai pendidikan dasar disekolah Dasar Swasta(SDS) 016 Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Semut Pada tahun 2008-2013. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tebing Kecamatan Tebing pada tahun 2013-2016. Dan melanjutkan pendidikan Sekolah menengah Atas (SMA) 1 Karimun Kecamatan Karimun pada tahun 2016-2019. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri dan lulus melalui jalur SBMPTN pada tahun 2019 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti organisasi yaitu organisasi keaderahan Himpunaan Mahasiswa Tanjung Balai Karimun. Demikian riwayat singkat perjalanan hidup penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat diterima dan menjadi bahan pembelajaran juga referensi bagi penelitian yang sejenis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif di dalam dunia pendidikan.